Penyunting:
Loekman Soetrisno
Mochammad Maksum
Susetiawan
Dyah Ismoyowati

Prosiding Lokakarya

MENCARI MODEL PEMECAHAN MASALAH HUBUNGAN INDUSTRI PERTAMBANGAN DENGAN MASYARAKAT SEKITAR

Yogyakarta, 24-25 September 1997

GRARIA
4

P3PK UGM

Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) Universitas Gadjah Mada, berdiri bulan April 1973, maka pada tahun ini sudah berusia 24 tahun. Mengacu pada Statuta Universitas Gadjah Mada, dalam kurun waktu 24 tahun P3PK telah berusaha mengemban misi melaksanakan berbagai studi interdisipliner dan transdisipliner menyangkut masalah-masalah keterbelakangan, kemiskinan dan ketertinggalan kawasan dan masyarakat.

Bidang-bidang studi yang digarap antara lain meliputi: Sejarah Agraria; Pertanahan dan Irigasi; Kelembagaan dan Komunikasi Pedesaan; Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Pedesaan; dan Kemiskinan dan Peluang Kerja Pedesaan.

Produk penelitian P3PK yang sebagian besar merupakan buah kerjasama dengan berbagai pihak telah dimasyarakatkan melalui kegiatan-kegiatan seminar bulanan dan konperensi-konperensi, dan sebagian di antaranya telah diterbitkan dalam bentuk *textbook*.

PUST

ISBN 979-95263-3-7

MENCARI MODEL PEMECAHAN MASALAH HUBUNGAN INDUSTRI PERTAMBANGAN DENGAN MASYARAKAT SEKITAR

© P3PK UGM, 1997

Penyunting
Loekman Soetrisno
Mochammad Maksum
Susetiawan
Dyah Ismoyowati

Penerbit
Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan
Universitas Gadjah Mada (P3PK UGM)
Alamat : Bulaksumur G/7, Yogyakarta 55281
☎ 564463, 901150, 901151
faximile (0274) 564463
e-mail : p3pk-ugm@idola.net.id.

Cetakan Pertama, Desember 1997

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN 979-95263-3-7

KPA Konsorsium Pembaruan Agraria

Prosiding Lokakarya

MENCARI MODEL PEMECAHAN MASALAH HUBUNGAN INDUSTRI PERTAMBANGAN DENGAN MASYARAKAT SEKITAR

Yogyakarta, 24-25 September 1997

Penyunting

Loekman Soetrisno
Mochammad Maksum
Susetiawan
Dyah Ismoyowati

Diterbitkan atas kerjasama antara
P3PK UGM – PT Freeport Indonesia – PT KPC
PT Timah Tbk – PT KEM

Penerbit

P3PK UGM

KPA

KATA PENGANTAR

Dalam suatu aktivitas yang penting untuk mencari model pemecahan masalah hubungan industri pertambangan dengan masyarakat sekitar melalui satu lokakarya, maka prosiding yang diterbitkan dalam satu buku ini menjadi salah satu dokumentasi atas upaya tersebut. Selanjutnya, diharapkan buku ini dapat menjadi acuan bagi kelanjutan aktivitas guna mewujudkan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan tadi.

Lokakarya yang diselenggarakan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, karena adanya kerjasama yang baik dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Pengusaha Pertambangan, dan Pemerintah Daerah di mana perusahaan pertambangan berada, mendapat dukungan penuh dari PT Freport Indonesia, PT KEM, PT KPC dan PT Timah Tbk.

Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik tersebut disampaikan dengan disertai harapan akan adanya tindak lanjut bagi hasil rumusan dari lokakarya ini.

Ucapan terima kasih kami tujukan juga bagi semua pihak, terutama staf Bagian Publikasi P3PK UGM atas kerja kerasnya yang membuahkan hasil ini.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat sekitar pertambangan, serta perusahaan pertambangan tidak menjadi sapi perah yang sia-sia.

Yogyakarta, 1 Desember 1997

Penyunting

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

HASIL RUMUSAN LOKAKARYA xi

- Sambutan Kepala P3PK UGM 1
- Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada 3
- Sambutan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia 5
- Pidato Pengarahan/Pembukaan Dirjen Pertambangan Umum 9
- Sejarah Munculnya Pemikiran Pengusahaan Pertambangan yang Berorientasi Kerakyatan 13
  1. Latar belakang 13
  2. Perkembangan pola pikir kebijaksanaan pertambangan 15
  3. Kebijaksanaan masa depan 27
  4. Penutup 30
- Beberapa Aspek Sosial Guna Menciptakan Hubungan Perusahaan, Masyarakat, dan Pemerintah yang Efektif.. 35
  1. Latar belakang masalah 35
  2. *Affirmative action* dan pengembangan 36
  3. *Gender based community development* 37
  4. Peranan pemerintah daerah 30
  5. "*Trust*" atau saling percaya antara rakyat sekitar pertambangan, perusahaan pertambangan dan pemerintah daerah 40
  6. Penutup 41

- Pengusahaan Pertambangan dan Tanggung Jawab Sosial 43
  1. Pendahuluan 43
  2. Dari pandangan konservatif ke perspektif baru 44
  3. Beberapa upaya dan masalah sosial 45
  4. Tahapan pengusahaan pertambangan 50
  5. Strategi dan program 52
  6. Penutup 54

- Persoalan Sosial Budaya Masyarakat Industri Pertambangan 59
  1. Latar belakang masalah 59
  2. Kondisi geografis dan demografis 61
  3. Industri pertambangan dan pembangunan Irian Jaya 65
  4. Persoalan sosial budaya dalam pengembangan industri pertambangan di Irian Jaya dan strategi pemecahannya 67
  5. Kesimpulan 73

- Pertambangan dan Masyarakat Lokal di Propinsi Irian Jaya 77
  1. Pendahuluan 77
  2. Isu-isu pokok 78
  3. Dialog tiga pihak: suatu alternatif pemecahan masalah? 80

- Komitmen Sosial PT Freeport Indonesia: Tantangan dan Pelaksanaan 83
  1. Pendahuluan 83
  2. Kondisi sosial daerah pertambangan PTFI: dahulu, sekarang dan kecenderungan di masa datang 85
  3. Komitmen sosial PTFI: sekarang dan ke depan 91
  4. Penutup 98

- PT Kaltim Prima Coal dan Masyarakat Sekitarnya 101
  1. Pendahuluan 101
  2. Masyarakat sekitar perusahaan 101
  3. PT KPC dan visi pengembangan masyarakat 104

4. Pokok-pokok program 105
5. Permasalahan 108
6. Badan koordinasi 110
7. Kesimpulan 111

◆ Gambaran Program dan Strategi Umum yang Ditetapkan oleh Community Relation Departemen PT Kelian Equatorial Mining 113
1. Latar belakang 113
2. Tujuan umum 114
3. Program-program 115
4. Strategi yang diterapkan 116
5. Masalah-masalah 118
6. *Lesson learn* 119
7. Hasil yang telah dicapai 121

◆ Pengalaman PT INCO dalam Pengembangan Wilayah Bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sekitarnya 123
1. Profil perusahaan 123
2. Pendahuluan 124
3. Pengembangan wilayah 127
4. Konsep pengembangan masyarakat 131
5. Kesimpulan 136

◆ Peranserta PT Timah Tbk dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sektor Pertambangan 139
1. Pendahuluan 139
2. Misi PT Timah Tbk 141
3. Tujuan program pengembangan wilayah dan masyarakat 141
4. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat Sekitar tambang 142
5. Kemitraan 148
6. Program perusahaan menghadapi era pasca timah ... 150
7. Penutup 151

HASIL RUMUSAN LOKAKARYA

1. Pendahuluan

Peristiwa Bougenville merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi manajemen perusahaan pertambangan di seluruh dunia. Pelajaran utama dari apa yang saat itu terjadi di Bougenville adalah bahwa manajemen sebuah perusahaan pertambangan tidak mungkin lagi hanya mengejar keuntungan bagi pemegang saham perusahaan tetapi perlu pula memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya, masyarakat sekitarnya.

Di samping peristiwa Bougenville ada faktor lain yang berpengaruh pada manajemen perusahaan pertambangan masa kini. Faktor tersebut adalah munculnya organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik di dalam maupun luar negeri yang dengan tajam dan serius mengamati kinerja dari perusahaan pertambangan baik dari segi kebijaksanaan perusahaan yang menyangkut pelestarian lingkungan maupun kebijaksanaan perusahaan yang menyangkut kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya, dari masyarakat sekitar pertambangan.

Ada dua kata yang selalu dikaitkan dengan perusahaan pertambangan dan perusahaan ekstraktif pada umumnya. Dua kata yang terkait itu adalah *"enclave"* dan *"ghost town"*. Dua kata ini terkait erat dengan sifat dari usaha pertambangan yang bersifat ekstraktif dan falsafah manajemen dari perusahaan tersebut yang berorientasi pada mencapai keuntungan sebesar-besarnya.

Perusahaan pertambangan pada umumnya beroperasi di daerah terpencil yang serba minim fasilitasnya. Sementara itu dalam beroperasi perusahaan pertambangan tersebut ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli pertambangan maupun tenaga lain non-pertambangan yang secara bersama hidup dalam satu komunitas yang serba berbeda dengan masyarakat sekitarnya baik dari segi

fasilitas fisik maupun non-fisik. Hubungan dengan masyarakat sekitarnya sangat terbatas dan bahkan tertutup. Masyarakat yang diciptakan oleh perusahaan ekstraktif seperti perusahaan pertambangan yang bersifat eksklusif disebut *"enclave"*.

Enclave yang serba lengkap fasilitasnya sering menimbulkan kecemburuan dari masyarakat sekelilingnya yang serba minim fasilitasnya dan kehidupan sosial dan ekonomi penduduknya yang rendah. Kecemburuan inilah yang sering menjadi faktor laten yang dapat memicu terjadinya konflik antara manajemen perusahaan me-lawan penduduk/masyarakat sekitarnya. Masyarakat sekitar yang semula adalah pemilik lahan merasa tersingkir baik dari segi, sosial, dan ekonomi, dengan hadirnya perusahaan pertambangan yang telah menguasai lahan milik mereka tanpa memberikan sesuatu kepada mereka. Hubungan yang tidak serasi antara pihak perusahaan dan masyarakat memaksa pihak perusahaan mengundang pihak aparat keamanan dalam jumlah yang relatif besar untuk menjaga kemanan. Hal ini membutuhkan jumlah uang yang cukup banyak dan keberadaan aparat keamanan yang relatif banyak dalam satu wilayah akan menciptakan kondisi yang otoriter.

"*Ghost town*" atau "kota mati" adalah kata yang digunakan oleh para pengamat pertambangan terhadap kemunduran suatu wilayah yang mati dari segi ekonomi ketika operasi pertambangan di wilayah itu berakhir/selesai.

Kehadiran perusahaan ekstraktif dalam satu wilayah terbatas waktunya tergantung dari jumlah kandungan barang tambang yang terkandung dalam wilayah itu. Selama kandungan barang tambang masih mencukupi maka perusahaan tambang akan beroperasi, masyarakat setempat akan memperoleh tetesan dari keberadaan perusahaan itu. Tetapi ketika cadangan bahan tambang habis maka perusahaan tambang pun akan meninggalkan wilayah itu, dan wilayah itu secara tiba-tiba mengalami kemunduran yang drastis. Seluruh kegiatan sosial, ekonomi, seolah-olah mati, penduduk mulai banyak meninggalkan wilayah itu, perusahaan tambang meninggalkan wilayah itu dengan meninggalkan lingkungan yang

rusak. Kondisi seperti ini yang disebut sebagai *"ghost town"*. Fenomena "*enclave*" dan "*ghost town*" itulah yang pada saat ini ingin dicoba dirubah oleh manajemen perusahaan pertambangan dengan mengembangkan *"corporate social responsibility"*. Inti dari "*corporate social responsibility*" ini adalah bahwa manajemen perusahaan pertambangan mempunyai kewajiban moral untuk membantu kesejahteraan sosial, ekonomi, masyarakat sekitarnya di samping mencari untung. Karena "*corporate social responsibility*" itu merupakan kewajiban moral dari perusahaan pertambangan maka setiap perusahaan pertambangan harus memiliki *investasi sosial* di samping *investasi lain* yang berkait dengan upaya meningkatkan *kinerja* produksi perusahaan pertambangan seperti investasi dalam teknologi pertambangan.

Sebenarnya investasi sosial dalam bentuk program *community development*, secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja produksi perusahaan karena investasi sosial dapat menghilangkan konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar pertambangan.

2. Tujuan Lokakarya

Lokakarya yang berjalan selama dua hari tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut, yakni mencari model yang efektif agar terjadi hubungan yang serasi antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitar pertambangan.

3. Pelaksanaan Lokakarya

Pelaksanaan Lokakarya ini dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama merupakan sidang-sidang pleno yang diisi dengan pembacaan-pembacaan makalah yang berasal baik dari Dirjen Pertambangan Umum, Perguruan Tinggi, maupun dari pihak perusahaan pertambangan.

Bagian Kedua dari lokakarya adalah sidang kelompok. Sidang kelompok terbagi dalam tiga kelompok. Masing-masing kelompok diminta oleh panitia lokakarya untuk membahas dan memberikan

rekomendasi pemecahan terhadap sebuah masalah yang oleh panitia dianggap sebagai sesuatu yang krusial dalam upaya mencoba menciptakan model yang efektif untuk menciptakan hubungan yang serasi antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitar. Atas dasar hal tersebut di atas, maka sidang kelompok terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok Pertama membicarakan topik hubungan antara perusahaan pertambangan dan masyarakat. Para anggota kelompok ini diminta oleh panitia untuk menjawab beberapa pertanyaan antara lain: (1) Apa yang menjadi komitmen perusahaan terhadap masyarakat sekitar tambang, dan (2) bagaimana memecahkan masalah pertanahan yang sering terjadi di wilayah pertambangan?

Sidang Kelompok Kedua, bersidang dengan sebuah topik yakni Hubungan Perusahaan Tambang dengan Pemerintah Daerah Setempat. Sama dengan kelompok pertama, maka kepada kelompok ini oleh panitia lokakarya diajukan beberapa pertanyaan untuk dibahas dalam sidang. Pertanyaan tersebut antara lain: (1) Kerjasama macam apa yang perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah dan perusahaan pertambangan, dan (2) Bagaimana seharusnya royalty yang diserahkan oleh perusahaan pertambangan dapat dibagi secara adil tidak hanya antara pusat dan daerah tetapi juga antara pemerintah daerah dalam satu propinsi wilayah pertambangan.

Sidang Kelompok Ketiga, membicarakan masalah bagaimana meningkatkan kemampuan para aparat pemerintah daerah agar mereka mampu menjadi perencana dan bersama masyarakat menjadi pelaksana pembangunanyang efektif. Sama seperti kedua kelompok yang lain, panitia lokakarya juga mengajukan beberapa pertanyaan untuk didiskusikan oleh para anggota kelompok. Pertanyaan tersebut antara lain: (1) Apakah kelemahan yang ditemui dalam tubuh pemerintah daerah sehingga belum mampu memfungsikan dirinya sebagai perencana dan pelaksana program-program pembangunan wilayah yang efektif, dan (2) Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan perusahaan pertambangan untuk meningkatkan kapasitas para aparat pemerintah daerah di wilayah pertambangan.

4. Saran-saran

4.1. Strategi Hubungan Perusahaan Pertambangan dan Masyarakat

4.1.1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat karena pada dasarnya melalui operasi penambangan dan kegiatan-kegiatan pendukungnya telah terjadi pengambilalihan hak penguasaan sumberdaya milik penduduk setempat. Dalam memenuhi tanggung jawab sosial tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

(1) Perusahaan wajib menghormati dan mengakui hak penduduk atas sumberdaya dan lingkungan hidup. Dalam kaitan itu, pembebasan tanah dan pemberian rekognisi harus dilakukan atas dasar pemahaman secara mendalam akan fungsi sosial, budaya dan ekonomi sumberdaya alam (termasuk tanah) masyarakat, sehingga dapat disusun rencana rekognisi yang memungkinkan masyarakat berkembang dan meningkat status sosial ekonominya dalam jangka panjang dan secara berkesinambungan.

(2) Harkat dan martabat, termasuk harkat politik, masyarakat harus dihargai. Penghargaan atas harkat dan martabat masyarakat itu perlu dilakukan melalui dialog yang setara antar pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kaitan itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pemberian saham kepada masyarakat pemilik hak ulayat. Melalui cara ini, posisi masyarakat dalam perusahaan menjadi jelas dan memungkinkan mereka dapat melakukan dialog pada posisi yang lebih baik.

(3) Kesempatan harus diberikan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Upaya-upaya pembangunan masyarakat (*community development*) yang dilaku-

kan oleh perusahaan harus memungkinkan aspirasi masyarakat ditampung secara baik, sehingga kebutuhan merekalah yang menjadi dasar penyusunan program-program *community development* dan bukan kebutuhan menurut definisi pihak luar.

Kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat perlu dilakukan oleh perusahaan sedini mungkin – termasuk sebelum kegiatan penambangan itu dimulai. Penyiapan sumberdaya manusia lokal secara dini akan memungkinkan masyarakat untuk dapat berinteraksi secara baik dengan perusahaan – termasuk memungkinkan tenaga kerja lokal dapat terserap dan berkembang dalam semua jenjang pekerjaan di dalam perusahaan.

4.1.2. Tujuan Pemenuhan Tanggung Jawab Sosial

Pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan harus dilakukan sehingga memenuhi tiga tujuan berikut:

(1) Memberdayakan masyarakat (telah diuraikan pada butir 1 di atas).

(2) Membangun daerah. Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan harus pada akhirnya memungkinkan kemampuan daerah berkembang secara baik, termasuk sesudah perusahaan pertambangan itu ditutup.

(3) Membina persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan hendaknya tidak didasarkan atau hanya eksklusif pada suku/kelompok etnis tertentu, karena pada akhirnya akan berpotensi pada timbulnya konflik antarsuku yang pada akhirnya akan berujung pada disintegrasi nasional.

4.1.3. Pola Hubungan Kerja dalam Pemenuhan Tanggung Jawab Sosial kepada Masyarakat

Pola hubungan kerja harus dilakukan secara segitiga dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Perusahaan. Hu-

bungan kerja ini, seperti dikemukakan di atas, harus berlangsung setara dan saling menguntungkan. Dalam menyusun program-program pembangunan, kerjasama ini harus terjalin sehingga pembagian tanggung jawab dapat dilakukan secara baik dan jelas.

4.1.4. Metoda Pemenuhan Tanggung Jawab Sosial

Dengan menyesuaikan dengan keadaan di lapangan dan isu-isu sosial pokok yang dihadapi, perusahaan dapat melakukan tanggung jawab sosialnya secara langsung, tidak langsung, atau terpadu. Persoalan-persoalan yang menyangkut pembebasan tanah dan sebagainya memerlukan campur tangan langsung perusahaan dengan arahan pemerintah. Sebaliknya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat, perusahaan dapat mengundang yayasan-yayasan profesional yang independen untuk bekerjasama.

Ada banyak manfaat yang dapat dicapai dengan mengundang yayasan progesional seperti ini. Pertama, keahlian pengembangan masyarakat dapat dipenuhi dengan lebih baik ketimbang harus dilakukan sendiri oleh perusahaan. Kedua, melalui yayasan dimungkinkan diperoleh sumber pendanaan dan program-program dari pihak lain sehingga masyarakat tidak merasa bahwa perusahaan adalah satu-satunya sumber pembangunan bagi mereka. Ketiga, walaupun yayasan merupakan "tangan kanan" perusahaan, mereka dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara lebih independen sehingga memungkinkan kegiatan pengembangan masyarakat perusahaan dapat ditingkatkan mutunya secara lebih konseptual dan komprehensif. Keempat, yayasan tersebut masih dapat terus melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat sesudah tambang ditutup.

4.1.5. Kebutuhan Informasi bagi Pemenuhan Tanggung Jawab Sosial

Agar dapat memenuhi tanggung jawab sosialnya secara baik, sebelum suatu kegiatan penambangan dimulai perlu dilakukan

upaya-upaya pengumpulan informasi sosial oleh pihak-pihak yang profesional. Bagi perusahaan-perusahaan yang belum memiliki informasi seperti ini disarankan agar segera memulainya. Informasi seperti ini sangat diperlukan dalam membina hubungan dengan masyarakat, dan sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan program-program pengembangan masyarakat.

Informasi-informasi yang diperlukan antara lain: (a) Struktur sosial dan kepemimpinan masyarakat; (b) Pola-pola perekonomian masyarakat; (c) Aspirasi dan ekspektasi masyarakat; (d) Ketersediaan dan kualitas tenaga kerja; dan (e) Tingkat pendidikan dan ketrampilan.

4.1.6. Rencana Pengembangan Masyarakat Pasca Tambang

Penelitian yang pernah dilakukan di pulau Jawa menunjukkan bahwa daerah yang pada masa kolonial merupakan kawasan perkebunan justru merupakan daerah lebih miskin dibandingkan daerah yang bukan kawasan perkebunan. Hal yang sama mungkin saja terjadi di kawasan tambang, terutama apabila manfaat ekonomi yang diperoleh dari usaha pertambangan tersebut selalu mengalir keluar dan sedikit yang diinvestasi di daerah tersebut.

Oleh karena itu tiap perusahaan wajib memiliki rencana pengembangan masyarakat/pembangunan sesudah tambang selesai beroperasi. Perusahaan dan pemerintah daerah setempat perlu mendorong sektor-sektor produksi lain di luar, dan tidak terkait dengan usaha pertambangan, untuk beroperasi di sekitar daerah pertam-bagan, sehingga keberlanjutan pembangunan dapat dijamin.

4.1.7. Networking dan Pertukaran Informasi

Persoalan-persoalan masyarakat daerah pertambangan memiliki cirinya sendiri-sendiri. Pemecahannya pun tidak dapat dilakukan dalam sehari dua, tetapi membutuhkan komunikasi yang

teratur antar pelaku pembangunan masyarakat sekitar daerah pertambangan.

Untuk itu diusulkan agar dibentuk suatu network yang terdiri dari perusahaan pertambangan, universitas, instansi pemerintah pusat dan daerah terkait, dan pihak-pihak terkait lainnya yang berfungsi sebagai wadah pertukaran informasi dan diskusi untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang timbul atau yang berpotensi untuk muncul di masa datang.

4.1.8. Affirmative Action

Perusahaan pertambangan diusulkan agar menempuh pendekatan *affirmative action* dalam upaya meningkatkan harkat sosial-ekonomi masyarakat. Masyarakat sekitar pertambangan yang lemah dalam segala hal tidak mungkin dibiarkan bersaing dengan masyarakat pendatang yang serba kuat tanpa perlindungan pihak perusahaan pertambangan.

4.1.9. Pendekatan Gender Dalam Community Development

Disarankan agar dalam melakukan *community development*, pihak perusahaan harus memperhatikan peran dan aspirasi kaum wanita yang ada dalam masyarakat sekitar pertambangan. Program-program *community development* yang dikhususkan untuk kelompok wanita perlu dikembangkan di samping program *community development* yang bersifat umum.

4.1.10. Pelaksanaan Community Development

Lokakarya mengusulkan agar perusahaan pertambangan mulai melakukan program *community development* sejak perusahaan mulai eksplorasi. Ada dua alasan mengapa hal itu perlu dilakukan. *Pertama,* pada tahap eksplorasi berbagai perubahan lingkungan pun telah terjadi yang dapat merugikan masyarakat. Program *Community Development* harus dianggap sebagai kompensasi dari kerugian yang dibuat oleh perusahaan.

Kedua, program *Community Development* yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan sedini mungkin dapat menciptakan dasar yang kokoh untuk membangun sebuah hubungan yang serasi antara pihak perusahaan pertambangan dan masyarakat setempat.

4.2. Strategi Hubungan Perusahaan Tambang dan Pemerintah Daerah

4.2.1. Dalam pembangunan wilayah masyarakat pertambangan maka pemerintah daerah haruslah tetap berfungsi sebagai *agent of development*. Fungsi ini *tidak dapat* dialihkan atau diambil alih oleh pihak perusahaan.

4.2.2. Diusulkan agar setiap pemerintah daerah di wilayah pertambangan mampu membuat rencana beserta anggaran belanja, di mana dengan jelas dan rinci disebutkan jumlah bantuan yang diharapkan oleh pemerintah daerah datang dari pihak perusahaan pertambangan.

4.2.3. Pemerintah pusat perlu segera mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur pembagian royalty yang dibayar oleh perusahaan pertambangan. Dalam peraturan itu harus dijelaskan secara transparan berapa persen yang menjadi hak pemerintah pusat, dan berapa persen yang menjadi hak pemerintah daerah Tk. I dan II, dan berapa persen yang menjadi hak pemerintah kecamatan. Adanya pembagian royalty yang jelas akan dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial antar aparat pemerintah sehingga mereka merasa memiliki perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayahnya; tersedianya dana akan memberdayakan pemerintah daerah sebagai agen pembangunan.

4.2.4. Pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pengusaha pertambangan agar menghindari kebiasaan yang menganggap perusahaan pertambangan sebagai sumber dana untuk apa saja dan kapan saja.

4.3. Capacity Building Aparat Pemerintah Daerah dalam rangka Pertambangan Berkerakyatan

Yang perlu diberdayakan adalah: (1) Pemerintah Kecamatan; dan (2) Pemerintah Tingkat II (Kabupaten).

(1) Pemberdayaan ini bisa berupa training kepada Bupati dan aparatnya, serta Camat dan aparatnya. Isi training: Membuat aparat memiliki kemampuan menjadi fasilitator dalam pembangunan daerah, serta mampu untuk memberdayakan masyarakatnya.

(2) Perguruan Tinggi atau LSM berperan untuk membuat modul training serta memberi training. Modul harus betul-betul sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, misalnya: data-data kemanusiaan daerah setempat, suku-suku, perilaku suku.

SAMBUTAN KEPALA P3PK UGM

Assalaamu'alaikum w.w.

Saya selaku pimpinan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM, dan sekaligus sebagai penanggung jawab lokakarya ini, *pertama* mengucapkan selamat datang kepada para peserta lokakarya selama dua hari yakni tanggal 24-25 September 1997 di Kampus UGM.

Kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada perusahaan-perusahaan pertambangan yang telah disebutkan, atas kerja sama, terutama pendanaan, dalam menyelenggarakan lokakarya untuk mencari pemecahan masalah masyarakat di sekitar pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan juga tidak tinggal diam melihat berbagai masalah di sekitar industri pertambangan yang tidak sederhana untuk diselesaikan, tanpa ada partisipasi dari semua pihak termasuk masyarakat itu sendiri, pemerintah daerah, keterlibatan departemen pertambangan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Kompleksitas persoalan masyarakat di sekitar dunia pertambangan akan dapat dicari jalan keluarnya, manakala kita dapat duduk bersama-sama untuk memikirkan mereka seperti sekarang ini.

Ketiga, saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan lain baik dari Bappenas, Pemda, Departemen Pertambangan, dan dari Perguruan Tinggi atas partisipasinya dalam lokakarya ini.

Lokakarya ini memang diselenggarakan dengan peserta yang sangat terbatas, dengan maksud bahwa semua persoalan dapat dibicarakan dengan tuntas dan menemukan solusi dari setiap persoalan yang ada. Undangan termasuk keseluruhan panitia berjumlah 60 orang, terdiri dari unsur Perusahaan Pertambangan, Peme-

rintah Daerah, maupun Departemen dan Bappenas, serta Perguruan Tinggi.

Dalam lokakarya ini, pada hari pertama akan dibicarakan berbagai persoalan, baik dari pengamatan perguruan tinggi maupun masalah yang dirasakan perusahaan pertambangan itu sendiri sehubungan dengan pembangunan masyarakat sekitar pertambangan. Selain itu, pada hari pertama ini juga dapat didengarkan apa yang menjadi visi pemerintah tentang membangun dan mengembangkan perusahaan yang berorientasi kerakyatan. Pada hari kedua, peserta akan dikelompokkan dalam sidang kusus untuk menghasilkan strategi pemecahan masalah yang dihadapi oleh semua pihak terkait.

Karena pertemuan ini bersifat lokakarya, berdasarkan keputusan panitia dan beberapa perusahaan pertambangan dalam pertemuan tanggal 13 Agustus 1997 lalu di kantor P3PK UGM, maka lokakarya diselenggarakan secara tertutup dan jumpa pers diadakan setelah pertemuan berakhir.

Akhirnya, sekali lagi, saya selaku pimpinan P3PK UGM, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu dalam lokakarya ini. Demikian juga para peneliti, asisten peneliti, dan karyawan P3PK yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan lokakarya ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentu, dalam penyelenggaraan apapun, kekurangan dan kekilafan selalu terjadi. Untuk itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangsempurnaan dalam penyelenggaraan lokakarya ini.

Wassalaamu 'alaikum w.w.

Yogyakarta, 24 September 1997

Loekman Soetrisno

SAMBUTAN
REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

Assalaamu'alaikum w.w.

Saya mewakili Rektor Universitas Gadjah Mada, pertama-tama mengucapkan selamat datang dalam Lokakarya "Mencari Model Pemecahan Masalah Hubungan Antara Industri Pertambangan Dengan Masyarakat Sekitar" yang diselenggarakan di kampus Universitas Gadjah Mada ini.

Mengingat pentingnya masalah pertambangan yang akhir-akhir ini banyak diungkapkan oleh media masa, saya selaku pimpinan Universitas Gadjah Mada merasa bangga bahwa persoalan-persoalan di sekitar dunia pertambangan dibicarakan bersama-sama dengan berbagai pihak yang terkait untuk mencari pemecahan yang dapat menguntungkan semua pihak.

Selain itu, kerja sama antara perguruan tinggi, perusahaan pertambangan, dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berdiri sebagai menara gading, akan tetapi perguruan tinggi berusaha memberikan kontribusi pemikiran pemecahan masalah. Pendek kata, saya selaku pimpinan Universitas mengucapkan selamat berlokakarya.

Selanjutnya, saya mohon Bapak Direktur Jenderal Pertambangan Umum berkenan membuka lokakarya yang diselenggarakan selama dua hari di kampus UGM ini.

Saya kira sekian sambutan saya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan peserta untuk mengikuti lokakarya, semoga sukses dan lancar menghasilkan sesuatu yang berguna demi kepentingan bangsa Indonesia.

Wassalaamu 'alaikum w.w.

Yogyakarta, 24 September 1997

Pembantu Rektor I UGM

Prof.Dr.Ir. Boma Wikan Tiyoso, M.Sc.

SAMBUTAN
PRESIDEN DIREKTUR
PT FREEPORT INDONESIA COMPANY

Kami dari dunia industri pertambangan sangat menghargai inisiatif yang telah diambil oleh para pemrakarsa dari lokakarya yang diadakan selama dua hari ini. Tujuan dan hasil dari lokakarya ini kami harapkan dapat menempatkan persepsi dari masyarakat mengenai dunia pertambangan dalam proporsi yang realistis dan obyektif.

Masyarakat awam dan bahkan bukan awam pada umumnya melihat dunia pertambangan sebagai perusak lingkungan, a-sosial atau tidak mempunyai rasa kepedulian, hanya bertujuan mengeruk keuntungan, menginjak-injak hak-hak masyarakat, eksklusif, dan sebagainya.

Sering tidak diketahui dan mungkin sengaja dikaburkan bahwa:

- Usaha pertambangan bernaung di bawah kontrak karya (KK), sehingga beroperasi berdasarkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, undang-undang dan diawasi oleh Pemerintah dalam pelaksanaannya melewati departemen terkait.

- Bahwa usaha pertambangan adalah usaha beresiko tinggi (dari ± 100 KK, yang beroperasi hanya 7), dengan modal yang tinggi, '*long yielding*', '*long margin*' dan sangat dipengaruhi oleh harga pasaran internasional.

- Bahwa hasil dari usaha pertambangan mineral dijual di pasaran bebas, sangat bersaing dengan produsen-produsen negara lain, dan tidak dijual ke "*captive market*".

- Bahwa kebanyakan dari perusahaan pertambangan beroperasi di daerah terpencil di mana sarana dan prasarana, kehadiran aparat pemerintahan sangat minimal bahkan kadang-kadang tidak ada.

- Bahwa karena keadaan "pionir" tersebut perusahaan pertambanganlah yang membuka daerah dan meletakkan dasar-dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya (bilamana ada) melalui program-program pendidikan, kesehatan, pelatihan, bea-siswa, komunikasi fisik (pelabuhan, jalan).

- Bahwa perusahaan pertambangan dapat merupakan kontributor dari regional GDP.

- Bahwa sebagian besar dari *revenue* dibelanjakan di negara penghasil sehingga dengan segala "*multiplier effect*"-nya merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mendukung dan bah-kan dapat mempercepat pembangunan wilayah dan negara.

- Bahwa hasil dari royalty dan pajak-pajak setempat adalah seyogyanya merupakan sumber pendanaan yang penting untuk pembangunan wilayah dan kesejahteraan dari masyarakat lepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh usaha pertambangan.

- Bahwa di kebanyakan negara-negara lain sarana dan prasarana, termasuk pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, dilakukan seluruhnya atau sebagian besar oleh Pemerintah, yang mengakibatkan menurunnya biaya investasi.

Dan masih ada faset-faset lainnya yang sering dilupakan dan atau tidak pernah disinggung. Kami sangat mengharap bahwa dalam lokakarya ini yang bertujuan menemukan model yang ideal, hal-hal tersebut di atas juga dipertimbangkan sehingga ada pengertian dan solusi yang berimbang. Karena bila tidak dilihat secara integral dan holistik yang akan dirugikan adalah negara kita yang tercinta ini yang sedang giat-giatnya membangun menurut kesepakatan kita bersama sebagaimana dituangkan dalam GBHN menuju industri-alisasi untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Investasi swasta, karena sangat keterbatasan dana dari Pemerintah, merupakan salah satu sokoguru/tiang utama dari upaya dan arah pembangunan RI.

Investasi antara lain di dunia pertambangan inilah yang telah dan harus membiayai pembangunan yang telah dan sedang berlangsung selama era Orde Baru ini untuk menciptakan masyarakat yang diidam-idamkan oleh "*founding fathers*" kita. Dan merupakan tanggung jawab kita semuanya untuk merealisasikannya.

Yogyakarta, 24 September 1997

Dr. Adrianto Maghribi

PIDATO PENGARAHAN/PEMBUKAAN DIRJEN PERTAMBANGAN UMUM

Assalamu'alaikum w.w. dan Salam Sejahtera

Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kemurahanNya-lah kita dapat bertatap muda pada Pembukaan Lokakarya "Mencari Model Pemecahan Masalah Hubungan antara Industri Pertambangan dengan Masyarakat Sekitar", di Kampus UGM yang sama-sama kita cintai ini. Kami sangat menghargai upaya Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan pertambangan untuk mewujudkan pelaksanaan lokakarya ini, sebagai matarantai dari kerjasama antara Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dengan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM dala meneliti indikator kerakyatan pada perusahaan pertambangan.

Para hadirin yang saya hormati,

Pada dekade terakhir ini, pengembangan pertambangan di seluruh dunia bukan hanya dihadapkan dengan masalah teknologi dan permodalan lagi, tetapi semakin nyata dan meningkat dihadapkan dengan kendala-kendala aspek-aspek lingkungan hidup, utamanya aspek sosial-budaya, yaitu yang berkaitan dengan dampak-dampak yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan sosial-budaya masyarakat di daerah operasi pertambangan.

Pemerintah sangat menyadari betapa kompleksnya dampak-dampak sosial-budaya sebagai salah satu akibat suatu kegiatan pertambangan di wilayah tertentu. Oleh karena itulah kebijaksanaan pertambangan nasional kita sebagaimana ditetapkan dalam GBHN, yaitu antara lain untuk mengoptimalkan manfaat kekayaan

sumberdaya mineral kita sehingga dapat mencapai konservasi mineral, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan peran rakyat dalam usaha pertambangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional kita.

Direktorat Jenderal Pertambangan Umum berupaya secara konsisten mengoptimalkan dampak positif usaha pengembangan pertambangan. Ada tiga kegiatan utama yang ditangani secara khusus untuk maksud tersebut, yaitu Pembentukan Model Pengembangan Wilayah Pertambangan (bekerjasama dengan konsultan Kanada dan Konsultan Nasional), Penyusunan Indikator Kerakyatan pada Perusahaan Pertambangan (bekerjasama dengan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM, serta Pengembangan Pertambangan Skala Kecil (PSK). Ke tiga kegiatan utama ini telah direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, sehingga pada saatnya nanti diharapkan kita dapat menghasilkan suatu gagasan yang lebih jelas, "Bagaimana Perusahaan Pertambangan menjalankan kegiatannya, sehingga diperoleh manfaat optimalnya oleh seluruh pihak, baik masyarakat sekitarnya maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan".

Oleh karena itu kami menyampaikan beberapa hal yang perlu kiranya mendapat perhatian pada lokakarya ini untuk dikaji lebih mendalam guna membantu pencapaian maksud di atas, yaitu:

- Pemerintah, masyarakat dan perusahaan sependapat bahwa pengembangan pertambangan harus memberi dampak positif yang seoptimal mungkin bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu dasar saling menguntungkan (*win-win situation*) harus dipegang teguh oleh seluruh pihak.

- Seluruh pihak perlu disadarkan bahwa partisipasi perusahaan pertambangan dalam pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah adalah merupakan investasi yang besar, sehingga harus diarahkan secara terpadu dengan kepentingan seluruh pihak. Dengan demikian dampaknya tidak menambah kesenjangan sosial, tetapi harus meningkatkan kesejahteraan rak-

yat melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

- Pengembangan masyarakat sekitar wilayah pertambangan maupun pengembangan wilayah bukanlah hanya tanggung jawab subsektor pertambangan umum, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh sektor ekonomi, masyarakat dan pemerintah. Perusahaan pertambangan diharapkan sebagai fasilitator bukan sebagai "Santa Clauss". Oleh karena itu mutlak adanya keterlibatan seluruh pihak guna menjamin keterpaduan seluruh kegiatan pelaku ekonomi, masyarakat setempat dan pemerintah.

- Indonesia mempunyai kekayaan sosial-budaya yang beraneka ragam, letak geografis serta potensi yang berbeda pula. Oleh karena itu indikator kerakyatan dan model pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pertambangan akan sangat tergantung kepada keragaman tersebut, sehingga kemungkinan jalan keluar "implementatif" akan lebih baik daripada jalan keluar "teoritis", dan dalam batas tertentu akan berbeda pula pola pengembangan satu wilayah dengan wilayah lainnya.

- Indikator Sumberdaya Manusia (SDM) merupakan faktor utama untuk mencapai harmonisasi upaya mengoptimalkan manfaat pengembangan pertambangan, karena dengan meningkatnya kualitas SDM, khususnya di daerah sekitar wilayah pertambangan, segala kendala teknis, sosial-budaya yang timbul akan lebih mudah untuk diatasi.

Para hadirin dan para peserta lokakarya yang saya hormati

Ijinkanlah saya sebelum mengakhiri sambutan ini, mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berupaya dengan tulus sehingga terselenggaranya lokakarya ini. Kami mengharapkan agar dari lokakarya ini dapat diperoleh masukan-masukan yang positif guna menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan strategis baik me-nyangkut teknis maupun nonteknis dalam subsektor

pertambangan umum, sehingga manfaat sumberdaya mineral nasional kita mencapai titik yang optimal untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, laju pertumbuhan perekonomian nasional kita.

Kepada seluruh peserta lokakarya saya ucapkan selama bekerja dan semoga tetap sehat walafiat untuk dapat mengikuti lokakarya ini dengan baik.

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wataalla, dengan ini secara resmi saya buka lokakarya "Mencari Model Pemecahan Masalah Hubungan antara Industri Pertambangan dengan Masyarakat Sekitar".

Wassalamualaikum w.w.

Yogyakarta, 24 September 1997

Dr. Adjat Sudrajat

SEJARAH MUNCULNYA PEMIKIRAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG BERORENTASI KERAKYATAN

Roziq B. Soetjipto
Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral

1. Latar Belakang

Sejak sekian lama, khususnya sejak awal Orde Baru, pola pikir dalam penetapan kebijaksanaan pertambangan selalu berorientasi pada pengembangan sektor sebagai industri pendukung pembangunan. Parameter-parameter yang digunakan sebagai tolok ukur umumnya selalu berkisar pada besaran-besaran investasi, penerimaan negara, volume dan nilai ekspor atau devisa yang dihasilkan, dan sumbangan sektor ini terhadap PDB nasional. Hal ini dapat dipahami mengingat fokus perhatian kita selalu ditujukan pada pembangunan nasional yang dimanifestasikan dengan pencapaian target-target pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu perhatian pemerintah lebih terfokus pada upaya-upaya untuk menumbuhkan investasi pertambangan berskala menengah dan besar.

Barulah pada awal PJP II, ketika Departemen Pertambangan dan Energi (DPE), Khususnya Direktorat Jenderal Pertambangan Umum (DJPU) melakukan kilas balik 50 tahun pertambangan umum (sejak kemerdekaan) dan mencoba merumuskan wawasan 25 tahun ke depan, disadari adanya aspek-aspek lain yang selama ini kurang mendapat perhatian dan penanganan yang memadai. Timbul pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan masalah keterlibatan dan peran serta nasional, khususnya "rakyat", masyarakat golongan ekonomi lemah, dalam kegiatan pertambangan, serta manfaat apa yang mereka nikmati dari sektor ini.

Memang dalam undang-undang dan peraturan pertambangan, baik secara tersurat maupun tersirat, ada ketentuan-ketentuan yang memberi ruang gerak bagi "Pertambangan Rakyat" dan pertambangan berskala kecil (koperasi, SIPD). Upaya-upaya untuk mendorong perkembangan pertambangan semacam ini pun telah dilakukan, baik melalui penyuluhan dan bimbingan, maupun program-program yang tercakup dalam proyek PSK (Pertambangan Skala Kecil), namun pada kenyataannya masih sangat terbatas. Demikian pula dalam perijinan dan kontrak-kontrak pengusahaan pertambangan berskala sedang/besar tercantum kewajiban agar perusahaan berperanserta dalam pengembangan masyarakat dan wilayah setempat, tetapi pada umumnya tidak terdefinisi secara jelas.

Kenyataan di atas kemudian melahirkan pemikiran untuk melakukan pengkajian secara lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut. Hasilnya diharapkan akan dapat dirumuskan menjadi program-program terpadu untuk meningkatkan peran serta "rakyat' dan mengoptimalkan manfaat pengusahaan pertambangan bagi pengembangan wilayah dan masyarakat. Keinginan tersebut kemu-dian semakin diperkuat oleh perkembangan yang terjadi di kala-ngan masyarakat, antara lain kritik-kritik yang tertuju pada kebijak-sanaan pengusahaan pertambangan kita, serta didorong pula oleh terjadinya kasus-kasus pergolakan di kalangan suku-suku di wilayah operasi PT. Freeport Indonesia (PTFI), dan keributan yang ditim-bulkan oleh masyarakat di beberapa tambang di Kalimantan dan lain-lain.

Atas dasar hal-hal tersebut ditelusuri perkembangan pertambangan di Indonesia khususnya pengkajian falsafah dan peraturan perundangannya, dengan tinjauan yang tidak hanya terbatas pada aspek tekno-ekonomi, melainkan mencakup pula aspek sosial-budaya masyarakat, dengan maksud menentukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar di masa mendatang industri pertambangan lebih berorientasi "kerakyatan".

2. Perkembangan Pola Pikir Kebijaksanaan Pertambangan

2.1. Kondisi Pertambangan Sebelum Kemerdekaan R.I.

Menurut catatan sejarah, pertambangan di wilayah Indonesia telah dikenal dan dikembangkan sejak terbuktinya perdagangan dengan bangsa-bangsa lain beberapa abad yang lalu. Misalnya emas dan perak sudah menjadi komoditi perdagangan yang menarik perhatian bagi pedagang Cina dan Hindu, bahkan tertulis dalam salah satu naskah Sansekerta bahwa Sumatera (Andalas) disebut-sebut sebagai pulau emas karena kaya akan emas dan perak. De-mikian pula bijih timah dari P. Bangka sudah dikenal sejak dahulu kala. Catatan tertulis diketahui bahwa pada tahun 1709 Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) sudah meng-adakan perjanjian pembelian timah dengan Sultan Palembang.

Pada jaman tersebut jelas belum dikenal adanya tambang modern dengan memakai teknologi peralatan berat seperti sekarang melainkan hasil penggalian masyarakat setempat atau "Pertambangan Rakyat" dengan cara tradisional seperti dengan mendulang di sungai-sungai dan penggalian-penggalian sederhana. Dapat dipahami bahwa saat itu baru bijih emas, perak dan timah yang dapat ditambang karena bijih-bijih tersebut terdapat dipermukaan dan bersifat lepas mudah dipisahkan dari kotorannya. Dengan demikian sebetulnya istilah "Pertambangan Rakyat" bukan barang baru, akan tetapi telah dikenal sejak jaman dahulu kala, ratusan tahun yang lalu. Pengertian "Rakyat" disini adalah penduduk setempat yang statuds sosialnya masih tergolong rendah.

Semakin hari wilayah Indonesia semakin dikenal sebagai negeri yang kaya bahan tambang, oleh sebab itu semakin banyak pula pendatang yang mencari komoditi tambang, sehingga pencarian terhadap biji lainnya seperti tembaga, bauksit, nikel, batubara, timbal, seng termasuk minyak bumi dan lain-lain terus berkembang. Melihat perkembangan tersebut maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1899 membuat ketentuan pengusahaan pertama (*Indische Mijnwet*) yang mengatur kegiatan pertambangan mulai dari penyelidikan umum sampai eksploitasi oleh badan

usaha pemerintah dan swasta serta perorangan termasuk "Pertambangan Rakyat". Menurut catatan pada akhir tahun 1938 terdapat 437 hak konsesi dan izin ekploitasi pertambangan untuk semua jenis bahan galian, yang sebagaian besar dimiliki swasta.

Bentuk pengusahaan yang diadakan menurut skala kemampuan teknis dan investasi tersebut pada dasarnya dilandasi oleh faktor-faktor keekonomian endapan bahan galian yang berbeda-beda dari satu lokasi dengan lokasi lain, dari satu jenis dengan yang lain. Demikian pula bentuk, besar dan kualitas cadangan, sangat beragam. Ada yang sulit ditambang karena dalam, jauh dari permukaan bumi, komposisi kimianya rumit, batuannya keras (bijih primer) dan ada juga yang mudah ditambang karena terdapat dipermukaan (sungai atau tersingkap), bijihnya lepas (bijih sekunder) mudah dicuci dan langsung dapat dijual.

Ditinjau dari status kepedulian bahan galian, menurut sejarah pula bahwa jaman kerajaan-kerajaan berdiri di Nusantara, seluruh kekayaan alam termasuk bahan tambang adalah milik negara, yang dalam hal ini adalah raja/sultan. Oleh sebab itu untuk setiap perolehan dari hasil pertanian dan pertambangan dikenai semacam pajak yang dikenal dengan "upeti". Pada jaman penjajahan Hindia Belanda hal ini tetap dipertahankan, sehingga masyarakat setempat tidak terlepas dari kewajiban membayar "upeti" (pajak).

Di lain pihak masyarakat yang tergabung dalam kelompok adat dan secara turun temurun berada di wilayah tertentu, menganggap bahwa semua kekayaan alam (hutan, batuan, air, dan lain sebagainya) yang terdapat di wilayahnya adalah milik kolektip adat, dan kepala sukulah yang mempunyai wewenang mengaturnya bagi kepentingan kelompoknya. Karena perbedaan persepsi terhadap kepemilikan ini sering terjadi perselisihan antara aparat pemerintah (penguasa setempat) dengan rakyat dan para pengusaha yang mendapat izin dari pemerintah.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), perkembangan pertambangan lebih tidak terkendali karena pada masa itu semua kegiatan pertambangan ditujukan untuk kepentingan perang, tanpa suatu dasar kebijaksanaan atau hukum yang jelas.

2.2. Perkembangan Pertambangan Setelah Kemerdekaan R.I. sampai tahun 1965

Untuk menghindari dualisme kepemilikan atas kekayaan alam nasional, termasuk bahan galian, maka setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1845, dalam UUD-1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 dinyatakan sbb.:

Pasal 33 Ayat (2) :

> Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup oraang banyak dikuasai oleh negara.

Pasal 33 ayat (3)

> Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan pernyataan di atas maka jelas status kepemilikan bahan galian di Indonesia menganut sistem kepemilikan kolektif secara nasional dan tidak menganut prinsip kepemilikan individual seperti pada masyarakat leberal. Di lain pihak negara masih mengakui hak milik atas tanah/lahan baik secara adat maupun perorangan, namun terbatas pada bagian permukaan saja di mana lahan/tanah tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam.

Walaupun status kepemilikan bahan galian telah jelas menjadi milik nasional, namun bentuk pengusahaan dalam periode ini belum diatur secara resmi dengan suatu undang-undang. Peraturan yang dipakai masih tetap "Indische Mijnwet" (buatan tahun 1899 yang disempurnakan tahun 1907 dan baru efektif pada tahun

1910). Pada saat itu kebanyakan usaha pertambangan dilakukan oleh perusahaan asing, oleh sebab itu diusulkan pembuatan rancangan UU baru pengganti Undang-Undang Belanda yang diawali dengan mosi oleh Teuku Mohamad Hasan dan kawan-kawan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1951. Akan tetapi karena si-tuasi politik di dalam negeri masih terus bergolak di mana sistem pemerintahan selalu diguncang perselisihan, maka penataan dan penertiban hukum untuk keperluan jangka panjang tersebut sama sekali tidak bisa dilaksanakan.

Baru pada tahun 1960, dapat diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 35/1960 tentang Pertambangan dan Perpu No. 44/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Semula diharapkan bahwa dengan terbitnya Perpu No.37 tahun 1960, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di Indo-nesia akan segera meningkat, ternyata harapan itu tidak terpenuhi. Hal itu disebabkan tidak cukup tersedianya modal nasional, sedangkan modal swasta asing tidak tertarik masuk ke Indonesia karena kurangnya jaminan keamanan (kondisi politik) dan kurangnya informasi potensi geologi sumber daya mineral. Di samping itu, pola kebijaksanaan ekonomi terpimpin terasa sangat mempersempit ruang gerak usaha swasta pada umumnya. Suasana politik juga terus memanas dan menentang eterlibatan negara-negara Barat dalam ekonomi yang justru memiliki cukup modal untuk investasi di bidang pertambangan.

Iklim ekonomi yang terus memburuk dan pertentangan-pertentangan politik di dalam negeri yang semakin meruncing, sama sekali tidak menunjang usaha pembangunan. Akhirnya, pertum-buhan ekonomi nasional terhenti, pembangunan macet dan kemelut perkembangan politik meledak dengan peristiwa pembrontakan G30S/PKI pada akhir 1965 yang disusul dengan lahirnya Pemerintah Orde Baru pada awal tahun 1966.

Dari uraian di atas maka secara ringkas perkembangan keadaan dan kebijaksanaan bidang pertambangan selama kurun

waktu 1950-1965 tidak berhasil menciptakan iklim yang diperlukan untuk menarik investasi baru. Sejak permulaan tahun 1960-an, keadaan perusahaan-perusahaan pertambangan milik negara mengalami ke-munduran apalagi swasta nasional dan "Pertambangan Rakyat". Pada tahun 1965/1966, bersamaan dengan pergolakan politik masa perubahan dari Pemerintah Orde Lama ke Orde Baru, kegiatan usaha pertambangan di Indonesia umumnya mencapai titik perkembangan terendah dalam sejarah.

2.3. Masa Penataan Kebijaksanaan Pertambangan dan Pengembangan Industri Pertambangan pada Masa Orde Baru

Seperti dapat dilihat dari catatan sejarah Gambar 1, setelah terjadinya peristiwa pengkhianatan G30S/PKI pada tahun 1965, lahirlah Pemerintah Orde Baru yang dimulai dengan terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Sejak saat ini seluruh tatatan politik bernegara dan bermasyarakat kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Babak baru dalam perkembangan ekonomi nasional dimulai dengan keluarnya Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang memberikan kesempatan luas kepada modal swasta untuk turut mengembangkan perekonomian nasional. Ketetapan MPRS tersebut antara lain memuat pernyataan bahwa :

- Kekayaan potensial yang terdapat dalam alam Indonesia perlu digali dan diolah agar dijadikan kekuatan ekonomi riil (bab II, pasal 8);
- Potensi modal teknologi dan keahlian dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan Indonesia (Bab II pasal 10); dan
- Dengan mengingat terbatasnya persediaan moda di dalam negeri, maka guna dapat memanfaatkan modal dari luar negeri perlu segera ditetapkan undang-undang mengenai (penanaman) modal asing dan modal domestik (Bab VII, pasal 62)

Sejalan dengan yang telah digariskan dalam Ketetapan MPRS tersebut, tidak lama kemudian diundangkan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang pada pasal 8 undang-undang ini menyebutkan bahwa: Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan pemerintah atas dasar Kontrak Karya atau bentul lain, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu isi Perpu No. 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan banyak yang tidak sesuai lagi dengan kebijaksanaan ekonomi baru ini. Karenanya diterbitkan undang-undang pertambangan baru yang selanjutnya kita kenal sebagai Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969. Dengan Undang-Undang ini swasta nasional diberikan kesempatan untuk ikut serta mengembangkan usaha pertambangan. Selain itu modal asing dalam bidang usaha pertambangan menurut Undang-undang yang baru ini tersirat dalam pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan;

2. Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri;

3. Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan A sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 undang-undang ini dan atau yang perjanjian kerjanya berbentuk penanaman modal asing.

Terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan tersebut segera diikuti oleh undangan kepada para investor asing yang dikeluarkan oleh Departemen Pertambangan untuk melaksanakan pengembangan potensi cadangan timah (1966) dan nikel (1967), dan kemudian undangan untuk eksplorasi mineral secara umum (1968) dan batubara (1981) di berbagai bagian kepulauan Indonesia. Sejak itu lahirlah Kontrak Karya (KK) dan Kontrak Kerja Sama Batubara (KKS) bagi swasta asing dan nasional di samping Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan kepada pihak Swasta Nasional dan Koperasi serta "Pertambangan Rakyat" yang tetap dilindungi keberadaannya.

Dalam tahun 1980 ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1964. Pengaturan kembali penggolongan bahan-bahan gtalian ini dengan penggolongan baru didasarkan pada tempatnya suatu bahan galian di alam, penggunaannya sebagai bahan industri, nilai strategis dan atau ekonomis bagi negara dan pemerintaaan kesempatan berusaha serta penyebaran pembangunan pertambangan di seluruh Indonesia, khususnya dalam rangka meningkatkan kegairahan pembangunan daerah. Dengan penggolongan bahan galian baru ini jumlah bahan galian golongan C menjadi bertambah banyak.

Mengingat semakin berkembangnya usaha pertambangan bahan galian golongan C dan dalam rangka peningkatan, pengembangan, dan pemerataan pembangunan daerah serta guna mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan dinamis, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, sehingga urusan pertambangan bahan galian golongan C menjadi urusan rumah tangga daerah.

Dalam bidang kegiatan "Pertambangan Rakyat", yaitu usaha pertambangan tradisional, kecil-kecilan yang dilakukan dengan cara sederhana oleh rakyat setempat, pengelolaannya juga menjadi

wewenang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dalam pembinaan dan pengawasannya menjadi tugas Pemerintah Daerah. Secara umum kegiatan "pertambangan Rakyat" yang dimaksud dalam UU No. 11/1967, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pola yang tercantum dalam "*Indische Mijnwet*" yaitu pemerintah memberikan hak kepada masyarakat setempat yang secara tradisional melakukan penggalian bahan galian yang telah menjadi mata pencaharian mereka sehari-hari.

Sejak periode inilah maka dalam sektor pertambangan dikenal sektor modern (BUMN, swasta asing dan nasional) dan sektor tradisional (koperasi dan tambang skala kecil/tambang rakyat) yang masing-masing mengusahakan bahan galian di suatu wilayah atas dasar kriteria keekonomiannya. Umumnya sektor modern mengusahakan endapan skala menengah dan besar, sedangkan sektor tradisional memanfaatkan endapan skala kecil atau menurut ukuran tingkat keekonomian dikenal dengan "endapan marginal" yang tidak menguntungkan ditambang secara modern/skala besar (Gambar 2).

Selanjutnya sejalan dengan dimulainya pembangunan nasional yang terencana pada tahun 1969 untuk jangka lima tahunan (REPELITA) dan jangka panjang 25 gtahunan (PJP), kebijaksanaan sektor pertambangan telah ditetapkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Selain itu sejak tahun 1980-an telah diterbitkan beberapa peraturan mengenai perpajakan antara lain UU No. 6 tahun 1983 yang diubah dengan UU No. 9 tahun 1994 dan UU No. 7 Tahun 1983 yang diulang dengan UU No. 10 Tahun 1994.

Demikian pula kebijaksanaan dalam kepemilikan saham dalam perusahaan PMA yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 17/1992 telah diubah dengan PP No. 50/1993 dan akhirnya disempurnakan lagi dengan PP No. 20/1994. Di bidang batubara telah dilakukan pula beberapa kali penyempurnaan yaitu setelah terbitnya Keppres No. 49/1981, diperbaiki dengan Keppres No. 21/1993 dan terakhir dengan Keppres No. 75/1996. Pada

dasarnya penyempurnaan peraturan bidang batubara ini menyangkut bagi hasil produksi yang semula berupa "in kind" diganti menjadi "*in cash*" dan sebagai principal yang semula Perum Batubara/PT. Tambang Batubara Asam menjadi Pemerintah.

Sebagai gambaran umum dalam GBHN 1993, kebijaksanaan umum sektor pertambangan ditetapkan sebagai berikut:

a) Kekayaan sumberdaya alam tambang harus dimanfaatkan secara hemat dan optimal demi kesejahteraan rakyat, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri dan meningkatkan ekspor, meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan daerah, serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha;

b) Peningkatan produksi, penganekaragaman hasil tambang, pengelolaan usaha pertambangan secara efektif dan efisien, didukung oleh usaha inventarisasi dan pemetaan serta eksplorasi dan eksploitasi dengan menguasai dan memanfaatkan teknologi yang tepat. Mendorong kegiatan ekonomi dengan prinsip penggunaan lahan berganda dan pola tata ruang nasional;

c) Diselenggarakan secara terpadu dengan pembangunan daerah dan pembangunan berbagai sektor lainnya. Pengetahuan geologi perlu ditingkatkan untuk memperoleh manfaat maksimal dan kemampuan untuk memperkirakan secara tepat bencana alam geologi sehingga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat;

d) Peningkatan produksi dan usaha pemasarannya di dalam negeri dan di luar negeri serta pengolahannya perlu didukung oleh industri pengolahan yang maju agar mampu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan negara;

e) Dengan makin terbatasnya cadangan minyak dan gas bumi serta makin sulitnya menemukan ladang baru, upaya penganekaragaman sumber energi perlu makin ditingkatkan,

terutama batubara, sehingga ketergantungan pada minyak dan gas bumi makin berkurang;

f) "Pertambangan Rakyat" dilindungi, dibimbing, dan ditingkatkan pengelolaannya antara lain melalui pengaturan, penyuluhan, dan pembinaan usaha pertambangan, termasuk usaha koperasi, dalam rangka perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha serta peningkatan pendapatan dan taraf hidup rakyat, khususnya rakyat penambang. Kerjasama "Pertambangan Rakyat" dengan usaha pertambangan negara dan swasta besar perlu didorong agar saling menunjang dan saling memperkuat;

g) Penanaman modal swasta di sektor pertambangan terus didorong dan ditingkatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h) Penguasaan teknologi pertambangan, termasuk teknologi eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang baik di darat maupun di dasar laut, terus ditingkatkan;

i) Penambangan dan pengelolaan bahan galian yang tidak vital dan tidak strategis harus mengikutsertakan rakyat setempat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingmungan hidup;

j) Untuk memelihara fungsi lingkungan upaya reklamasi pasca-tambang perlu dilaksanakan sejak awal sehingga bekas tambang dapat lebih dimanfaatkan.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu pola pikir yang lebih jelas di mana dan bagaimana sebetulnya peran atau posisi "rakyat" dalam pengelolaan sumberdaya mineral. Pola pikir tersebut dapat diuraikan seperti tampak pada Gambar 3 sebagai berikut:

- Menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 semua jenis bahan galian merupakan kekayaan nasional dan oleh sebab itu dikuasai negara dengan tujuan: mengatur karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemak-muran rakyat;

- Menurut UU No. 11/1967, bahan galian yang dikelompokkan menjadi tiga golongan (strategis, vital dan golongan c) dapat diusahakan oleh:

  ⇒ Pemerintah (BUMN/BUMD dan Kuasa Pertambangan);

  ⇒ Swasta Asing (Kontrak Karya)

  ⇒ Swasta Nasional (Kuasa Pertambangan);

  ⇒ Koperasi dan Perorangan (Kuasa Pertambangan);

  ⇒ "Pertambangan Rakyat" (Wilayah "Pertambangan Rakyat) diatur daerah.

- Menurut GBHN 1993, segala bentuk kegiatan pengelolaan sektor pertambangan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan oleh karenanya harus mendukung sektor lain secara terpadu antara lain:

  ⇒ Dilakukan secara hemat dan optimal;

  ⇒ Peningkatan produksi bagi peningkatan negara dan daerah serta industri di dalam negeri;

  ⇒ Menciptakan lapangan kerja dan usaha;

  ⇒ Pembangunan wilayah yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

  ⇒ Meningkatkan peran serta masyarakat setempat;

  ⇒ Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap "Pertambangan Rakyat".

Peran masyarakat setempat atau yang dikenal dan diartikan secara umum dengan istilah "rakyat", dalam kebijaksanaan tersebut jelas arahnya, yaitu mempunyai dua cara:

- Dapat berperan langsung sebagai penambang bahan galian melalui kegiatan "Pertambangan Rakyat" yang diatur oleh

daerah bagi semua jenis bahan galian atau Koperasi yang diatur melalui penerbitan Kuasa Pertambangan (KP);

- Juga dapat berperan tidak langsung melalui penyediaan berbagai keperluan untuk menunjang kegiatan pertambangan skala menengah ke atas dan sekaligus dapat pula sebagai pekerja pada perusahaan tersebut.

Peran Perusahaan menengah ke atas baik asing maupun nasional sebagai pelaksana pengusaha bahan galian atas nama negara baik melalui pola Kontrak Karya maupun Kuasa Pertambangan, juga jelas hak dan kewajibannya dalam membantu pembangunan nasional dan daerah dengan cara:

- Membayar pajak, royalti bagi hasil produksi, PBB, *dead rent* dan pungutan lain yang ditetapkan Perda setempat yang seluruhnya menjadi penerimaan negara dari pajak dan non pajak bagi pembangunan nasional;

- Membiayai pengembangan masyarakat (*local community devel-opment*) dengan menyediakan alokasi anggaran baik sebagai biaya operasi atau menyisihkan dari keuntungan.

Peran pemerintah pusat dan daerah pun sudah jelas yaitu mengatur, membina dan mengawasi semua kegiatan pertambangan dan pemanfaatan hasilnya bagi keperluan pembangunan nasional (pusat) dan pembangunan wilayah (daerah) antara lain:

- Mengatur dan mengawasi dana untuk pembangunan nasional dari pajak sebagian kecil royalti (20%) dan bagi hasil;

- Mengatur dan mengawasi dana untuk pembangunan daerah dari pajak dan sebagian besar royalti (80%) serta pungutan lain oleh daerah;

- Melakukan bimbingan dan pembinaan teknis dan manajemen mulai dari eksplorasi sampai kepada eksploitasi dan pasca tambang kepada koperasi dan tambang rakyat;

- Mengatur dan mengawasi pengusahaan semua jenis sumberdaya mineral sesuai dengan skala kemampuan teknis dan finansial serta pertimbangan kepentingan nasional (POLEKSOSBUD dan HANKAM) bagi perusahaan BUMN, swasta nasional dan asing melalui Kuasa Pertambangan (KP) atau Kontrak Karya/Kontrak Karya Batubara (KK/KKB).

3. Kebijaksanaan Masa Depan

3.1. Isu-isu mutakhir

Apa yang terjadi dalam periode memasuki PJP II, ternyata dalam perjalanan waktu sejak 1945 sampai sekarang kebijaksanaan seperti diuraikan di atas tidak sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat luas. Isu-isu yang mencuat ke permukaan antara lain:

- Semakin merajalelanya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang di-lakukan kelompok masyarakat;
- "Pertambangan Rakyat" semakin terpojok dan wilayahnya semakin sempit terdesak KP dan KK, walaupun telah dimodifikasi dengan pola pertambangan skala kecil (KK);
- Pembangunan wilayah tidak sesuai dengan harapan masyarakat setempat;
- Perusahaan menengah dan besar cenderung menjadi tumpuan yang berlebihan sehingga di daerah dianggap sebagai sumber harapan bagi pembangunan daerah di lain pihak terbentuk "enclave" yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial;
- Pihak LSM mempertanyakan masalah lingkungan yang tidak terkendali baik perusahaan besar, menengah maupun kecil, sebagian besar tidak mampu menata wilayah sesuai dengan ketentuan lingkungan yang berlaku;

- Status kepemilikan bahan galian dipertanyakan kembali, apakah masyarakat setempat berhak atas "saham" perusahaan, kalau ya berapa nilainya dan bagaimana mekanismenya.

- Kontribusi perusahaan besar dan menengah perlu secara jelas diatur dalam peningkatan kesejahteraan rakyat setempat apakah dari alokasi biaya operasi atau menyisihkan dari sebagian kecil keuntungan;

- Pengetahuan informasi geologi dan potensi sumberdaya mineral yang dikuasai pemerintah tidak selengkap data yang dimiliki perusahaan, sehingga pemerintah tidak mempunyai "bargaining power" yang menentukan dalam penetapan royalti, bagi hasil atau pajak;

- Beberapa pihak kemudian masih mempertanyakan apakah investasi asing (PMA) masih diperlukan dan mengapa BUMN kita masih rendah kemampuannya?

  Masalah daya saing menghadapi era globalisasi terutama untuk mempercepat proses industrialisasi di dalam negeri melalui peningkatan pemanfaatan teknologi yang tepat guna;

- Masalah pendanaan yang karena alasan resiko tinggi dan "slow yielding", tidak ada bank yang berminat membantu dana kegiatan eksplorasi bahan galian. Upaya untuk memanfaatkan dana dari pasar modal masih dalam proses penjajagan;

- Masalah teknis terutama pada pengembangan sistem informasi, ternyata masalah peta dasar nasional yang bisa digunakan semua sektor masih belum dimiliki, terutama peta dasar skala yang lebih kecil untuk perencanaan pengelolaan sumberdaya mineral dan tata ruang nasional.

3.2. Kebijaksanaan Masa Depan

Hal-hal yang harus dikaji dan dijabarkan dalam peninjauan kembali kebijaksanaan sumberdaya mineral antara lain:

1. Perlu pencerminan yang lebih jelas ata penerjemahan falsafah yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 33 dalam kebijaksanaan mineral di masa mendatang, agar tidak timbul berbagai macam interpretasi di kalangan masyarakat, khususnya mengenai pengertian penguasaan oleh negara dan pemanfaatan sumberdaya mineral;

2. Peraturan perundangan tentang pengusaaan pertambangan harus mengakomodasikan kepentingan-kepentingan sektor modern dan sektor tradisional secara proposional, khususnya dalam hal pengawasan, bimbingan dan pembinaan, serta aspek komersialnya;

3. Pengaturan kelembagaan di pusat dan daerah yang mencakup tugas dan tanggung jawab serta koordinasi antar lembaga-lembaga yang terkait secara langsung dan tak langsung dengan pengembangan sumberdaya mineral;

4. Peranan pemerintah dalam penyediaan dan pemasyarakatan data dan informasi geologi harus diatur sehubungan dengan jenis dan kegunaannya, serta jenis dan ciri masyarakat penggunanya;

5. Perlu kejelasan dalam pembagian antara pusat dan daerah mengenai tugas, tanggung jawab dan kewenangan serta pemanfaatan penerimaan negara;

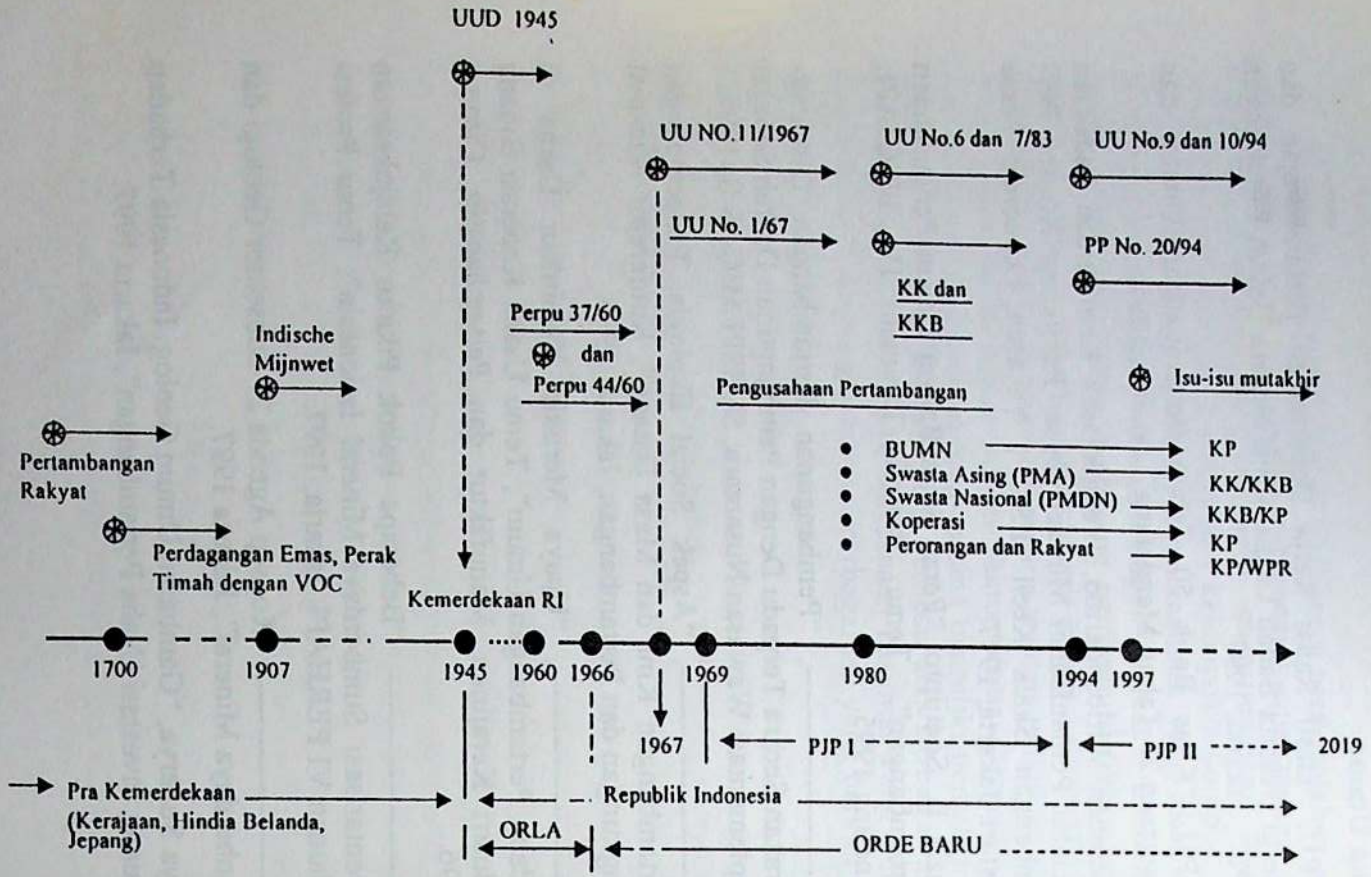
6. Perlu pengaturan mengenai peranserta pengusaha pertambangan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wilayah di tempat mereka beroperasi dikaitkan dengan kebijaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (pusat/daerah), dengan memperhatikan aspek sosial-budaya setempat.

4. Penutup

Menyadari akan luas dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi jelas bahwa pemikiran mengenai kebijaksanaan pertambangan/sumberdaya mineral perlu mensinergikan masukan-masukan dari berbagai institusi dan kelompok-kelompok masyarakat yang langsung berkepentingan maupun yang akan terkena dampaknya. Meskipun pengembangan industri pertambangan sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipungkiri, namun harmonisasi antara sektor ini dengan kepentingan pengembangan masyarakat dan wilayah setempat harus tetap diperhitungkan sebagai faktor utama. Dengan masukan dari berbagai piahkyang masing-masing memiliki pemahaman dan kepekaan serta kepentingan yang berbeda atas berbagai aspek di atas, diharapkan rumusan kebijaksanaan nasional yang dihasilkan dapat secara bulat mengantisipasi berbagai isu yang berkait dengan sektor mineral.

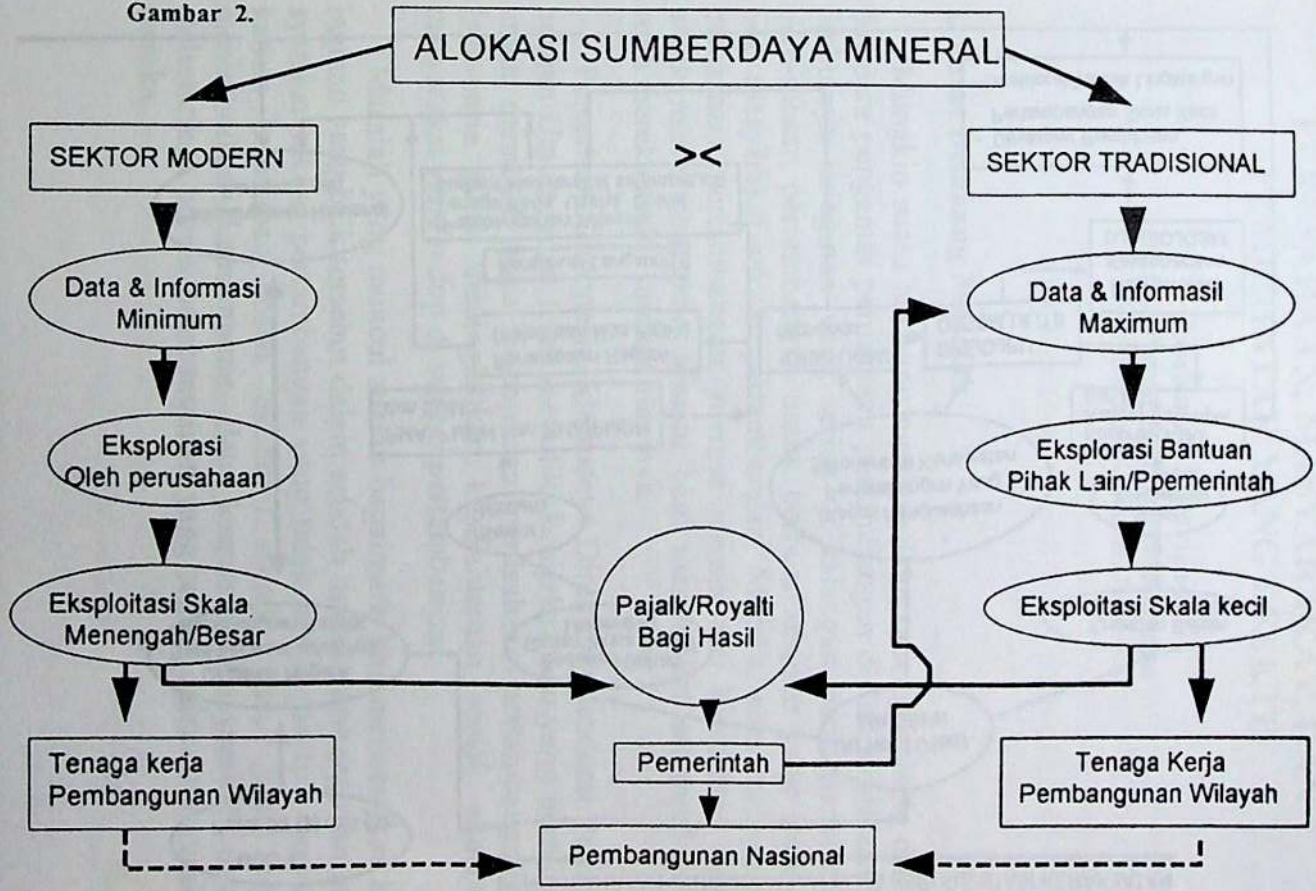
Pustaka Utama

1. DJPU, "Hasil Rapat Kerja Departemen Pertambangan dan Energi Beserta Badan Usaha Milik Negara Dalam Lingkungan DPE", Jakarta, 1997.
2. DJPU, "Kilas Balik 50 Tahun Pertambangan Umum dan Wawasan 25 Tahun Mendatang", Jakarta, 1995.
3. Rachman Wiriosudarmo, "Pengentasan Kemiskinan Pedesaan Melalui Pemanfaatan Mineral, Dasar Pemikiran Konsep Pertambangan Skala Kecil (PSK)", Yayasan Economic Nusa Lestari, Jakarta, 1997.
4. Rozik B. Soetjipto, "Peran Serta Rakyat Dalam Pengusahaan Pertambangan", Temu Profesi Tahunan IV PERHAPI, Bandung 1995.
5. ----------, "Pembangunan Pertambangan Diselenggarakan Secara Terpadu Dengan Pembangunan Daerah Sebagai Implementasi Wawasan Nusantara, SUSSPI MIGAS II, 1996.
6. ----------, "Aspek Social Ekologis, Pengembangan Pertambangan Kini dan Masa Datang", Konferensi Nasional Lingkungan dan Pertambangan, Jakarta, 1996.
7. ----------, "Upaya Merintis Kemitraan Usaha di Bidang Pertambangan Umum", Temu Usaha Koperasi Bidang Industri Kerajinan, Manufaktur dan Pertambangan, Cisarua 1996.
8. ----------, "Beberapa Pokok Pikiran Kebijaksanaan Inventarisasi Sumberdaya Mineral Indonesia", Temu Profesi Tahunan VI PERHAPI, Jakarta, 1997.
9. ----------, "Konsep Agenda 21 Subsektor Geologi dan Sumberdaya Mineral", Jakarta 1997.
10. Yaya Sunarya, "Gambaran Umum Geologi Indonesia Terhadap Peluang Investasi Usaha Pertambangan", Jakarta 1997.

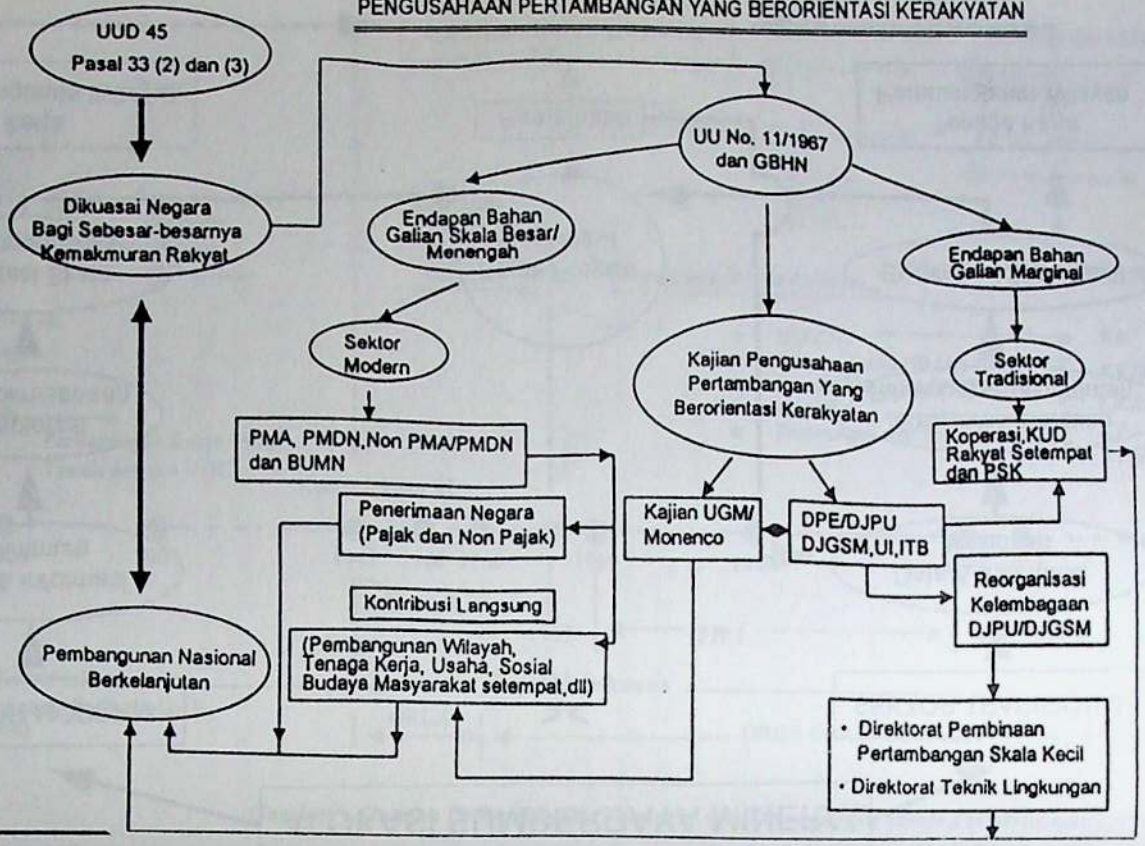


Gambar 1. Catatan Perkembangan Peraturan dan Perundangan Sektor Pertambangan

Gambar 2.


ALOKASI SUMBERDAYA MINERAL
SEKTOR MODERN
><
SEKTOR TRADISIONAL
Data & Informasi Minimum
Eksplorasi Oleh perusahaan
Eksploitasi Skala Menengah/Besar
Data & Informasil Maximum
Eksplorasi Bantuan Pihak Lain/Ppemerintah
Eksploitasi Skala kecil
Pajalk/Royalti Bagi Hasil
Tenaga kerja Pembangunan Wilayah
Pemerintah
Tenaga Kerja Pembangunan Wilayah
Pembangunan Nasional

GAMBAR 3. POLA PIKIR PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG BERORIENTASI KERAKYATAN



BEBERAPA ASPEK SOSIAL GUNA MENCIPTAKAN HUBUNGAN PERUSAHAAN, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH YANG EFEKTIF

Loekman Soetrisno
Kepala Pusat Penelitian Pembangunan
Pedesaan dan Kawasan UGM

1. Latar Belakang Masalah

Mungkin suatu hal yang menimbulkan rasa optimisme dalam diri para pengamat perusahaan pertambangan di Indonesia adalah timbulnya keinginan yang serius di kalangan para manajemen peru-sahaan pertambangan untuk berbuat sesuatu yang berguna bagi masyarakat sekitar pertambangan. Mereka, para manajemen perusahaan pertambangan, merasa mempunyai kewajiban moral untuk menyumbangkan sesuatu bagi masyarakat setempat yang telah mereka ambil sumber alamnya.

Pemerintah Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, juga telah memiliki kebijaksanaan yang bertujuan untuk membuat para manajemen perusahaan pertambangan di Indo-nesia guna meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar pertambangan.

Masalah yang muncul adalah bagaimana kita menuangkan keinginan yang baik tersebut dalam sebuah model pembangunan masyarakat sekitar pertambangan yang tidak hanya mampu meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi mereka tetapi juga dapat menimbulkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk melestarikan proses pembangunan yang terjadi dalam masyarakat mereka.

Penulis menyadari bahwa mungkin tidak *relevan* untuk berbicara tentang "the model" pembangunan bagi seluruh masyarakat pertambangan yang ada di Indonesia karena adanya kebhinekaan masalah dan latar belakang sosial-budaya di antara masyarakat pertambangan tersebut.

Menyadari hal tersebut, dalam makalah ini penulis tidak akan bicara "the model" tetapi lebih banyak menekankan pada aspek-aspek sosial dan politik yang *harus* ada pada setiap upaya dari manajemen perusahaan pertambangan yang bersama penduduk mengembangkan masyarakat sekitar pertambangan.

2. *Affirmative Action* dan Pengembangan Masyarakat

Lingkungan sosiologis yang mengelilingi perusahaan pertambangan di Indonesia sangat khas apabila dibandingkan dengan lingkungan sosiologis dari perusahaan lainnya. Kekhasan lingkungan sosiologis perusahaan pertambangan terletak pada kenyataan bahwa pertama perusahaan pertambangan beroperasi di wilayah yang sangat terpencil. Kawasan ini biasanya dihuni oleh penduduk asli yang karena tempat tinggal mereka yang terpencil maka mereka mengalami ketertinggalan dalam hampir semua aspek kehidupan mereka. Kekhasan kedua dari lingkungan sosiologi dari perusahaan pertambangan adalah bahwa eksistensi mereka dalam suatu wilayah menjadi daya tarik bagi datangnya berbagai suku yang ingin *memanfaatkan* keberadaan perusahaan pertambangan untuk mencari nafkah. Di sini masalah mulai muncul.

Masalah tersebut berupa *persaingan* antara penduduk asli melawan pendatang yang memiliki ketrampilan yang melebihi penduduk asli. Kompetisi antar mereka menjadi tidak seimbang yang me-ngakibatkan tersingkirnya penduduk asli. Kekalahan mereka dalam bersaing kemudian dimanifestasikan dalam tindakan yang anti perusahaan. Penduduk asli merasa bahwa keberadaan

perusahaan pertambangan yang telah memanfaatkan lahan mereka, tidak memberikan manfaat bagi mereka.

Tanpa suatu perlindungan tidak mungkin penduduk asli dapat memenangkan persaingan yang tak seimbang itu. Di sinilah kebijaksanaan *affirmative action* perlu dilakukan oleh perusahaan pertambangan sebagai *dasar* dari program *community development* mereka. Kebijaksanaan affirmative action itu dapat dilakukan dengan cara menentukan bahwa jenis pekerjaan tertentu hanya terbuka bagi penduduk asli. Dalam pelaksanaan *affirmative action* ini perusahaan perlu secara transparan juga merencanakan *jenjang* karier dari mereka yang terkena kebijaksanaan tersebut beserta program-program pelatihan yang dapat membantu penduduk asli meniti jenjang itu.

Affirmative action dapat pula diberikan perusahaan dalam bentuk kontrak-kontrak kepada perusahaan penduduk asli untuk mengerjakan pekerjaan yang sederhana.

Kebijaksanaan *affirmative action* akan menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap perusahaan. Karena ada keterkaitan antara kepentingan pribadi mereka dengan eksistensi perusahaan diharapkan dengan demikian mereka memiliki kepedulian pada kelestarian perusahaan.

Dengan kata lain kebijaksanaan affirmative action adalah pintu masuk untuk membuka "*hati dan pikiran*" dari masyarakat sekitar pertambangan untuk mendukung keberadaan pertambangan dan selanjutnya mau *mendukung* upaya-upaya pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

3. *Gender Based Community Development*

Dari hasil pengamatan penulis terhadap masyarakat sekitar pertambangan, peran wanita dalam berbagai kegiatan ekonomi sangat menonjol. Para wanita suku-suku Komoro, Amungme dan Dayak, memiliki peran yang sangat menonjol. Meskipun peran

mereka sangat penting, belum banyak program-program *community development* yang khusus ditujukan untuk lebih meningkatkan peranan mereka dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat. Bahkan sering program pengembangan peranan wanita dalam pembangunan tersaingi dengan program-program nasional yang lebih memiliki tujuan pembangunan makro dari pada pengembangan kepentingan *kelompok* wanita. Kegiatan ekonomi kelompok wanita Komoro dan Amungme yang sudah mulai berkembang mengalami kemacetan karena muncul peraturan pemerintah setempat yang menghambat perkembangan kegiatan mereka. Masalahnya dengan demikian terletak pada kurang sensitifnya para perencana pembangunan setempat terhadap pembangunan yang *berwawasan gender* yang membawa akibat tersendat-sendatnya program pengembangan sosial, ekonomi para wanita. Oleh karena itu disarankan agar para pejabat perusahaan pertambangan yang terlibat dalam perencanaan program-program *community development* untuk mengikuti pelatihan tentang pendekatan gender dalam pembangunan.

4. Peranan Pemerintah Daerah

Banyak perusahaan pertambangan di Indonesia harus beroperasi di wilayah di mana eksistensi pemerintahan daerah dan aparatnya belum mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti terbatasnya ketrampilan para aparatnya, keterbatasan kelengkapan dinas-dinas pelaksana dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini yang sering terjadi adalah perusahaan pertambangan terpaksa mengambil alih peran dari pemerintah daerah dalam hal pembangunan infrastruktur pelayanan untuk masyarakat. Hal seperti ini menguntungkan masyarakat tetapi bagi pihak perusahaan dapat *mendatangkan* berbagai kerugian. Salah satu kerugian itu adalah bahwa masyarakat meletakkan kesejahteraan mereka pada tanggung jawab perusahaan. Akibatnya perusahaan

akan disibukkan oleh berbagai tuntutan yang seharusnya ditujukan pada pemerintah daerah. Hubungan yang ideal antara pemerintah daerah dan perusahaan pertambangan adalah perusahaan pertambangan berfungsi sebagai pendukung pemerintah daerah dalam upaya membangun kawasan sekitar pertambangan, sementara pemerintah daerah memberikan perlindungan politik bagi perusahaan pertambangan.

Untuk mencapai hubungan yang ideal itu maka diperlukan dua hal. *Pertama*, perlu adanya kelengkapan dinas-dinas pendukung pemerintah daerah, kabupaten, dan kecamatan, yang dapat memperlancar baik pelayanan masyarakat maupun perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. *Kedua*, pemerintah seyogyanya memberikan wewenang bagi pemerintah kecamatan di mana sebuah perusahaan pertambangan beroperasi untuk mendirikan sebuah Badan Perencana Pembangunan Kawasan Kecamatan. Badan ini bersama dengan perusahaan pertambangan serta tokoh-tokoh masyarakat seperti wakil gereja serta aparat dinas sektoral yang berada pada tingkat kecamatan untuk menyusun rencana pembangunan untuk wilayah kecamatan. *Ketiga*, agar anggota dari badan itu dapat bekerja dengan efektif mereka perlu memperoleh pelatihan dalam hal perencanaan pembangunan, dan strategi pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang berpengalaman dalam hal ini. Dalam pelatihan ini diharapkan para calon petugas dalam Badan Perencanaan Kabupaten itu akan bertambah sensitivitas mereka terhadap masalah-masalah pembangunan yang ada di wilayahnya dan mampu menyerap aspirasi masyarakat. Ada satu alasan mengapa badan ini perlu dibentuk. Alasan itu adalah karena biasanya perusahaan pertambangan berada di kecamatan dan jauh dari pemerintahan kabupaten. Pemerintah kecamatan juga paling faham dengan kondisi daerah.

5. "Trust" Atau Saling Percaya antara Rakyat Sekitar Pertambangan, Perusahaan Pertambangan, dan Pemerintah Daerah

Suatu hal yang perlu memperoleh perhatian kita semua adalah bahwa model apapun yang akan dikembangkan untuk membangun masyarakat pertambangan *tidak* akan menghasilkan apapun jika tidak tercipta "trust" antara tiga subyek pembangunan yakni pemerintah, masyarakat setempat, dan perusahaan pertambangan. Pembangunan wilayah pertambangan tidak dapat terwujud hanya atas prakarsa satu pihak saja. Pembangunan wilayah pertambangan Timika tidak akan berhasil apabila inisiatif untuk membangun hanya berasal dari pihak PT. Freeport Indonesia tanpa dukungan dari pihak masyarakat dan pemerintah setempat. Demikian pula hal yang sama akan terjadi apabila hanya rakyat dan pemerintah yang ingin pembangunan tetapi tanpa dukungan pemerintah.

Masalah yang muncul adalah bagaimana kita dapat menciptakan "trust" antara ketiga pelaku pembangunan itu. *Pertama,* ketiga pelaku pembangunan wilayah pertambangan harus merasa saling tergantung satu sama lain *atas dasar* persamaan derajat. Bagi perusahaan pertambangan dan pemerintah tidak lagi dibenarkan untuk melihat dan memperlakukan penduduk setempat sebagai obyek dari pembangunan tetapi harus sebagai subyek pembangunan. Bagi manajemen perusahaan pertambangan hal ini berarti harus lebih mengembangkan manajemen yang bersifat *dialogis* dalam mengelola hubungan mereka dengan penduduk setempat. Sebaliknya masyarakat setempat harus pula mau melihat eksistensi perusahaan pertambangan di tengah-tengah masyarakat mereka sebagai kekuatan ekonomi yang dapat mereka manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kerjasama antara keduanya.

Kedua, agar "trust" dapat terjamin forum yang tetap, yang penulis maksud adalah Forum Komunikasi Antara Perusahaan Pertambangan, Masyarakat, dan Pemerintah. Forum ini berfungsi sebagai wadah di mana masing-masing pihak yang terlibat dalam

proses pembangunan wilayah pertambangan untuk mengkomunikasikan serta mendiskusikan rencana dan masalah pembangunan yang ingin mereka lakukan maupun masalah yang mereka hadapi. Setiap keputusan atau konsensus yang diambil dalam Forum ini perlu dikomunikasikan pada masyarakat, aparat perusahaan, dan pemerintahan setempat.

6. Penutup

Membangun masyarakat pertambangan harus merupakan sebuah proses yang didasarkan pada adanya "trust" antara tiga pelaku pembangunan di wilayah tersebut. Untuk menciptakan "trust" setiap pelaku pembangunan harus mengembangkan *budaya dialogis* antara sesama mereka, dan sikap transparan dalam mengelola program dan pemecahan sebuah persoalan. "Trust" juga dapat dikembangkan di kalangan masyarakat, apabila penduduk setempat merasa memperoleh manfaat dengan adanya perusahaan pertambangan sehingga mereka *merasa memiliki* perusahaan itu. Kebijaksanaan *affirmative action* dan kebijaksanaan pembangunan yang berorientasi gender merupakan dasar dari proses penciptaan "trust" antara perusahaan pertambangan dan masyarakat.

Keberadaan pemerintah daerah (baca: kecamatan) yang efektif dan trampil dalam melayani masyarakat dan merencanakan serta melaksanakan pembangunan merupakan faktor yang sangat krusial dalam menciptakan kelancaran proses pembangunan wilayah.

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Irwandy Arif
Partanto Prodjosumarto
Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Mineral
Institut Teknologi Bandung

RINGKASAN

Suatu kegiatan pengusahaan pertambangan yang beroperasi di suatu daerah mempunyai suatu tanggung jawab sosial untuk mewujudkan pembangunan pertambangan yang telah ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Makalah ini membahas masalah-masalah sosial yang dihadapi, tanggung jawab sosial perusahaan, strategi dan program yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

1. Pendahuluan

Dalam Pembangunan Jangka Panjang II, Pembangunan Pertambangan diarahkan untuk menghasilkan bahan tambang sebagai bahan baku industri dalam negeri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah setinggi-tingginya dan menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wilayah, pembangunan daerah, dan peningkatan taraf hidup rakyat.

Perubahan sosial dan budaya yang terjadi pada masyarakat setempat akibat aktivitas pertambangan telah menjadi perhatian sejak beberapa waktu yang lampau. Sejak keluarnya Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup dan disusul dengan peraturan-peraturan terkait lainnya, studi tentang dampak

sosial dan budaya tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin melakukan kegiatan pertambangan.

Pada bulan Oktober 1985, Leon Davis, Managing Director dan CEO dari CRA di depan "Australian Institute of Company Directors" mengidentifikasi suatu kompetensi sosial baru yang harus dimiliki perusahaan tambang untuk era yang akan datang. Selanjutnya juga mengidentifikasikan suatu kelemahan bahwa perusahaan tambang ternyata membayar lebih kepada "hard skills" dari kompetensi teknik, dan gagal menghubungkan kemampuan teknik tersebut dengan masyarakat setempat.

Persoalan yang berdimensi sosialbudaya harus mendapatkan penyelesaian yang sama dengan masalah-masalah teknik. Karena perusahaan pertambangan perlu menyadari bahwa pada akhirnya masalah lingkungan sosial-budaya juga berdampak terhadap keuntungan/keekonomian dari proyek pertambangan.

Perusahaan pertambangan di Indonesia sudah sewajarnya membuat perencanaan penyelesaian masalah sosial-budaya yang akan muncul di daerah operasinya di dalam "rancangan" proses penambangannya.

2. Dari Pandangan Konservatif ke Perspektif Baru

Beroperasinya suatu perusahaan tambang diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Masyarakat setempat bukan sebagai korban pasif dari proyek pertambangan (penggusuran lahan, dampak fisik negatif, dll.), tetapi sebagai potensi yang dapat aktif berperan serta, sehingga dapat membawa peningkatan kapasitasnya untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik. Namun demikian, harus disadari bahwa ada suatu faktor yang sulit di dalam pemecahan persoalan-persoalan sosial-budaya. Faktor ini adalah sifat sains sosialnya yang meliputi subyektivitas, ketidakpastian dan mungkin irrasional. (Ravetz, 1987).

Pernyataan "kami datang untuk mengoperasikan suatu tambang, bukan untuk terlibat di dalam persoalanpersoalan masyarakat setempat, dan bila ada masalah yang muncul, serahkan masalah tersebut kepada Pemerintah", merupakan suatu pernyataan yang tidak dapat lagi dibenarkan.

Bila suatu proyek pertambangan beroperasi di suatu daerah, masyarakat setempat mengharapkan kesempatan dan pelayanan. Harapan tersebut biasanya berlebihan dan tidak realistik, sehingga diperlukan usaha awal yang mendalam untuk menekan harapan ini ke tingkat yang wajar. Harapan yang tinggi ini berasal dari kombinasi cerita dan gunjingan yang menggambarkan kemegahan perusahaan-perusahaan pertambangan besar.

Untuk dapat menjadikan anggota masyarakat setempat sebagai pemain aktif, ternyata ada beberapa faktor yang menghalanginya. Faktor-faktor ini antara lain: tingkat pendidikan yang rendah, kekurangan pengalaman/pelatihan dan jumlah sumberdaya manusia terlatih yang terbatas. Masalah lain adalah tahap pasca 'bulan madu" (tahap konstruksi yang membutuhkan tenaga kerja "*semi skilled and unskilled*" cukup banyak). Ada pula masalah pekerja yang datang dari luar daerah yang akan berinteraksi dengan pekerja setempat.

3. Beberapa Upaya Dan Masalah Sosial

Pada makalah ini akan diberikan contoh upaya yang telah dilakukan dan masalah yang mungkin selalu dihadapi oleh Sektor Pertambangan Modern, yaitu perusahaan asing besar seperti PT. Freeport Indonesia, dan Sektor Pertambangan Tradisional, yaitu Koperasi Mekarjaya yang mengelola suatu tambang emas kecil.

3.1. Sektor Pertambangan Modern: PT. Freeport Indonesia

Perusahaan-perusahaan pada sektor ini secara umum (tentunya tidak semua perusahaan) telah melakukan upaya-upaya yang

hampir sama polanya, yaitu pembangunan sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, peribadatan dan aspek-aspek penunjangnya bekerja sama dengan pemerintah. Hal ini dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuannya dengan bantuan pemerintah bila diperlukan.

Harian Suara Pembaharuan tanggal 18 September 1997 memberitakan pernyataan Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Kepala Bappedal Ir. Sarwono Kusumaatmadja tentang upaya yang telah dilakukan oleh PT.FI sehubungan dengan tanggung jawab sosialnya antara lain menciptakan Departemen Urusan Masyarakat (Community Affairs Department). Dengan seorang putra daerah sebagai pemimpin, departemen ini akan menjadi titik penting untuk membangun masyarakat.

Selain pembangunan masyarakat melalui program Pengembangan Wilayah Mimika Terpadu, di Tembagapura telah dijalankan program umum yang telah disebutkan sebelumnya. Namun beberapa program dalam pelaksanaanya masih mengalami kesulitan.

Selanjutnya Menteri menyatakan bahwa kesenjangan budaya dan ekonomi masih sangat lebar antara penduduk asli dengan para pendatang, pejabat Pemerintah dan pekerja asing di daerah pertambangan PT. Freeport Indonesia (PTFI). Hal tersebut merupakan hasil audit lingkungan sosial PTFI oleh Labat and Anderson yang dilakukan pada akhir tahun 1995 sampai Agustus 1997. Proses pembangunan menyangkut bagaimana tanah, air dan sumber-sumber alam digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan bagaimana penduduk setempat dapat berpartisipasi dalam pembangunan, serta bagaimana hubungan sosial dapat ditingkatkan dalam pusat pertumbuhan yang multietnik.

Konflik sosial yang terjadi di Mimika berkaitan dengan masalah komunikasi antarbudaya, strata sosial, perbedaan-perbedaan etnis, dan sudut pandang hukum. Kenyataan ini akan diperparah dengan pandangan hidup yang begitu berbeda satu dengan yang lain, lemahnya peran Pemerintah, perwakilan dan

partisipasi masyarakat yang tidak memadai, ketidakseimbangan kekuasaan, perubahan yang sangat cepat, kemarahan dari masa lalu, kecurigaan, dan rasa kurang percaya diri di antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil audit lingkungan sosial ini juga menunjukkan perkembangan kemajuan dalam hal kesadaran masyarakat. Mereka pun memiliki suara dan kekuatan untuk membuat perubahan dalam organisasi dan tindakan pemerintah maupun PTFI.

3.2. Sektor Pertambangan Tradisional: Koperasi Mekarjaya

Pada tambang bijih emas di Cineam, Tasikmalaya – Jawa Barat bentuk perijinan untuk kegiatan Pertambangan Skala Kecil (PSK) di daerah Cineam berupa Kuasa Pertambangan yang dipegang oleh Koperasi unit desa (KUD) Mekarjaya. KUD dalam hal ini bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pertambangan Umum (DJPU), terutama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan semua kegiatan penambangan.

Pengelolaan kegiatan penambangan oleh KUD saat ini dinilai kurang baik. Hal ini dapat dimengerti karena KUD tidak memiliki tenaga ahli di bidang pertambangan dan manajemen sehingga bila diuji dari segi hukum, mekanisme hubungan kerja tidak menjamin pelaksanaan hukum, pembagian tugas serta tanggung jawab yang baik.

Apabila dilihat dari kebijakan Pemda mengenai pengembangan wilayah (RUTR), wilayah Cineam merupakan kawasan prioritas untuk sektor pertambangan emas.

Hal-hal yang berbenturan dengan masalah adat istiadat (hukum adat) serta hal-hal yang bersifat pantangan/tabu dalam pemanfaatan lahan dan pengolahan kekayaan alam, di daerah ini tidak terjadi. Salah satu faktor yang mempunyai potensi perbenturan kegiatan penambangan oleh rakyat adalah antara kawasan PSK emas yang diasuh oleh DJPU dan kawasan SIPR

emas yang dibina oleh Pemerintahan Daerah melalui Dinas Pertambangan.

Bagi penduduk di sekitar lokasi, keberadaan pertambangan emas di Desa Karanglayung ternyata cukup memberikan andil bagi peningkatan kesejahteraannya. Bagi penduduk yang langsung terjun sebagai petambang, keuntungan diperoleh dari penghasilan sebagai petambang. Bagi penduduk lainnya, keuntungan diperoleh dari semakin baiknya prasarana desa seperti jalan dan balai desa yang sebagian dananya berasal dari sumbangan KUD. Disamping itu KUD telah mampu memberikan sebagian dari keuntungan yang diperoleh untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti rehabilitasi tempat peribadatan, pengangkatan anak asuh dan sebagainya.

Tetapi sebagaimana yang diakui oleh pengurusnya, saat ini KUD Mekar Jaya sedang mengalami kesulitan. Hal ini terutama disebabkan karena produksi tambang sangat kecil (produksi bullion pada bulan Nopember 1996 hanya 0,159 kg). Perolehan tersebut hanya cukup untuk biaya operasional yang mencakup biaya operasi serta perawatan alat dan gaji karyawan. Dengan kondisi demikian, KUD tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar beban hutang yang sampai saat ini sudah mencapai 300 juta rupiah lebih.

Saat ini KUD Mekarjaya mempekerjakan 18 orang tenaga kerja yang keseluruhannya merupakan penduduk setempat untuk melakukan aktivitas penambangan. Statusnya adalah pegawai harian dengan gaji ratarata Rp 5.000,00 - Rp 6.000,00 per hari.

Selain itu terdapat pula beberapa kelompok petambang yang melakukan penambangan di wilayah KP KUD Mekar Jaya. Penghasilan yang diperoleh bergantung pada produksi yang didapatkan pada hari yang bersangkutan. Adapun pembagian hasil yang berlaku di antara anggota kelompok tersebut adalah sebagai berikut: KUD mendapat 20%, Pemilik Tanah mendapat 15%, Perintis lubang (jasa) 5%, serta anggota kelompok mendapat 60%. Pembagian hasil penggalian tersebut dilakukan dalam bentuk bahan mentah (bijih) yang kemudian diolah oleh masing-masing.

Petambang yang tidak ingin mengolahnya sendiri, biasanya menjualnya kepada anggota kelompok lainnya dengan harga 50% dari taksiran kandungan emas yang terdapat dalam bijih tersebut.

Selain kewajiban menyerahkan 20% dari hasil penggalian harian kepada KUD sebagai pemegang ijin KP, para petambang non KUD tersebut juga wajib menjual bullion/emas yang diperolehnya melalui KUD.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KUD untuk mengatasi hal tersebut antara lain mengajukan usulan (proposal) bantuan dana (modal), baik ke instansi-instansi Pemerintah maupun swasta. Namun upaya tersebut belum berhasil karena ternyata instansi-instansi tersebut belum bersedia memberikan pinjaman modal.

Mata pencaharian utama penduduk adalah sebagai petani serta sebagian penduduk lainnya berprofesi sebagai PNS, ABRI, karyawan swasta, buruh dan pedagang. Para petambang emas sendiri umumnya juga berprofesi sebagai petani yang memanfaatkan waktu senggang antara musim tanam dan musim panen dengan bekerja sebagai petambang untuk memperoleh tambahan penghasilan.

Sebagian besar penduduk merupakan penduduk asli daerah tersebut. Penduduk pendatang jumlahnya sangat sedikit yang umumnya disebabkan karena ikatan perkawinan dengan penduduk setempat. Sebaliknya cukup banyak penduduk dari daerah ini yang melakukan migrasi ke daerah lain terutama dari kalangan petambang emas yang memanfaatkan keahlian yang diperoleh dari pengalaman menambang emas di daerahnya untuk kemudian mencari dan menambang emas di daerah lain. Daerah-daerah yang menjadi tujuan migrasinya antara lain ke Selogiri Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan dan sebagainya. Umumnya pola migrasi tersebut bersifat sementara, karena banyak diantara petambang kemudian kembali ke kampung halamannya. Hal ini tentu saja cukup membawa pengaruh terhadap tata kehidupan penduduk setempat.

Menurut aparat desa, kecenderungan-kecenderungan untuk bersikap individualistik, konsumerisme, dan berkurangnya semangat gotong royong mulai terasa dalam kehidupan penduduk, meskipun belum pernah terjadi konflik yang cukup berarti di kalangan masyarakat.

Dalam usaha mengembangkan kegiatan pertambangan, KUD "Mekarjaya" telah beberapa kali mendapat pembinaan atau bimbingan. Beberapa instansi yang pernah melakukan pembinaan terhadap KUD tersebut adalah DJPU, Pemda (Dinas Pertambangan) dan P3TM.

4. Tahapan Pengusahaan Pertambangan

Tahap-tahap kegiatan pertambangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

4.1. Tahap Penyelidikan Umum

Kegiatan penyelidikan umum masih terbatas pada pemetaan topografi, geologi, penyelidikan geofisika dan geokimia yang diikuti dengan pengambilan percontoh batuan, untuk keperluan penelitian di laboratorium. Penggunaan tenaga ahli dan tenaga lokal masih sangat terbatas. Tenaga kerja lokal hanya dipakai sebagai penunjuk jalan (guide), merintis jalan, dan membantu membawa peralatan dan percontoh batuan di lapangan.

Akhir kegiatan ini adalah menghasilkan peta topografi, peta geologi dan penentuan wilayah-wilayah yang prospektif untuk diusulkan ke tahap kegiatan berikutnya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 x 1 tahun. Luas wilayah yang diperkenankan untuk satu Kuasa pertambangan (KP) adalah 5.000 Ha. Juga diperkenankan untuk memperoleh 5 (lima) KP seluas 5 x 5.000 Ha untuk 1 (satu) perusahaan.

4.2. Tahap eksplorasi

Apabila dari hasil kegiatan tahap penyelidikan umum ditemukan wilayah yang prospektif untuk bahan tambang tertentu, maka kegiatannya dapat dilanjutkan ke tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi dapat berlangsung selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 2 x 1 tahun. Luas wilayah yang diperkenankan untuk setiap KP eksplorasi = 2.000 Ha, dan satu perusahaan maksimum memperoleh 5 (lima) KP = 5 x 2.000 Ha.

Kegiatan ini antara lain meliputi; pemetaan toporafi dan geologi yang lebih rinci, eksplorasi geokimia dan geofisika yang lebih rinci, pembuatan sumur-sumur uji, pembuatan parit-parit uji, dan pemboran inti.

Hasil akhir dari kegiatan ini digunakan untuk menyusun suatu laporan eksplorasi lengkap.

4.3. Tahap Studi Kelayakan

Studi kelayakan ini dapat berlangsung 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun. Dalam kegiatan ini dilakukan penentuan kelayakan suatu bahan tambang untuk dieksploitasi di tinjau dari segi kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan. Termasuk didalamnya penyusunan kerangka acuan, studi Analisi Dampak Lingkungan (ANDAL) serta penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

4.4. Tahap persiapan penambangan atau konstruksi

Kegiatan pada tahap persiapan penambangan/konstruksi ini meliputi: pembebasan tanah, pembangunan sarana dan prasarana antara lain, pembangunan jalan tambang, pembangunan sarana transportasi, pengadaan peralatan, persiapan medan kerja (front) penambangan, persiapan untuk tempat penimbunan tanah pucuk dan tanah penutup (untuk tambang terbuka), pembuatan kolam-kolam pengendapan, pembangunan sarana lainnya: pembangunan bengkel, pembangunan "*power station*" dan jaringan kelistrikan,

pembangunan kantor, pembangunan pabrik pengolahan/pemurnian, pembangunan perumahan karyawan, pembangunan dermaga pelabuhan, pembangunan sarana pengolahan limbah (cair, padat, beracun dan berbahaya) sebelum dibuang ke sungai atau ke laut, dan lain sebagainya. Tahap kegiatan ini dapat berlangsung hingga tiga tahun.

4.5. Tahap penambangan

Tahap penambangan dapat berlangsung 30 tahun dan masih dapat diperpanjang 2 (dua) kali 10 tahun. Metode penambangan yang diterapkan dapat berupa tambang terbuka, tambang bawah tanah atau tambang bawah air.

4.6. Tahap pengolahan dan pemurnian

Kegiatan pengolahan dan pemurnian bergantung pada jenis bahan tambang, sifat-sifat fisik dan kimianya serta teknik pengolahan dan pemurnian yang diterapkan. Tahap penngolahan dapat berlangsung 30 tahun dan masih dapat diperpanjang setiap kali 10 tahun.

4.7. Tahap pengangkutan dan penjualan

Tahap kegiatan ini mencakup transportasi bahan tambang ke tempat penimbunan. Selanjutnya dapat diolah, dikapalkan untuk kemudian dijual ke konsumen.Tahap pengangkutan dan penjualan dapat berlangsung 10 tahun dan masih dapat diperpanjang setiap kali 5 tahun.

5. Strategi Dan Program

5.1. Strategi

Strategi disini diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan pertambang-

an terhadap masyarakat sekitar. Berdasarkan arah pembangunan pertambangan yang telah ditetapkan dan memperhatikan keadaan dan masalah yang ada sekarang, disarankan tiga strategi umum, yaitu: (a) Strategi Proaktif dan Tidak Reaktif; (b) Strategi Pemberdayaan; dan (c) Strategi Kemitraan.

5.1.1. Strategi proaktif dan tidak reaktif

Pihak perusahaan harus secara terus menerus berhubungan dengan segala pihak untuk berkomunikasi dan melanjutkan serta memperbaiki strategi dan program yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena sifat masyarakat yang tidak statis. Sifat antisipatif merupakan kata kunci dalam strategi ini.

5.1.2. Strategi pemberdayaan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah menjadikan pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat setempat mampu dan dapat mengambil dan melaksanakan perannya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pemberdayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemberdayaan melalui tanggung jawab, otoritas atau wewenang, peningkatan pengetahuan dan keahlian, informasi dan umpan balik, penetapan standar kerja yang jelas, dan melalui penghargaan.

5.1.3. Strategi kemitraan

Strategi kemitraan mengisyaratkan bahwa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pihak perusahaan disarankan untuk bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, saling menguatkan, saling melengkapi, meningkatkan kekuatan setiap pihak dan mendapatkan efek sinergi positif.

5.2. Program

Untuk mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar dengan menggunakan strategi yang telah disebutkan di atas, pada kesempatan ini dicoba diungkapkan pemikiran tentang pola program-program umum. Program ini dapat dikelompok berdasarkan sifat program yaitu terdiri dari program Pembinaan, Pelayanan, dan Pengembangan. Sebagai contoh telah dicoba untuk mengisi pola tersebut seperti pada Tabel I untuk Kontrak Karya (KK) yang tentunya masih harus dikembangkan lebih lanjut. Untuk Kuasa Pertambangan (KP) tahap perijinan akan berulang pada setiap tahap.

Adapun pola pikir dalam mewujudkan tanggung jawab sosial oleh suatu perusahaan dapat dilihat pada Gambar 1.

6. Penutup

Di dalam mewujudkan tanggung jawab sosial, pada Sektor Pertambangan Modern, pihak perusahaan akan berfungsi sebagai penggerak utama. Pada Sektor Pertambangan Tradisional, untuk saat ini, kewajiban lebih besar ada di pihak Pemerintah.

Identifikasi masalah untuk setiap daerah pertambangan merupakan suatu hal pokok yang harus dilakukan. Demikian pula, hubungan secara tidak terputus khususnya dengan masyarakat setempat, pemerintah daerah serta instansi terkait, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Penyusunan dan penerapan strategi dan program perlu dilakukan sesegera mungkin secara optimal dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan pemerintah.

Selain program-program yang dilakukan selama tahap pengusahaan pertambangan, dibutuhkan juga programprogram untuk tahap pasca pertambangan.

Daftar Bacaan

Achmad Dohar Siregar dan WT Darmawan: "Orientasi Antam Menuju Go Public sebagai Refleksi Pembudayaan Masyarakat Yang Berwawasan Pembangunan", Seminar Nasional Pertambangan Indonesia 1997, Ujung Pandang, 18-19 September 1997.

Alan Steven: "Social Planning Through Business and Infrastructural Development".

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan – Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung; "Rencana Induk Pengembangan Pertambangan Skala Kecil", 1997.

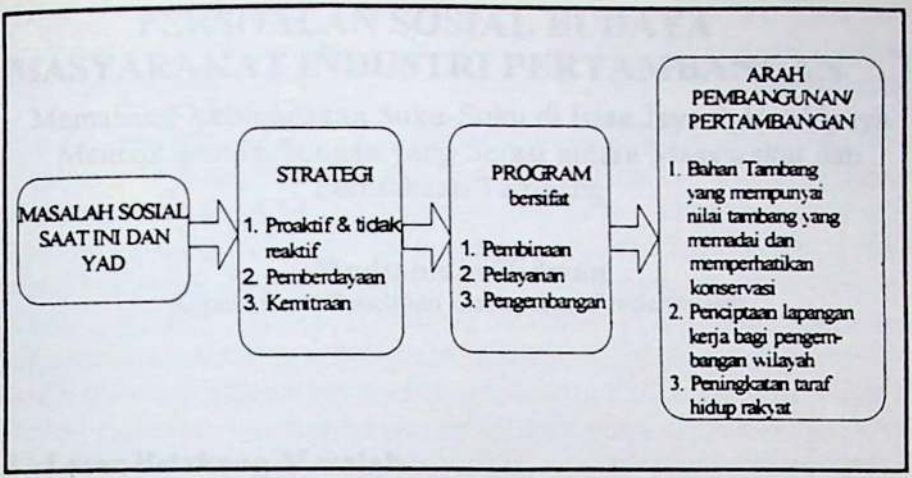
Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Maret 1993.

Ravetz, J.R. : "Usable knowledge, usable ignorance; incomplete science with policy implication", Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization 9 (1): 87-116, 1987.

Suara Pembaharuan: "Kesenjangan Budaya dan Ekonomi di Mimika masih sangat lebar", 18 September 1997.

TABEL I
CONTOH PROGRAM UMUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM MEWUJUDKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT SETEMPAT PADA SETIAP TAHAP KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

TAHAP KEGIATAN	SIFAT PROGRAM	CONTOH PROGRAM UMUM
PEMILIHAN LOKASI	Pembinaan	• Menjadikan RUTR sebegai salah acuan dalam pemilihan lokasi pertambangan dan perencanaan tata letak tambang.
PERIJINAN	Pembinaan	• Mentaati semua peraturan yang berhubungan dengan industri pertambangan termasuk PERDA pada daerah yang akan dijadikan lokasi usaha pertambangan.
PENYELIDIKAN UMUM	Pembinaan Pelayanan	• Pendekatan dan penyampaian informasi yang cukup kepada masyarakat mengenai kegiatan dan tujuan dari perusahaan sehubungan dengan keberadaan bahan galian dan manfaatnya bagi perusahaan dan masyarakat bila endapan tersebut ditambang dengan melibatkan pemerintahan dan tokoh masyarakat setempat. • Melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan penyelidikan umum secara aktif
EKSPLORASI	Pembinaan Pelayanan Pelayanan Pengembangan	• Bimbingan dan penyuluhan tentang Teknik Eksplorasi bagi masyarakat setempat. • Memberikan kompensasi lahan sesuai peraturan (bila ada). • Melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja. • Bantuan teknis eksplorasi bila ada lokasi pertambangan skala kecil di sekitar daerah K.P.
PERSIAPAN PENAMBANGAN	Pembinaan Pelayanan Pelayanan Pengembangan	• Mengadakan pelatihan di BLK • Memberikan kompensasi lahan sesuai peraturan yang termasuk daerah pertambangan. • Mengizinkan masyarakat sekitar memanfaatkan barang-barang seperti kayu hasil pembersihan lahan dan lain-lain • Pembukaan seluas-luasnya lapangan kerja dan kesempatan usaha dalam bidang usaha penunjang industri pertambangan bagi masyarakat setempat.
PENAMBANGAN	Pembinaan Pelayanan Pengembangan Pengembangan Pelayanan	• Pelatihan dan bimbingan teknik penambangan dan lingkungan. • Meminimalisasi dampak negatif penambangan terhadap lingkungan hidup. • Pembukaan seluas-luasnya lapangan kerja dan kesempatan usaha dalam bidang usaha penunjang industri pertambangan bagi masyarakat sekitar. • Menjalin kemitraan dengan industri kecil di sekitar lokasi perusahaan pertambangan. • Minimal 3 tahun sebelum kegiatan pertambangan selesai, program pelatihan untuk beralih ke industri lain dimulai untuk masyarakat setempat.
PENGOLAHAN & PEMURNIAN	Pembinaan Pelayanan	• Bimbingan dan pelatihan teknik pengolahan. • Meminimalisasi dampak limbah pengolahan/ pemurnian
PENGANGKUTAN & PEMASARAN	Pengembangan	• Membuka kesempatan usaha (kemitraan) bagi masyarakat sekitar dalam bidang uasah penunjang kegiatan pengangkutan dan pemasaran.
PASCA TAMBANG	Kompensasi Pelayanan Pelayanan	• Memberikan pesangon yang wajar dan membantu mencarikan perkerjaan atau usaha bagi karyawan yang di PHK • Membongkar bangunan yang membahayakan dan menyerahkan bangunan yang masih bisa dimanfaatkan kepada masyarakat sekitar • Merahabilitasi lahan bekas tambang yang akan ditinggalkan



Gambar 1
Pola pikir dalam mewujudkan tanggung jawab sosial oleh perusahaan pertambangan

PERSOALAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT INDUSTRI PERTAMBANGAN

Memahami Kebhinekaan Suku-Suku di Irian Jaya dalam Upaya Menciptakan Hubungan yang Serasi antara Masyarakat dan Perusahaan Tambang

Mudjahidin Ridwan
Kepala Pusat Penelitian Universitas Cenderawasih

1. Latar Belakang Masalah

Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya di samping sebagai propinsi terluas di Indonesia, juga merupakan propinsi yang memiliki potensi sumber kekayaan alam yang besar, baik sumberdaya biotik (hayati) maupun sumberdaya fisik (alami). Sumberdaya biotik yang dimaksud adalah terdiri dari tumbuh-tumbuhan dan hewan, jenis sumberdaya ini dapat diperbaharui (renewable resources). Sedangkan yang termasuk sumberdaya fisik cukup banyak jenisnya, diantaranya ialah: air, tanah, udara, mineral, dan lain sebagainya. Sumberdaya fisik ini adalah sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*). Sekalipun wilayah Irian Jaya kaya akan potensi sumber kekayaan alam, namun sangat disayangkan bahwa tingkat kemajuan sosial ekonomi warga masyarakatnya masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan tingkat sosial ekonomi warga masyarakat di propinsi-propinsi lainnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya ialah: masih tingginya angka buta buruf yaitu 32,75% untuk wanita dan 20,71% untuk pria (1995), masih rendahnya usia harapan hidup yaitu hanya 60,54 tahun atau urutan ke 24 dari 27 propinsi (1995), masih tingginya angka kematian Bayi yaitu 68/1000 kelahiran hidup (1995), tingginya angka pengangguran termasuk didalamnya pengangguran intelektual, dan di samping itu berdasarkan hasil survai yang dilaksanakan tahun 1993 dapat

diketahui bahwa prosentase jumlah desa miskin di Irian Jaya masih sangat tinggi yaitu sekitar 77,5% dari seluruh desa yang ada di Irian Jaya.

Berdasarkan pada gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat Irian Jaya sebagaimana diketengahkan di atas, maka kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas dengan tetap memperhitungkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang selama ini ada. Dalam era globalisasi, maka kegiatan pembangunan di Irian Jaya masih dititikberatkan pada pembangunan bidang ekonomi, dengan sasaran utamanya ialah mencapai keseimbangan antara bidang industri dan bidang pertanian, serta terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Pengembangan bidang industri termasuk didalamnya industri pertambangan perlu ditunjang oleh tersedianya kualitas sumberdaya manusia dan stabilitas nasional maupun regional yang mantap dan dinamis. Kualitas sumberdaya manusia Irian Jaya yang dituntut dalam era industrialisasi ialah manusia yang memiliki karakteristik: memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, disiplin, memiliki etos kerja tinggi, kreatif, berorientasi masa depan, inovatif, memiliki tanggung jawab dalam memajukan masyarakat dan bangsa, bermoral dan berfikir rasional, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan memiliki karakteristik tersebut, maka masyarakat Irian Jaya akan dapat mengolah dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara optimal tanpa merusak ekosistemnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.

Sedangkan permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat Irian Jaya dalam pelaksanaan pembangunan termasuk didalamnya bidang industri adalah sebagai berikut: masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya penguasaan teknologi, terbatasnya infrastruktur yang tersedia, belum berfungsinya sistem pemerintahan secara optimal, dan adanya kendala-kendala sosial budaya.

2. Kondisi Geografis Dan Demografis

2.1. Kondisi Geografis

Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya adalah merupakan propinsi terluas di Indonesia, luas daratannya adalah 414.800 km2 dan luas perairannya 280.000 km2 dengan panjang pantainya 2.000 mil laut. Dari luas daratan tersebut maka sebagian besar (84%) terdiri dari hutan tropis yang banyak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dilihat dari neraca sumberdaya lahan yang didata pada tahun 1993, maka penggunaan tanah di wilayah Irian Jaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: (Pemda Tingkat I Irian Jaya, tahun 1993:6).

a. Tanah untuk pemukiman, transmigrasi, sarana sosial ekonomi dan budaya serta perhubungan		2.525.000 ha
b. Tanah untuk pertanian		3.545.900 ha
c. Tanah untuk perindustrian		800 ha
d. Tanah yang ditumbuhi hutan :		
1). Hutan PPA & Lindung		15.527.800 ha
2). Hutan Produksi tetap & terbatas		11.965.800 ha
3). Hutan Konversi		7.828.900 ha
e. Tanah yang ada air permukaan		85.800 ha
Jumlah	=	41.480.000 ha

Sumberdaya hayati berupa fauna dan flora yang ada di wilayah Irian Jaya cukup potensial. Jenis binatang yang banyak terdapat di Irian Jaya diantaranya ialah: binatang-binatang berkantung, buaya, berbagai jenis burung, kura-kura, kupu-kupu, penyu raksasa, rusa, dan babi. Jenis tumbuh-tumbuhan yang banyak terdapat di Irian Jaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi ialah: sagu, kayu putih, kayu besi, matoa, damar, rotan, dan berbagai jenis anggrek. Flora yang ada di Irian Jaya berjumlah ±

16.000 jenis, dan 90% dari jenis tersebut bersifat endemik (hanya terdapat di daerah ini) (Petocz, 1985). Sesuatu yang spesifik dan menarik dari kekayaan sumberdaya biotik di Irian Jaya ialah dari jumlah 1465 genera angiospermae yang ada di Irian Jaya, 124 genera adalah endemik dan juga terdapat sekitar 2770 spesies anggrek.

Sumberdaya air dan laut di Irian Jaya juga sangat potensial. Pesisir pantai Irian Jaya luasnya adalah 228.000 km2, dan luas danaunya adalah lebih dari 517 km2. Nama-nama danau tersebut diantaranya ialah: Danau Paniai, Rambubai, Sentani, Tigi, Yamus, Tage, dan danau Ayamaru. Sedangkan sungai-sungai besar yang ada di Irian Jaya diantaranya ialah: Mamberamo, Kumbe, Bian, Digul, Kamundan, dan sungai Otokma. Potensi sumberdaya air dan laut terdiri dari berbagai jenis, yaitu: ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, mutiara, dan lain-lain.

Sumberdaya meneral di Irian Jaya kemungkinan besar sangat potensial, hal ini didasarkan pada hasil kajian non teknik lempeng yang mengisyaratkan bahwa Irian Jaya terdapat berbagai jenis barang tambang. Jenis-jenis barang tambang tersebut diantaranya ialah: aluminium, besi putih, tembaga, uranium, timah, nikel, fosfat, minyak bumi, gas alam, batu bara, arsen, perak, bismuth, mika chion, cobait, emas, besai, magnesum, air raksa, dan berbagai macam barang-barang golongan C. Barang tambang golongan C tersebut antara lain: batu, batu mulia, mika, talk, gamping, porselin, kerikil, giwang, granit, marmer, dan lempung. Perkiraan deposit untuk tembaga di Ertsberg sebesar 33 juta ton dan di Gunung Bijih Timur sebesar 45 juta ton dengan perkiraan kandungan emas 0,75 gram, perak 9 gram tiap ton bijih tembaga. Endapan tembaga di tembaga di Ertsberg (sekitar 3 km di Utara Gunung Bijih) merupakan cadangan tunggal terbesar di dunia, dengan kandungan (1,4% Cu dan 1,3 gram Au/ton). Cadangan tersebut mencapai sekitar 800 juta ton, dapat dioperasikan lebih dari 25 tahun dengan rata-rata pengambilan bijih 100.000 ton/hari. Demikian pula dengan temuan ladang-ladang minyak baru dan batubara di Teluk Bintuni. Deposit marmer sebesar 1.050 juta ton,

granit sebesar 36.540 juta m3 dan batu kapur 100 juta ton, merupakan potensi yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan (Pemda Tingkat I Irian Jaya, 1995: 2-3).

2.2. Kondisi Demografis

Penduduk Irian Jaya pada tahun 1995 adalah 1.956.300 jiwa, jika dikaitkan dengan luas wilayahnya maka kepadatannya adalah 4,71 jiwa/km2. Pertumbuhan penduduk Irian Jaya selama periode 1980-1990 setiap tahunnya rata-rata 3,46%, dan periode 1990-1995 setiap tahunnya rata-rata adalah 3,46%. Sebagian besar (75%) dari mereka bermukim di daerah pedesaan dan pendalaman, mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang terpencar dan terpencil atas dasar kesukuan. Jenis pekerjaan yang banyak mereka miliki adalah pertanian dan perambah hutan. Sistem pertanian yang digunakan adalah perladangan berpindah. Hasil usaha baik dalam bidang pertanian maupun perambah hutan pada umumnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya (sub-sisten).

Jumlah suku (etnis) yang ada di Irian Jaya yang telah didata cukup banyak, yaitu 45 suku. Dari jumlah 45 suku tersebut, mereka terdiri dari 249 sub suku, pembagian sub suku tersebut didasarkan pada pengelompokan dialek yang digunakannya. Jadi adanya anggapan bahwa di Irian Jaya terdapat 249 suku adalah kurang benar, yang benar adalah 45 suku yang terdiri dari 249 sub suku. Masing-masing sub suku terdiri dari beberapa klen (marga/keret), dan pada masing-masing marga terdiri dari beberapa KK. Dan perlu diketahui bahwa pendataan terhadap suku-suku yang ada di Propinsi Dati I Irian Jaya sampai saat sekarang ini masih belum seluruhnya dilaksanakan, karena ada beberapa daerah yang letaknya terpencil dan terisolir sampai saat sekarang ini belum dapat dijangkau oleh pelayanan aparat pemerintah maupun fihak-fihak yang lainnya. Atas dasar kenyataan ini maka jumlah suku-suku yang ada di Irian Jaya kemungkinan besar masih ada lagi. Untuk lebih jelasnya tentang penyebaran masing-masing suku

dan sub sukunya pada masing-masing Kabupaten Dati II yang ada di Propinsi Dati I Irian Jaya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Persebaran Suku Bangsa Irian Jaya Berdasarkan Kabupaten dan Dialek yang Digunakan (Sub Suku Bangsa)

No.	Kabupaten/Kodya	Jumlah Suku	Jumlah Dialek (sub suku)
1.	Kodya Jayapura	1	11
2.	Kabupaten Jayapura	16	70
3.	Kabupaten Jayawijaya	3	24
4.	Kabupaten Merauke	6	34
5.	Kabupaten Biak Numfor	1	1
6.	Kabupaten Manokwari	3	17
7.	Kabupaten Sorong	6	41
8.	Kabupaten Fak-Fak	5	19
9.	Kabupaten Paniai	2	13
10.	Kabupaten Yap. Waropen	2	19
Σ	9 Kabupaten/1 Kodya	45	249

Sumber : UNCEN, hasil Penelitian, 1991.

Keadaan masing-masing suku tersebut sangat heterogen, dan keheterogenan tersebut dapat dilihat dalam hal: jumlah, kondisi tempat tinggal, makanan pokok, jenis kesenian yang dimiliki, bahasa yang digunakan, kepercayaan yang dianut, sistem kekerabatan, sistem kepemimpinan, adat istiadat, struktur sosial, sistem matapencaharian, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh untuk kabupaten Sorong dan Fak-Fak kepemimpinan tradisional pada umumnya dikepalai oleh seorang raja, sedangkan untuk kabupaten lainnya kepemimpinan tradisional dikepalai oleh seorang kepala suku. Garis keturunan di kalangan suku Komoro adalah matrilineal, sedangkan garis keturunan di kalangan suku-suku lainnya di Irian Jaya adalah patrilineal.

3. Industri Pertambangan Dan Pembangunan Irian Jaya

Peranan sub sektor industri dalam perkembangan ekonomi wilayah Irian Jaya sampai saat ini masih rendah, hal ini dapat dilihat dari rendahnya sumbangan sub sektor industri terhadap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu kurang dari 1%. Sekalipun sumbangan sub sektor tersebut terhadap PDRB kecil, tetapi perkembangan sub sektor ini dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang berarti. Gambaran tentang hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB sub sektor industri sejak tahun 1983 sampai dengan 1989/1990 yang menyimpulkan adanya pertumbuhan rata-rata 7,01%/tahun jika didasarkan pada harga konstan, dan pertumbuhan rata-rata 16,27% jika didasarkan pada harga yang berlaku.

Sub sektor industri di Irian Jaya secara garis besar dapat di-klasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu: industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Dari ketiga kelompok industri ini, maka industri kecil merupakan kelompok industri yang paling pesat perkembangannya. Walaupun potensi tambang di Irian Jaya cukup potensial, akan tetapi perusahaan besar yang telah memproduksi tambang tersebut jumlahnya masih sangat terbatas, yaitu baru PT Freeport dan Petromer Trend Corporation (PTC). Sedangkan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang sekarang ini sedang melakukan usaha pertambangaan di Irian Jaya yang jumlahnya lebih dari 20 buah, masih pada tahap peninjauan dan eksplorasi. PT Freeport mengusahakan penambangan di daerah Ertsberg (yang terletak di kaki puncak Jayawijaya), yaitu berupa: tembaga, emas, dan perak. Sedangkan Petromer Trend Corperation melakukan penambangan di wilayah Kepala Burung (Sorong), yaitu berupa minyak bumi dan gas alam.

Usaha pengembangan industri pertambangan di Propinsi Dati I Irian Jaya pada masa-masa mendatang cukup cerah, akan tetapi dalam proses penanganannya perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat dan profesional dan perlu memperhitungkan beberapa variable yang diduga sangat berpengaruh terhadap

keberhasilan usaha penambangan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam usaha industri pertambangan ialah: (1) Studi pra kelayakan, (2) Studi kelayakan, (3) Eksplorasi permulaan, (4) eksplorasi terinci/ lanjut, (5) eksploitasi, (6) pemrosesan/ pengolahan, (7) pengangkutan, dan (8) reklamasi, (Joedo D. Elifas, 1990). Sedangkan langkah-langkah kegiatan yang perlu dilakukan dalam usaha industri minyak dan gas adalah: (1) ekplorasi, (2) produksi, (3) pengilangan, (4) transportasi, dan (5) pemasaran. (Ir. Tjik Nang Ali, 1990).

Variable yang perlu diperhitungkan dalam pengusahaan industri pertambangan di propinsi Dati I Irian Jaya adalah masyarakat pemilik hak ulayat, yaitu masyarakat yang mendiami lokasi di mana jenis-jenis barang tambang yang diusahakan tersebut berada. Lokasi-lokasi pemukiman pemilik hak ulayat tersebut pada umumnya berada di pedalaman dan berupa hutan. Atas dasar kenyataan tersebut maka hutan bagi masyarakat Irian Jaya mempunyai banyak fungsi. Hutan dapat menyediakan berbagai kebutuhan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu kehidupan masyarakat Irian Jaya sangat bergantung dan sangat dipengaruhi oleh hutan. Segala aspek sistem nilai sosial kemasyarakatannya sangat erat dengan hutan. Keadaan kehidupan masyarakat seperti itu sesuai dengan fungsi hutan yang telah dikemukakan oleh Dr.Ir. B.D. Nasendi (1988) yaitu:

1) Hutan adalah aset suku dan keret yang diatur menurut hukum adat dan diatur oleh kepala suku, yang disebut Ondoafi.

2) Hutan adalah tempat berburu sebagai penghasil materi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

3) Hutan sebagai bagian dari ekosistem/sosial masyarakat sebagai akibat perkembangan perilaku dan budaya manusia (nenek moyang).

4) Hutan adalah tempat mencari makan, tempat berkebun, berladang dan tempat meningkatkan kesejahteraan.

5) Hutan adalah tempat tinggal nenek moyang dan roh-roh jahat yang tidak boleh diganggu karena bisa mendatangkan malapetaka, seperti banjir, kekeringan, dan sebagainya.

6) Hutan berfungsi sebagai tempat persembunyian/perlindungan di waktu perang antar suku.

Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa hutan bagi masyarakat Irian Jaya adalah merupakan sesuatu yang sangat bernilai, karena didalamnya telah mencerminkan kondisi sosial budayanya, yaitu yang menyangkut tentang: sistem mata pencaharian, sistem keamanan, sistem kepemimpinan, sistem kepercayaan, sistem pendidikan, dan lain sebagainya. Karena itu sudah sewajarnya dan selayaknya jika para investor yang akan mengusahakan usaha di bidang industri pertambangan di Irian Jaya, terlebih dahulu perlu mengkaji dan memahami masalah sosial budaya masyarakat dimana lokasi pertambangan tersebut akan dikelola.

4. Persoalan Sosial Budaya Dalam Pengembangan Industri Pertambangan Di Irian Jaya dan Strategi Pemecahannya

4.1. Persoalan Sosial Budaya

Pengembangan industri pertambangan di Irian Jaya pada saat sekarang ini dan juga mungkin pada masa-masa mendatang tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, akan tetapi sering dijumpai adalah berbagai persoalan. Persoalan-persoalan tersebut cukup banyak jenisnya, baik persoalan sosial budaya. Pada pembahasan di bawah ini kami hanya mengetengahkan persoalan sosial budaya sebagai dampak adanya industri pertambangan di Irian Jaya, per-soalan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Masalah Tanah

Tanah yang dihuni oleh warga masyarakat (khususnya masyarakat lokal) adalah tanah adat (hak ulayat) dan memiliki nilai yang

sangat tinggi, yaitu dilihat dari segi: ekonomis, sosial, politis, maupun religi. Atas dasar sangat tingginya nilai tanah bagi kehidupan masyarakat, maka masalah tanah adalah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik yang banyak terjadi di Irian Jaya, baik konflik internal di kalangan warga suku maupun konflik external (konflik dengan warga suku lain). Dalam hal hak warga ma-syarakat terhadap tanah hak ulayat, para warga masyarakat umum-nya hanya mempunyai hak pakai (memanfaatkan) bukan hak memiliki. Dengan masuknya perusahaan tambang ke suatu kawasan, maka akan membawa pengaruh yang besar bagi status tanah dan nilai tanah serta implikasi-implikasi sosial budaya lainnya.

b. Makin Sempitnya Kawasan Usaha

Ketergantungan warga masyarakat lokal terhadap tanah (hutan) sangat besar sekali, karena di kawasan hutanlah warga masyarakat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis pekerjaan yang mereka lakukan diantaranya ialah: bertani, berburu, meramu hasil hutan, menokok sagu, dan mengumpulkan hasil hutan lainnya. Dengan dikuasainya sebagian kawasan hutan tersebut oleh perusahaan pertambangan, maka akan membawa dampak pada makin sempitnya kawasan usaha masyarakat.

c. Peningkatan jumlah penduduk secara tajam

Adanya industri pertambangan di suatu wilayah, dapat berperan sebagai daya tarik bagi segenap lapisan masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan perusahaan tersebut untuk berbagai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Kepentingan yang dimaksud adalah: bekerja di perusahaan, berdagang, pelayanan jasa, dan lain sebagainya. Warga masyarakat yang datang ke lokasi industri pertambangan tersebut datang dari wilayah Irian Jaya maupun wilayah non Irian Jaya, bahkan tidak sedikit mereka yang datang dari luar negeri. Warga masyarakat datang dari berbagai penjuru tersebut mempunyai latar belakang

sosial budaya yang berbeda-beda, diantaranya ialah: sistem nilai yang digunakan, norma hidup yang dimiliki, kepercayaan yang dianut, sistem kepemimpinan yang dikenal, adat istiadat yang dipatuhi, teknologi yang dikuasai, dan lain sebagainya. Adanya latar belakang kondisi sosial budaya yang berbeda-beda tersebut, dapat berperan sebagai pemicu timbulnya konflik-konflik sosial. Konflik tersebut dapat terjadi karena masing-masing kelompok sosial belum memahami secara baik aspek-aspek yang berbeda tersebut.

d. Berkembangnya Masalah-masalah Sosial

Warga masyarakat yang datang ke kawasan perusahaan pertambangan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginannya masing-masing, disebabkan karena sesuatu hal maka banyak diantara mereka yang tidak bisa ditampung oleh perusahaan atau oleh lapangan pekerjaan lainnya yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Sebagian warga yang tidak bisa ditampung oleh sektor pekerjaan pulang ke daerah asalnya masing-masing, akan tetapi sebagiannya lagi melakukan pekerjaan apa saja sekalipun jenis pekerjaan tersebut bertentangan dengan norma dan hukum. Jenis pekerjaan tersebut termasuk permasalahan sosial, yaitu diantaranya terdiri dari: berkembangnya miras, pelacuran, tindak kriminalitas, meningkatnya pengangguran, penipuan, dan pemerasan.

e. Meningkatnya Persaingan

Berdirinya industri di suatu wilayah Irian Jaya khususnya industri besar (industri pertambangan) maka menarik minat banyak orang untuk bekerja di perusahaan tersebut, baik masyarakat yang berasal dari Irian Jaya maupun luar Irian Jaya. Fihak perusahaan dalam merekrut tenaga kerja telah menetapkan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, hal ini dimaksudkan agar perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya dapat berjalan dengan baik dan tujuan ditetapkan dari berdirinya perusahaan tersebut mencapai sasaran yang diharapkan. Persyaratan-persyaratan tersebut diantaranya ialah: jenis keterampilan yang dimiliki, tingkat pendidikan for-

mal yang ditempuh, pengalaman kerja, disiplin kerja, motivasi kerja, kualitas kerja, dan lain sebagainya. Masyarakat luar Irian Jaya pada umumnya telah memenuhi perusahaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, akibatnya banyak diantara mereka yang diterima bekerja di perusahaan pertambangan tersebut. Sedangkan masyarakat yang berasal dari Irian Jaya banyak yang ditolak untuk bekerja di perusahaan pertambangan. Kenyataan penerimaaan karyawan seperti ini dapat menimbulkan perasaan-perasaan negatip di kalangan penduduk asli Irian Jaya, diantaranya ialah: diperlakukan kurang adil, tidak merasaa ikut memiliki perusahaan, tersisih dari kehidupan modern (sebagai dampak adanya perusahaan pertambangan), ketidakadilan, hanya sebagai objek pembangunan, dan perasaan negatip lainnya. Kondisi yang kurang kondusip tersebut dapat menimbulkan kebencian dan kecemburuan sosial yang pada akhirnya bermuara pada timbulnya berbagai konflik sosial, yaitu konflik masyarakat lokal dengan: fihak perusahaan, pemerintah, dan kelompok masyarakat lainnya.

4.2. Strategi Pemecahan Persoalan Sosial Budaya

Persoalan sosial budaya yang muncul sebagai dampak keberadaan industri pertambangan di suatu wilayah, bentuknya bermacam-macam yaitu sesuai dengan apa yang kami ketengahkan dalam pembahasan di atas. Strategi yang digunakan untuk memecahkan persoalan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemecahan Masalah Tanah

Bagai para pengusaha pertambangan yang akan memulai membangun fasilitas industri karena kegiatan eksploitasi akan dilaksanakan, maka permasalahan tanah supaya terlebih dahulu dipecahkan. Fihak-fihak yang dilibatkaan dalam musyawarah untuk memecahkan masalah tanah tersebut ialah: penguasa, masyarakat, dan pemerintah. Fihak masyarakat yang dimaksud adalah terdiri dari: tokoh-tokoh adat pemilik hak ulayat tanah, tokoh agama, pemuka masyarakat, maupun fihak-fihak lainnya

yang dianggap berpengaruh. Dalam musyawarah tersebut supaya dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan: luas tanah yang akan digunakan oleh industri, bentuk kompensasi diberikan industri (perusahaan) kepada masyarakat, dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan. Yang perlu ditekankan dalam musyawarah tersebut terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan antara berbagai fihak, yaitu fihak penguasa, masyarakat, maupun pemerintah. Fihak pengusaha mendapatkan keuntungan dengan mengusahakan industri pertambangan di Irian Jaya, masyarakat dapat memanfaatkan kehadiran perusahaan tersebut untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dan pemerintah memperoleh keuntungan dari pajak yang diterima dari perusahaan tersebut.

b. Masalah Pemukiman Penduduk

Perumahan penduduk masyarakat Irian Jaya khususnya mereka yang berada di daerah pedesaan dan pedalaman pada umumnya berada di daerah yang terpencil dan terisolir, letak rumah tidak beraturan dan jarak rumah yang satu dengan yang lainnya kadang-kadang cukup jauh. Karena itu dengan adanya industri pertambangan yang masuk ke wilayahnya, maka kondisi perumahan yang ada di daerah tersebut perlu ditata kembali secara baik, yaitu dengan cara membuat pemukiman perumahan di lokasi yang baru. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh lokasi pemukiman perumahan tersebut ialah: memiliki daya dukung lingkungan yang memadai, bebas banjir, terletak di daerah yang strategis dilihat dari aspek komunikasi, tersedianya sumber air, terletak di daerah hak ulayatnya, dan tersedianya areal tanah yang cukup luas. Areal tanah tersebut di samping dapat digunakan untuk pemukiman juga dapat digunakan untuk berbagai jenis usaha lainnya, antara lain: pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan pemukiman perumahan tersebut tidak hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi merupakan tanggung jawab pula pemerintah dan warga masyarakat itu sendiri.

Dengan tersedianya pemukiman penduduk yang teratur yang dilengkapi dengan ketersediaan rumah warga masyarakat yang layak huni, maka akan memudahkan untuk mengadakan pembinaan terhadap warga masyarakat tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka di lokasi perumahan yang baru tersebut perlu dilengkapi dengan fasilitas umum lainnya.

c. Program Pengembangan Masyarakat

Program pengembangan masyarakat disusun secara bersama-sama oleh 3 fihak, yaitu: masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut juga ditanggung bersama-sama oleh tiga fihak itu, yaitu sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya masing-masing.

Materi-materi kegiatan yang perlu diberikan kepada warga masyarakat terdiri dari berbagai jenis pengetahuan dan ketrampilan. Dengan memiliki pengetahuan dan ketrampilan tersebut, maka persoalan-persoalan sosial budaya yang timbul akibat adanya industri pertambangan dapat ditekan seminimal mungkin. Adapun materi-materi kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bimbingan dan penyuluhan sosial budaya, yang terdiri dari:

   a). Bimbingan dan penyuluhan keagamaan

   b). Bimbingan dan penyuluhan makanan dan gizi serta kesehatan

   c). Bimbingan dan penyuluhan kependudukan dan lingkungan hidup

   d). Bimbingan dan penyuluhan kewanitaan

   e). Bimbingan dan penyuluhan seni dan olahraga

2) Penyuluhan sosial politik, yang terdiri dari :

a). Penyuluhan ideologi negara, yang terdiri dari : sistem kemasyarakatan, kehidupan berbangsa dan bernegara, penataran P4, penyuluhan hukum, dan lain-lain

b). Penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat

3) Bimbingan dan penyuluhan usaha, yang terdiri dari :

a). Bimbingan dan latihan berbagai jenis ketrampilan, yaitu terdiri dari: ketrampilan bertani, ketrampilan beternak, ketrampilan budidaya dan penangkapan ikan, ketrampilan pertukangan dan lain sebagainya

b). Bimbingan dan penyuluhan ekonomi produktif

c). Bimbingan dan penyuluhan manajemen pemasaran sederhana

d). Prioritas Penerimaan Karyawan.

Industri pertambangan yang beroperasi di wilayah Irian Jaya dalam menerima karyawan hendaknya memprioritaskan mereka yang berasal dari penduduk lokal, khususnya mereka yang wilayah hak ulayatnya telah dibangun industri pertambangan tersebut dengan tetap memperhatikan jenis-jenis ketrampilan yang dibutuhkan serta standar kualifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

5. Kesimpulan

1. Propinsi Irian Jaya adalah salah satu propinsi yang jumlah penduduknya paling sedikit, yaitu kepadatannya hanya 4,7 jiwa/km2. Akan tetapi kelompok etnis yang ada di dalamnya cukup banyak yang memiliki heterogenitas

dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu : bahasa, adat istiadat, kepercayaan, sistem mata pencaharian, struktur sosial, sistem kepemimpinan, norma sosial, dan lain sebagainya.

2. Potensi sumberdaya alam yang terdapat di wilayah ini cukup besar, termasuk di dalamnya potensi sumberdaya mineral. Sampai saat ini hanya beberapa perusahaan saja yang telah memproduksi kekayaan mineral tersebut, yaitu PT. Freeport Indonesia dan Petromer Trend Corporation. Walaupun demikian telah muncul berbagai masalah sosial sebagai akibat pengembangan industri pertambangan tersebut.

3. Masalah-masalah sosial yang dimaksud adalah terdiri dari : masalah tanah, makin sempitnya wilayah usaha, peningkatan yang pesat jumlah penduduk, berkembangnya masalah-masalah sosial, dan meningkatnya persaingan.

4. Pengembangan industri pertambangan di Irian Jaya untuk masa-masa mendatang cukup cerah, asalkan dalam langkah-langkah kegiatannya mendapatkan dukungan dari berbagai fihak, baik fihak pemerintah maupun segenap lapisan masyarakat.

5. Warga masyarakat akan berpartisipasi terhadap pengembangan industri pertambangan di wilayahnya, jika dalam proses penanganannya menggunakan pendekatan sosial budaya. Dengan menggunakan pendekatan ini maka kegiatan industri pertambangan di Irian Jaya akan dapat berjalan dengan lancar, dan sasaran yang diharapkan dengan adanya perusahaan akan dapat diwujudkan.

Referensi

Ir. Tjik Nang Ali, 1990: *Dampak Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi terhadap Masyarakat Sekitar*, Makalah Seminar, Jayapura.

Joedo D. Elifas, 1990: *Proyek Pertambangan dan Masalah Partisipasi Masyarakat Irian Jaya*, Makalah Seminar, Jayawijaya.

Pemda Tingkat I Irian Jaya, 1995: *Repelita VI*, Buku I s/d V, Jayapura.

----------, 1995: *Irian Jaya Dalam Angka*, Jayapura.

Petocz, R.G., 1995: *Irian Jaya: Biological Recouce and Rationale for a Comprehensive Protected Area Design*, Irian, Bulletin of Irian Jaya 18 : 43-64.

PUSLIT UNCEN, *Hasil-hasil Penelitian Terakhir*, Jayapura.

PERTAMBANGAN DAN MASYARAKAT LOKAL DI PROPINSI IRIAN JAYA

Kasus PT Freeport Indonesia

Sombuk Musa Yosep
Universitas Cenderawasih

1. Pendahuluan

1.1. Sepak terjang PT Freeport Indonesia (PTFI) di Irian Jaya selama kurang lebih 30 tahun merupakan salah satu referensi yang dipakai oleh sejumlah pihak khususnya di Indonesia yang concern terhadap dampak lingkungan sosial budaya. Keberadaan PTFI selalu dikaitkan dengan isu-isu kerusakan lingkungan, marginalisasi dan *miserisasi* (penyengsaraan) orang lokal, militerisasi problem, masalah HAM, keberpihakan hukum, dan serangkaian isu-isu negatif lainnya. Referensi positif juga diperoleh dari PT FI, terutama dari sisi ekonomi. Pada intinya, berbicara mengenai kegiatan ekstraksi mineral, maka semua kepala akan mendongak ke Mimika, tempat dimana PTFI beroperasi.

1.2. Belajar dari pengalaman PTFI merupakan suatu tindakan yang tepat, sebab apa yang terjadi pada masyarakat sekitar daerah kerja PTFI merupakan cermin bagi "muka sendiri" tentang bagaimana suatu kegiatan ekstraktif bernama pertambangan diregulasi sedemikian rupa sehingga "mengabaikan" pengelolaan atas dampak negatif aspek sosial budaya selama kurun waktu hampir 30 tahun terakhir ini. "Panen" dari sistem pengelolaan yang demikian adalah serangkaian problem sosial yang, jangankan memecahkannya, memahaminya saja sulit bukan main!

1.3. Pada kasus PTFI, banyak pihak telah berupaya untuk membantu memecahkan masalah-masalah sosial dan budaya yang

muncul. PTFI berupaya sekuat tenaga untuk membantu memecahkan masalah-masalah sosial kronis yang ada di (terutama) masyarakat lokal. Pemerintah (dalam hal ini Pemda Irja), walaupun "terseok-seok", berupaya "mengimbangi" dinamika persoalan yang ada di wilayah kerja PT FI. Masyarakat di sisi lain juga berupaya untuk keluar dari masalah sosial yang ada dan beradaptasi dengan "derap" pemecahan masalah yang dilakukan oleh pemerintah.

1.4. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa "upaya keras" yang dilakukan oleh ketiga pihak di atas kurang membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Ketegangan sosial di masyarakat (korban dampak) justru meningkat dalam waktu satu setengah tahun terakhir ini. Indikatornya adalah meningkatnya konflik sosial di masyarakat (2 perang "suku"), mudahnya emosi massa meluap, peningkatan secara signifikan baik kuantitas dan kualitas program pengamanan "obyek vital" oleh satuan-satuan militer, kecaman-kecaman dari masyarakat (termasuk gereja dan LSM) terutama tentang program PWT2 yang terkait dengan dana 1%, dan kunjungan KOMNAS HAM ke Timika baru-baru ini. Secara pesimistik, nampaknya problem-problem sosial di Timika dan sekitarnya menjadi semakin rumit untuk dipahami, apalagi dipecahkan.

1.5. Tulisan ini berupaya menyajikan secara singkat beberapa isu penting yang terdapat di wilayah kerja PT FI yang sempat "tertangkap" ketika saya bertugas melakukan suatu kegiatan monitoring dan evaluasi dalam kaitan dengan audit sosial budaya PTFI dalam periode Oktober 1996 sampai Mei 1997.

2. Isu-Isu Pokok

2.1. Dalam upaya memahami persoalan-persoalan kemasyarakatan yang terjadi di wilayah kerja PTFI, beberapa isu pokok yang muncul, terutama setelah Protes Sosial Maret 1996 terjadi. Dalam kenyataan, isu-isu pokok ini ada yang telah menjadi

"cerita lama" namun ada pula yang menjadi "cerita baru". Mungkin pula ada isu-isu yang sudah "kedaluwarsa".

2.2. Isu-isu pokok itu, secara singkat disajikan sebagai berikut:

a. Dana Pembangunan Irian Jaya dari PTFI atau yang dikenal dengan nama "dana 1%" yang kemudian terkait dengan program PWT2.

b. Persepsi yang berbeda antara PTFI, masyarakat, dan pemerintah tentang beberapa pokok soal, terutama yang terkait dengan dana 1% dan program PWT2

c. Isu tentang institusi dan organisasi sosial yang tumbuh di masyarakat dan gejala disintegrasi dalam masyarakat.

d. Isu tentang relokasi penduduk dan rekognisi bagi penduduk di *Tailing Deposition Area* (TDA)

e. Isu tentang sikap penolakan sekelompok masyarakat Amungme yang antara lain berwujud "lawsuit" di pengadilan USA.

f. Isu tentang strategi pemulihan dan penciptaan KAMTIBMAS di sekitar wilayah kerja PTFI.

g. Isu tentang peningkatan status administrasi pemerintahan wilayah-wilayah sekitar kawasan kerja PTFI

h. Isu tentang perubahan-perubahan strategi PTFI dalam pembangunan masyarakat sekitar kawasan kerjanya.

i. Isu tentang rencana ekspansi produksi PTFI dan program penggandaan jumlah karyawan, khususnya karyawan putra daerah Irian Jaya. Dalam isu ini terkait pula penataan sistem promosi karyawan putra daerah.

j. Isu tentang perubahan strategi bisnis PTFI yang telah menghadirkan sejumlah perusahaan "*free rider*" privatisasi.

2.3. Isu-isu ini menunjukkan bahwa persoalan-persoalan sosial yang timbul di Timika dan sekitarnya bukanlah persoalan PT FI semata tetapi juga persoalan pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini haruslah dipahami bahwa persoalan ada pada masing-masing pihak, sehingga pemecahan masalah hendaknya juga berawal dari masing-masing pihak.

2.4. Dalam kasus PTFI, sulit sekali mengatakan bahwa PTFI memiliki persoalan yang lebih ringan dibandingkan dengan pemerintah dan masyarakat. Dalam PTFI sendiri terdapat persoalan manajemen yang berakar pada budaya perusahaan (*corporate culture*), yang dalam banyak hal kurang mendukung upaya-upaya pemecahan persoalan-persoalan masyarakat lokal. Pemerintah sendiri memiliki sejumlah persoalan, terutama hambatan infrastruktur pemerintahan baik sistem organisasi, sarana dan prasarana, maupun sumberdaya. Di sisi masyarakat, terutama masyarakat lokal, terdapat "sejuta" masalah baik yang bersifat fisik dan non fisik. Interaksi dari ketiga pihak ini diyakini dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan sejumlah alternatif pemecahan masalah. Besar kecilnya peluang pemecahan masalah bergantung dari sejauh mana ketiga pihak tersebut dapat menyelesaikan masalah-masalah internal mereka masing-masing. Sebab bila tidak, maka yang akan diinteraksikan adalah problem masing-masing yang justru menghabiskan waktu dan mementahkan persoalan.

3. Dialog Tiga Pihak: Suatu Alternatif Pemecahan Masalah?

3.1. Setelah "puas" belajar dari sejumlah persoalan yang terjadi satu setengah tahun terakhir ini, sejumlah pihak (termasuk pemerintah level atas) menyadari dan merekomendasikan bahwa perlu ada suatu dialog yang terbuka, seimbang, dan transparan sehingga dicapai sejumlah solusi pemecahan masalah. Keinginan ini dirasakan "urgent" karena persoalan-persoalan sosial dapat dikatakan semakin tidak terkendali.

3.2. Keinginan tersebut cukup baik namun sejumlah pertanyaan-pertanyaan haruslah dijawab terlebih dahulu :

a. Siapa-siapa yang secara representatif dijadikan sebagai mitra dialog.

b. Apa materi yang akan didialogkan, terutama apabila dikaitkan dengan status formal ketiga pihak (kontrak karya, prosedur dan gengsi birokrasi, keputusan pemerintah).

c. Apakah ada jaminan bahwa dialog itu akan berjalan seimbang dan setara, saling menghargai, dan bebas dari tekanan dan paksaan.

d. Siapa yang harus bertindak sebagai mediator yang memimpin jalannya dialog: apakah ada kepercayaan yang sungguh-sungguh dari ketiga pihak tersebut?

e. Bagaimana dialog tersebut dilaksanakan dan berapa lama dialog itu harus sudah dapat menghasilkan komitmen yang membantu pemecahan masalah.

f. Di mana dialog itu harus dilakukan?

3.3. Sejumlah pertanyaan dapat diajukan lagi. Tapi, proses dialog harus dilakukan. Tentunya prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat haruslah dipenuhi. Bila tidak, maka apa yang terjadi dalam satu setengah tahun terakhir ini akan terus berulang dan berulang. Keinginan untuk dialog haruslah segera diwujudkan bila kita tidak menginginkan sejumlah korban, terutama masyarakat lokal, berjatuhan lagi.

KOMITMEN SOSIAL PT FREEPORT INDONESIA: TANTANGAN DAN PELAKSANAAN

August Kafiar dan Tim
PT Freeport Indonesia

1. Pendahuluan

Irian Jaya adalah salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar dan merupakan modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan nasional – termasuk untuk kemajuan daerah dan masyarakat Irian Jaya. Potensi kekayaan sumberdaya alam tersebut, yang salah satunya adalah bahan tambang, perlu diolah terlebih dahulu melalui suatu mata-rantai eksplorasi, studi kelayakan sosial/ekonomi, pembangunan infrastruktur, penggalian, pengolahan dan pemasaran, agar dapat memberikan nilai tambah dan keuntungan bagi kita.

PT Freeport Indonesia Company (PTFI) adalah perusahaan penanaman modal asing pertama dalam era pemerintahan orde baru yang memulai investasi dalam bidang pertambangan di Indonesia. Proyek vital nasional ini sesungguhnya memiliki sejarah yang panjang hingga sampai pada bentuknya sekarang ini. Dimulai dari ekspedisi Colijn pada Desember 1936, di mana Jean-Jacques Dozy (seorang ahli geologi Belanda) adalah salah seorang anggotanya, ditemukanlah Ertsberg. Baru pada tahun 1950, Forbes Wilson, manajer eksplorasi Freeport Sulphur membaca laporan yang ditulis oleh Dozy, yang dilanjutkan dengan eksplorasi Erstberg pada tahun 1960. Pada bulan Juni tahun 1996, Tim Freeport diundang oleh pemerintah RI untuk membicarakan kontrak penambangan Ertsberg. Pada bulan Maret 1973, proyek ini diresmikan oleh Presiden Suharto.

 ISBN 979 - 95263 - 3 - 7

Sepuluh tahun sesudah penambangan dimulai, harga tembaga dunia merosot sangat rendah – hanya sedikit di atas ongkos produksi. Keadaan ini tidak banyak berubah sampai pada akhir 1980-an, ketika cadangan Grassberg ditemukan. Pada tahun 1992, kontrak karya II ditandatangani oleh pemerintah dan PTFI yang memberikan hak kepada PTFI untuk beroperasi selama tiga puluh tahun dengan kemungkinan perpanjangan selama dua kali sepuluh tahun.

Menjadi perusahaan pertambangan tembaga dan emas terbesar di Indonesia, bahkan salah satu yang terbesar di dunia, sering menempatkan PTFI pada sorotan media dan publik – baik untuk tujuan-tujuan positif, tetapi tidak sedikit yang bersifat negatif. Hal yang jarang disadari adalah bahwa PTFI beroperasi pada kondisi fisik dan sosial yang sangat kompleks – suatu hal yang diakui oleh berbagai kalangan pemerintah dan non-pemerintah, dari dalam dan luar negeri, yang pernah berkunjung ke Timika dan Tembagapura.

Makalah ini ditulis untuk mencapai tiga tujuan berikut:

a. Memberikan gambaran umum tentang berbagai dimensi sosial dan budaya daerah operasi penambangan PTFI;

b. Memaparkan komitmen sosial PTFI dan pelaksanaan komitmen tersebut bagi pembangunan masyarakat dan daerah Irian Jaya – hal mana merupakan tambahan terhadap kewajiban-kewajiban PTFI bagi pemerintah dan negara Republik Indonesia;

c. Menguraikan tantangan-tantangan dan permasalahan-permasalahan kunci yang apabila tidak ditangani dengan seksama, baik dan jangka panjang, berpotensi menjadi penghambat kemajuan masyarakat dan daerah di mana PTFI beroperasi.

Diharapkan makalah ini dapat dijadikan dasar bagi berbagai diskusi yang akan dikembangkan dalam lokakarya ini. Mudah-mudahan pengalaman dan komitmen sosial PTFI dapat dijadikan masukan bagi pemerintah, kalangan akademisi, dan sekaligus menjadi pembanding bagi perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam pemanfaatan sumberdaya alam pada umumnya, dan sumberdaya tambang pada khususnya.

2. Kondisi Sosial Daerah Pertambangan PTFI: Dahulu, Sekarang dan Kecenderungan di Masa Datang

2.1. Masalah-masalah Demografis dan Kesempatan Kerja

PTFI beroperasi di daerah yang mungkin paling unik di Indonesia. Ketika memulai operasinya, daerah yang dikenal dengan Timika dan Tembagapura sekarang ini masih merupakan hutan dengan perkampungan-perkampungan kecil yang terpencar dan dihuni oleh tidak lebih dari 400 orang penduduk. Tidak ada infrastruktur pembangunan dan fasilitas sosial yang tersedia. Freeport harus memulai operasinya dengan membangun jalan, pelabuhan kota dan pabrik pengolahan, serta infrastruktur lain yang diperlukan. Satu-satunya daerah yang dekat dengan kawasan penambangan hanyalah Lembah Waa yang didiami oleh kurang lebih 50 sampai 100 orang masyarakat setempat (suku Amungme).

Keadaan tersebut telah jauh berubah pada saat sekarang. Dari segi jumlah penduduk saja diperhitungkan penduduk kawasan sekitar operasi penambangan PTFI telah mencapai lebih dari 54,000 orang. Menurut studi yang pernah dilakukan oleh konsultan PTFI, dari jumlah itu diperkirakan 36 persen penduduk adalah orang Irian lokal (termasuk di dalamnya adalah suku-suku Amungme, Kamoro, Sempan dan suku-suku lain dari pegunungan tengah Irian Jaya), 14 persen orang Irian non-lokal, dan sisanya adalah pendatang non Irian.

Perubahan struktur dan kualitas kependudukan akibat migrasi masuk seperti ini mempunyai implikasi sosial yang cukup signifikan. Salah satu di antaranya adalah: terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat marginal yang relatif lebih rendah keadaan sosial-ekonominya akibat urbanisasi – terutama pada masyarakat dari suku-suku yang berasal dari pegunungan tengah Irian Jaya, seperti Dani, Damal, nDuga, Moni dan Me/Ekagi. Para urbanisan dari pegunungan tengah ini memiliki berbagai alasan sahih untuk bermigrasi ke Timika – yang pada dasarnya bertujuan untuk pen-

ingkatan taraf hidup dengan mencoba mencari kerja pada berbagai perusahaan yang ada di Timika, terutama PTFI. Walaupun cukup banyak di antara mereka yang dapat diserap, jauh lebih banyak lagi yang tidak dapat diterima bekerja. Persoalan utama adalah rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan sehingga tidak dapat memenuhi ukuran-ukuran seperti yang disyaratkan oleh industri modern.

Keadaan ini agak berbeda dibandingkan para migran yang berasal dari daerah luar Irian Jaya. Banyak di antara mereka yang bermigrasi ke Timika karena melihat potensi untuk berusaha secara mandiri di bidang lain – termasuk pada sektor informal. Timika dipandang sebagai suatu kota yang terus bertumbuh secara ekonomi, sehingga produk yang mereka hasilkan – baik barang maupun jasa, dapat lebih mudah dipasarkan.

Apabila kegiatan pembangunan (termasuk investasi oleh sektor swasta) masih terbatas di Irian Jaya dan lebih banyak terpusat di daerah pesisir pantai, maka kecenderungan urbanisasi seperti ini akan terus meningkat di masa akan datang. Timika/Tembagapura tampaknya akan tetap menjadi pilihan utama arah migrasi penduduk dari pegunungan tengah (dan daerah-daerah lain di Irian Jaya), kecuali ada kegiatan-kegiatan pembangunan yang secara signifikan meningkatkan kemakmuran dan ketersediaan pelayanan sosial di daerah asal para migran.

2.2. Administrasi Pemerintahan

Pada bulan Oktober 1996 status daerah operasi PTFI yang dahulunya merupakan bagian dari Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Fakfak diubah menjadi suatu Kabupaten Administratif yang diberi nama Kabupaten Mimika dengan ibukota Timika. Selain Mimika, dua kabupaten administratif lain juga dibentuk, yaitu Kabupaten Paniai (ibukota Enarotali) dan Kabupaten Puncak Jaya (ibukota Mulia).

Langkah ini sungguh strategis dan merupakan kemajuan yang sangat signifikan dalam menjawab berbagai permasalahan sosial

yang ada di daerah ini. Di masa awal operasi PTFI, jangkauan pelayanan pemerintah di daerah ini masih sangat terbatas, karena masih berupa Distrik Mimika Timur yang adalah bagian dari Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) Mimika di Kokonau.

Baru pada pertengahan tahun 1970-an, daerah ini ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan. Perubahan ini, dari segi anggaran pemerintah, relatif masih belum dapat mengimbangi percepatan pertumbuhan daerah ini – termasuk dalam hal kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat yang terus bertambah jumlah dan kemajemukannya. Rentang kendali pemerintahan harus dilakukan dari Fakfak yang jauhnya dua jam perjalanan dengan pesawat terbang dari Timika. Keadaan ini terus berlangsung selama jangka waktu kurang lebih dua puluh tahun, sampai pada saat Kabupaten Administratif Mimika diresmikan pada bulan Oktober 1996.

Lemahnya kehadiran dan pelayanan pemerintah di daerah ini mengakibatkan PTFI harus memainkan peranan-peranan sosial yang seyogyanya merupakan kewenangan pemerintah. Selain di daerah Timika dan sekitarnya, tantangan ini lebih terasa di kampung-kampung sekitar Tembagapura di mana PTFI menjadi satu-satunya penyedia jasa pembangunan sosial bagi masyarakat. Walaupun fungsi-fungsi sosial ini dilaksanakan oleh PTFI sebagai perwujudan komitmen sosialnya, namun dalam batas-batas tertentu tidak banyak membantu dalam upaya kita bersama untuk menegakkan kewibawaan pemerintah daerah setempat di mata masyarakat.

Yang mendesak adalah bagaimana secepatnya status Kabupaten Administratif Mimika ditingkatkan menjadi suatu kabupaten otonom dengan semua kelengkapan instansi teknis dan badan perwakilan rakyat (DPRD) sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat lebih ditingkatkan, dan berbagai pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat pula diselenggarakan secara lebih baik kepada masyarakat.

2.3. Dampak kehadiran PTFI

Tidak dapat dipungkiri bahwa situasi sosial yang sedemikian dinamisnya di daerah Timika dan sekitarnya adalah juga diakibatkan oleh kehadiran PTFI. PTFI, dalam kaitan ini, adalah suatu *leading sector* bagi berbagai kegiatan ekonomi di daerah ini – yang menjadi alasan utama mengapa daerah ini menjadi begitu atraktif bagi para migran yang mencari kerja.

Sebagaimana setiap kegiatan pembangunan, baik yang berskala besar maupun kecil, kegiatan penggalian dan pengolahan tambang oleh PTFI juga memberikan dampak terhadap lingkungannya (fisik dan non-fisik), baik yang positif maupun negatif. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh PTFI dalam mengelola dampak-dampak tersebut adalah bagaimana memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkannya. Dampak demografis yang sifatnya "tidak langsung" itu – seperti yang diuraikan di atas – hanyalah salah satu dari sekian banyak dampak yang lain yang sebagian diuraikan berikut ini.

Di bidang ekonomi, PTFI memiliki dampak yang cukup signifikan dalam perekonomian nasional Indonesia. Selain sebagai pengekspor sektor non-migas terbesar dan mampu menciptakan kerja langsung kepada lebih dari 19,000 orang, PTFI adalah salah satu perusahaan pembayar pajak terbesar (pada tahun 1995 merupakan yang terbesar, mengulangi prestasi yang sama pada tahun 1988 dan 1989). Selain dalam skala makro, kehadiran PTFI juga memberikan manfaat yang tidak kecil bagi perekonomian lokal, baik langsung maupun tidak langsung. Selama tahun 1996, PTFI membelanjakan lebih dari 13 milyar rupiah untuk membeli produk-produk lokal seperti sayuran, daging, ikan, kayu, produk-produk yang dihasilkan oleh wirausahawan binaan PTFI melalui program pembinaan pengusaha kecil, dan lain-lain.

Dalam bidang *infrastruktur*, PTFI berperan secara signifikan dalam menyediakan berbagai prasarana pembangunan di Timika yang digunakan juga oleh masyarakat, seperti bandar udara, jalan,

air, dan lain-lain. Selain itu, selama beroperasi di daerah ini, PTFI telah berhasil membangun dua kota secara mandiri: Tembagapura dan Kuala Kencana – lengkap dengan segala fasilitas sosialnya, dan terlibat secara aktif dalam pengembangan kota Timika. Semua infrastruktur ini akan tetap menjadi aset negara, terutama daerah dan masyarakat Irian Jaya, ketika operasi penambangan PTFI selesai.

Kehadiran PTFI juga mengakibatkan terjadinya *perubahan nilai-nilai* dalam masyarakat. Misalnya, sebagai suatu perusahaan yang berorientasi pada profit, PTFI telah mengintroduksi etos kerja industri yang mensyaratkan mutu kerja yang tinggi dengan disertai dengan kompetisi dan kerja keras. Mereka yang dengan cepat mampu mengadopsi nilai-nilai seperti ini akan lebih memiliki peluang lebih besar untuk terserap dan berkembang dalam industri modern.

Selain itu, dalam masyarakat juga tercipta berbagai *aspirasi baru* yang tidak jarang tidak dibarengi dengan kemampuan yang memadai untuk memenuhi aspirasi itu sendiri. Yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan pemahaman masyarakat akan nilai dan pemilikan sumberdaya alam. Di waktu lalu, nilai ekonomi sumberdaya alam sangat rendah dibandingkan sekarang. Demikian halnya dengan konsep mengenai pemilikan sumberdaya. Berbagai klaim yang sering kita temui sekarang pada dasarnya diakibatkan oleh pergeseran-pergeseran pemahaman tersebut.

Dalam bidang *pengembangan masyarakat* di daerah penambangan, PTFI telah banyak berperan. Peranan tersebut diberikan sejalan dengan perkembangan usaha PTFI, yang baru dapat dikategorikan sebagai pertambangan skala besar sesudah Grassberg ditemukan pada akhir tahun 1980-an(lihat bagian pendahuluan dari makalah ini). Secara ringkas, kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh PTFI adalah seperti berikut ini:

- *Kesehatan.* Perhatian PTFI bagi kesehatan penduduk setempat di wilayah proyek sangat besar. Rumah sakit Tembagapura tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan, tetapi juga terbuka

bagi penduduk setempat yang memerlukan pengobatan dan perawatan dengan tidak dipungut pembayaran. Setiap bulannya hampir setengah dari jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit Tembagapura adalah mereka yang dikategorikan "masyarakat" (bukan karyawan dan bukan tanggungan karyawan). Kualitas perawatan yang diberikan pun sama. Sebagai gambaran, selama semester kedua tahun 1996, PTFI mengeluarkan lebih dari 5 milyar rupiah untuk membiayai pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat, termasuk untuk program pengendalian malaria. Selain melengkapi fasilitas Puskesmas di Timika, PTFI juga menjalankan program pengendalian malaria dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan ini dilakukan setiap hari dengan mengirimkan sejumlah *case detection team* ke berbagai lokasi di dataran rendah. Dengan cara seperti ini, lebih dari 80 persen penduduk memperoleh manfaat dari pelayanan ini. Dari keadaan di mana 68 persen penduduk terserang penyakit malaria di tahun 1992, telah berhasil diturunkan hanya menjadi sekitar 6 sampai 8 persen lewat program ini.

- PTFI berkepentingan dengan peningkatan kualitas *Sumber Daya Manusia (SDM)* Irian Jaya, terutama mereka yang berasal dari daerah kerja PTFI, karena SDM yang berkualitas, apalagi yang sesuai dengan bidang kerja PTFI, akan memungkinkan dilakukannya perekrutan secara lokal yang pada gilirannya akan menekan biaya operasi. Ada empat program utama yang dilakukan oleh PTFI: (1) beasiswa; (2) pendirian dan pengoperasian asrama – termasuk mendukung pengoperasian asrama-asrama tertentu; (3) pembangunan gedung sekolah (yang dioperasikan oleh pemerintah) dan dukungan insidental untuk para guru dan penyelenggaraan proses belajar/mengajar; dan (4) *co-op dan management training*. Untuk beasiswa saja, sejak Juli 1996 - Juli 1997 telah dikeluarkan lebih dari 1 miliar rupiah.

- Pembangunan *fasilitas umum dan perumahan rakyat*. Keterlibatan PTFI dalam pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum untuk masyarakat telah banyak dilakukan sejak kehadirannya

di daerah ini. Beberapa yang telah dilakukan antara lain pembangunan bandar udara dan pelabuhan laut, pembuatan dan pengaspalan jalan, gedung sekolah dan asrama guru, gedung-gedung kebudayaan, berbagai fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, kantor-kantor desa, sumur-sumur bor, dan pembangunan/perbaikan perumahan rakyat.

- Pengembangan *ekonomi masyarakat*. Di atas telah dikemukakan bahwa PTFI melakukan pembelian lokal yang cukup signifikan dari penduduk Timika/Tembagapura secara berkala. Selain itu, dilakukan pula program pengembangan pengusaha kecil yang bertujuan untuk menciptakan dan membina wirausahawan lokal yang tangguh dan yang mampu mandiri di masa depan, walaupun kegiatan pertambangan PTFI berakhir. Sejak didirikannya program ini pada tahun 1991 (dulunya dikenal dengan Program Inkubator Bisnis), sebanyak 8 (delapan) wirausahawan lokal telah diluluskan, sementara 8 (delapan) lain masih dalam pembinaan. Mereka terus mengembangkan bisnisnya – baik untuk keperluan PTFI maupun masyarakat pada umumnya. Bisnis yang dijalankan antara lain pembuatan kantong contoh batuan, palet kayu, batu bata, tanaman hias, toko swalayan mini, toko sepeda, jasa penataan lanskap, dan warung telekomunikasi. Selama tahun 19996, sejumlah lebih dari dari 1.8 miliar rupiah telah dibelanjakan PTFI untuk membeli produk-produk dari wirausahawan ini.

3. Komitmen Sosial PTFI: Sekarang dan ke Depan

Apa yang dikemukakan dalam sub bab 2.3 di atas pada dasarnya menggambarkan pola pendekatan PTFI dalam memenuhi komitmen sosialnya di waktu lalu. Sejak lebih dari satu tahun lalu, manajemen PTFI mulai mengambil langkah-langkah penting untuk menata kembali pelaksanaan komitmen sosialnya, termasuk dengan merumuskan ulang Pernyataan Kebijakan PTFI bidang Sosial, seperti berikut ini:

"PT Freeport Indonesia berusaha dengan sungguh-sungguh agar kehadiran dan keterlibatannya dalam pembangunan nasional di Irian Jaya, dan secara khusus di tengah masyarakat sekitar daerah operasi penambangan, mempunyai arti yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan harga diri masyarakat melalui program-program pembangunan yang berkesinambungan dengan keikutsertaan masyarakat sebagai mitra sejajar, serta dengan menghargai hak-hak adat atas tanah dan budaya setempat".

PTFI lebih bersikap pro-aktif dalam merumuskan dan menjalankan berbagai upaya untuk mengejawantahkan pernyataan kebijakan sosialnya seperti yang dikemukakan di atas. Beberapa di antaranya dikemukakan berikut ini:

3.2. Program Pengembangan Wilayah Timika Terpadu (Program PWT2)

Sejak bulan Juli 1995, PTFI mengalokasikan dana pembangunan masyarakat sebesar 1% dari penghasilan kotornya untuk masa sepuluh tahun mendatang. Dana itu disalurkan melalui program Pengembangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2) yang dimulai dan dipimpin oleh pemerintah. Kelembangan PWT2 terdiri dari tiga "tungku" pembangunan: pemerintah, masyarakat, dan perusahaan-perusahaan swasta di Timika – termasuk di dalamnya PTFI. Sejak berlakunya program ini, maka seluruh kegiatan-kegiatan sosial PTFI yang telah dilaksanakan sebelum tahun 1995 dimasukkan dan menjadi bagian dari program PWT2.

Beberapa kegiatan yang masih membutuhkan keterlibatan penuh PTFI seperti program pengendalian malaria dan kesehatan masyarakat, program pembinaan pengusaha kecil, dan sejumlah bantuan beasiswa masih dikelola langsung oleh PTFI sampai pada saatnya di mana pemerintah dan masyarakat siap mengambil alih pengelolaan program-program tersebut. Alokasi dana sebesar 1% pendapatan kotor itu disimpan dalam rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Timika dan diberi nama Dana Freeport bagi Pem-

bangunan Irian Jaya (Freeport Fund for Irian Jaya Development/FFIJD).

Dalam beberapa waktu belakangan ini, Program PWT2 dan FFIJD mendapat berbagai sorotan di beberapa media cetak – bahkan disebut-sebut bahwa "dana Trust Fund 1%" (sebutan salah kaprah untuk FFIJD) merupakan sumber keresahan masyarakat di Timika. Pernyataan seperti ini sesungguhnya adalah suatu penyederhanaan yang justru tidak memecahkan masalah. Program PWT2 dan FFIJD adalah suatu program di mana masyarakat setempat diberikan kesempat seluas-luasnya untuk berpartisipasi mulai dari penyusunan program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian – di bawah bimbingan pemerintah. PTFI sebagai suatu perusahaan swasta diharapkan berperan dalam hal-hal berikut ini: (1) menyediakan dana pembangunan sesuai komitmennya; (2) melaksanakan program-program pembangunan yang belum dapat dilaksanakan oleh masyarakat/pemerintah; dan (3) memberikan bantuan teknis di mana perlu. Walaupun begitu, sebagaimana semua program pembangunan lainnya, Program PWT2 pun banyak mengalami hambatan pada tahun pertama pelaksanaannya. Beberapa yang dicatat, antara lain:

- Masih ada sementara anggota masyarakat/pihak-pihak tertentu yang mengaburkan arti sebenarnya dari FFIJD yang adalah suatu dana pembangunan, dengan mencampuradukkannya/menyebut-nyebut FFIJD sebagai "Dana Perwalian", "Dana (akibat) Kerusuhan", "Dana Ganti Rugi Tanah", dan lain-lain.

- Pada tahun pertama pelaksanaan, sebagian besar dana digunakan masyarakat untuk keperluan pembangunan perumahan yang relatif mahal per unitnya, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang memperoleh manfaat. Keadaan ini didahului dengan pembagian dana sebesar Rp 500 juta, yang disebut-sebut sebagai "dana persukuan" kepada ketujuh suku (Amungme, Kamoro, Dani, Damal, nDuga, Moni dan Me/Ekagi) yang berujung pada terbentuknya pemahaman pada sebagian anggota masyarakat bahwa FFIJD harus dibagi sama rata pada setiap suku – sesuatu hal yang sangat jauh dari konsep awal Program

PWT2 yang mensyaratkan desa (bukan suku) sebagai basis pembangunan. Baik perumahan maupun apa yang disebut "dana persukuan" itu bukanlah merupakan kesepakatan "tiga tungku" PWT2.

- Masalah lain adalah soal representasi masyarakat dalam Program PWT2 dan kesiapan mereka untuk terlibat sebagai pelaku aktif dalam program ini. Perseteruan antara dua kelompok Moni di Timika – masing-masing mengklaim diri sebagai paling berhak mewakili suku Moni – merupakan contoh persoalan representasi masyarakat dalam Program PWT2. Ada banyak kritik yang mempersoalkan tujuan pembentukan berbagai yayasan di Timika. Mungkin sinyalemen bahwa yayasan-yayasan itu dibentuk terutama untuk digunakan sebagai 'kendaraan' untuk memperoleh akses ke FFIJD ada benarnya. Tetapi, persoalannya adalah bahwa PTFI tidak berada pada posisi untuk menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Inilah, barangkali, tantangan yang perlu segera dijawab oleh ketiga "tungku pembangunan" di Timika. Bersama-sama dengan institusi-institusi keagamaan seperti gereja, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, ketiga "tungku" tadi perlu berembug untuk mencari model terbaik bagi pembangunan Timika yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi (lihat Struktur Organisasi PWT2 terlampir).

3.3. Dana Perwalian *(Trust Fund)*

Dana ini dikhususkan untuk masyarakat Amungme dan Kamoro sebagai suku-suku asli daerah kerja PTFI. Berbeda dengan anggapan sementara pihak, dana ini sama sekali berbeda dan terpisah dari "Dana 1%" (FFIJD).

Dana perwalian tersebut merupakan rekognisi tambahan sukarela yang memungkinkan masyarakat Amungme dan Kamoro menjadi pemilik saham perusahaan dan lewat wakil-wakil resminya berpartisipasi dalam rapat pemegang saham. Dana yang

ditawarkan dari kepemilikan saham ini sebesar 500,000 dollar Amerika Serikat setiap tahun yang berlaku selama operasi penambangan PTFI dilakukan.

Dana Perwalian ini telah ditawarkan kepada suku Amungme dan Kamoro. PTFI bahkan mendorong mereka untuk meminta pendapat dan nasihat ahli-ahli hukum independen. Respon masyarakat masih ditunggu oleh PTFI sebelum dana ini dapat diproses lebih lanjut.

3.4. Rekognisi Yang Adil, Sensitif Budaya dan Memberikan Manfaat Jangka Panjang

Untuk menunjang peningkatan kegiatan-kegiatnnya, PTFI membutuhkan sejumalah lahan dengan luasan tertentu. Sesuai dengan peraturan yang ada, untuk setiap keperluan tersebut dilakukan rekognisi kepada kelompok masyarakat yang sumberdaya lahannya digunakan.

PTFI melaksanakan rekognisi itu dalam bentuk serangkaian program dan kegiatan pembangunan yang berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

- sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan didasarkan atas rasa keadilan dan penghargaan atas nilai-nilai budaya masyarakat; dan
- melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat jangka panjang

3.5 Penggandaan Karyawan Asal Irian Jaya

Pada tanggal 13 April 1996, Presiden Direktur PTFI mengumumkan komitmen perusahaan untuk menggandakan jumlah karyawan Irian Jaya dalam lima dan sepuluh tahun mendatang. Komitmen ini tidak ringan, karena yang ingin dicapai adalah tidak hanya menyangkut jumlah karyawan saja, tetapi yang sama pentingnya adalah mutu karyawan Irian Jaya itu sendiri.

Selain melakukan berbagai upaya internal seperti pelaksanaan kebijakan *affirmative action*, peningkatkan ketrampilan karyawan melalui program *apprenticeship*, pelaksanaan program *counterpart*, peningkatan bimbingan dan penyuluhan untuk menekan angka pemutusan hubungan kerja, PTFI juga melakukan dua hal lain untuk mencapai tujuan di atas yaitu beasiswa dan pelatihan ketrampilan prakerja.

Beasiswa kini sebagian besar sudah ditangani langsung oleh Yayasan-yayasan suku. Unit Beasiswa PTFI bekerja sama dengan yayasan-yayasan untuk menjaring sebanyak mungkin para siswa/mahasiswa Irian Jaya, terutama yang berasal dari "tujuh suku" yang menekuni dan berprestasi dalam bidang-bidang keteknikan dengan menawarkan beasiswa kepada mereka.

Selain itu, PTFI juga terlibat dalam memberikan pelatihan dasar kepada sejumlah pencari kerja. Kebijakan yang ditempuh dalam program ini adalah: (a) prioritas diberikan kepada pencari kerja yang berasal dari ketujuh suku di lingkungan penambangan PTFI; dan (b) kriteria penyeleksian diserahkan kepada yayasan-yayasan suku untuk digunakan sebagai dasar dalam merekrut kandidat program pelatihan ini.

3.6. Mendukung Pembangunan di Kabupaten-kabupaten Paniai dan Puncak Jaya

PTFI bertindak pro-aktif dalam ikut memecahkan masalah kependudukan di daerah sumber-sumber migran, terutama di daerah pegunungan tengah Irian Jaya. Cara yang ditempuh adalah dengan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang dilakukan di kawasan-kawasan tertentu di Kabupaten-kabupaten tersebut. Bekerjasama dengan Universitas Cenderawasih, PTFI mensponsori penempatan sejumlah mahasiswa pertanian yang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilanjutkan dengan Praktek Kerja Lapang yang datanya kemudian dipresentasikan pada pihak-pihak terkait di tingkat kabupaten. Rekomendasi yang dihasilkan menunjukkan bahwa pengembangan sayuran

merupakan salah satu kunci pengembangan perekonomian masyarakat, yang pada gilirannya diharapkan akan mengerem laju migrasi ke luar.

3.7. Penelitian Ilmiah untuk Menghasilkan Informasi Dasar bagi Penyusunan Program

PTFI menaruh perhatian besar tentang pentingnya ketersediaan data dan informasi yang dihasilkan oleh para ahli yang kemudian akan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program dalam rangka memenuhi komitmen sosialnya. Dalam banyak hal, PTFI justru menjadi pionir dalam mendorong dan mensponsori terlaksananya penelitian-penelitian ilmiah seperti ini, terutama sejak penelitian sosial kemasyarakatan di daerah Selatan Irian Jaya menurun secara drastis di tahun 1960-an hingga sekarang.

Beberapa kegiatan kerjasama untuk penelitian yang sementara dilakukan, antara lain:

- Survai Penyediaan Data Sosial Dasar (*Baseline Survey*) di Tembagapura dan sekitarnya dan di Timika dan sekitarnya, yang merupakan kerjasama antara Universitas Cenderwasih, Australian National University dan PTFI. Survai ini mencakup dua tahap, masing-masing *social mapping* dan *social monitoring*.
- Penelitian Sosial yang dilakukan oleh Yayasan Sejati sebagai dasar untuk menyusun program jangka pendek dan jangka panjang (termasuk rekognisi) untuk masyarakat Nawaripi - Koperapoka yang sumberdaya lahannya dimanfaatkan untuk pengelolaan pasir sisa.
- Mendukung logistik dan transportasi mahasiswa tingkat akhir dan dosen muda yang berminat untuk melakukan penelitian-penelitian sosial di Timika dan Tembagapura.

4. Penutup

Kebutuhan pembangunan di daerah Timika dan sekitarnya, yang sekaligus pula merupakan areal kerja PTFI, akan terus meningkat sejalan dengan perubahan status administrasinya, pertumbuhan penduduknya, potensi sumberdaya alamnya, dan peranannya dalam pembangunan daerah dan masyarakat. Melalui Program PWT2, PTFI akan terus memberikan kontribusi dalam bentuk pendanaan pembangunan dan bantuan teknis lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memandirikan masyarakat setempat.

Peningkatkan kualitas SDM di Irian Jaya akan terus menjadi perhatian utama PTFI dalam menjalankan komitmen sosialnya, dan akan dijalankan dengan bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat melalui pengembangan program-program pendidikan, pelatihan ketrampilan, penyediaan beasisswa, pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi dan apresiasi budaya setempat.

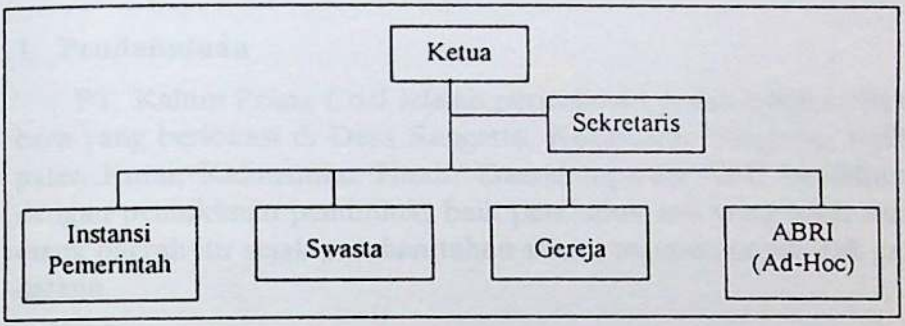
Selain itu, kehadiran pemerintah daerah yang kuat, berwibawa, disegani dan dihormati oleh masyarakat adalah salah satu kunci utama pemecahan berbagai permasalahan sosial yang ada di Timika dan sekitarnya. PTFI selalu berusaha untuk mendukung tercapainya sasaran ini, agar harapan tersebut dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Struktur Organisasi Unit Koordinasi Program dan Unit Pelaksanaan Proyek PWT2

Tim Pembina			
Muspida Tk. I Irja	Gubernur KDH Tk. I Irja	Dirut Swasta	Instansi Pusat

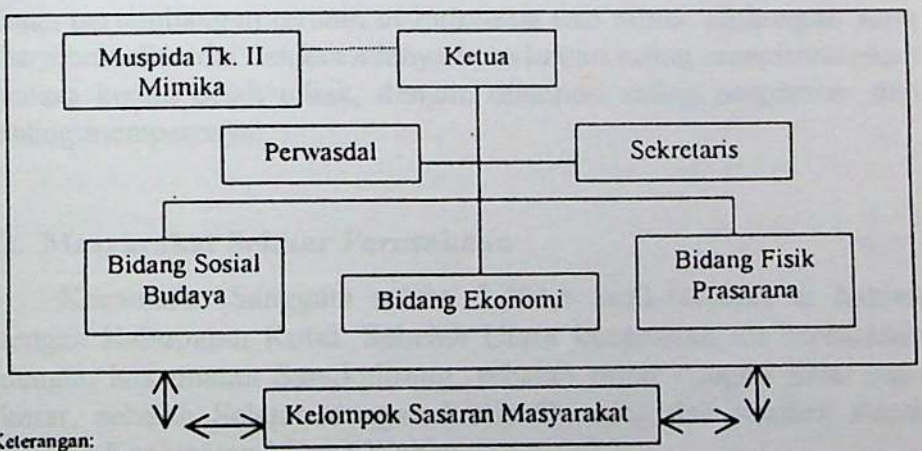
UKP
(Unit Koordinasi Program)





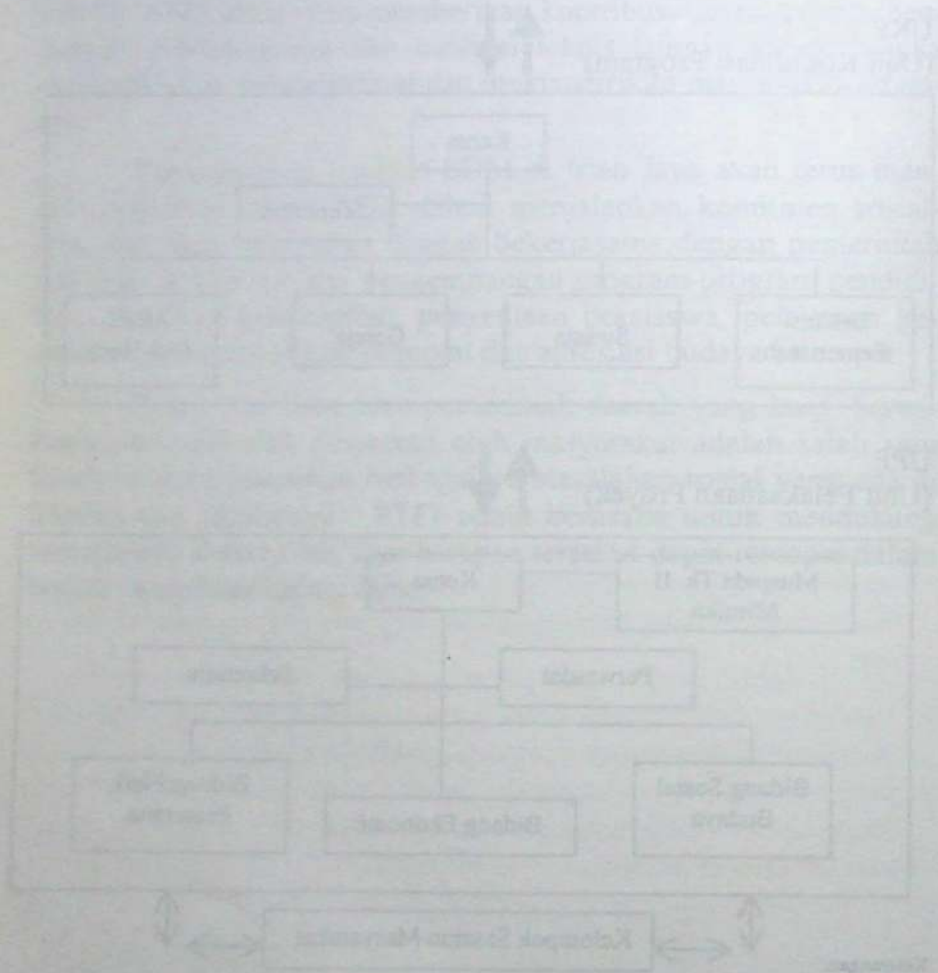
UPP
(Unit Pelaksanaan Proyek)





Keterangan:
- Garis komando
- Garis koordinasi
- Pelaporan

Perwasdal = Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian



PT KALTIM PRIMA COAL DAN MASYARAKAT SEKITARNYA

S. Hadiprayitno
Assistant to Managing Director
PT. Kaltim Prima Coal

1. Pendahuluan

PT. Kaltim Prima Coal adalah perusahaan penambangan batubara yang berlokasi di Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Daerah operasi KPC berdekatan dengan pemukiman penduduk, baik penduduk asli yang telah mendiami daerah itu sejak puluhan tahun silam, maupun penduduk pendatang.

Hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitarnya merupakan salah satu obsesi KPC. Dengan bekal inilah KPC dapat bekerja dengan tenang mewujudkan cita-citanya menjadi perusahaan pertambangan terbaik di Indonesia dan dunia. Hubungan yang harmonis ditandai dengan adanya keterkaitan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dengan dilandasi saling pengertian dan saling mempercayai.

2. Masyarakat Sekitar Perusahaan

Kecamatan Sanggata seluas 7.294,5 km2 terletak di bagian tengah Kabupatan Kutai. Sebelah Utara kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Sangkulirang, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah Selatan dengan Kotip Bontang dan sebelah Barat dengan Kecamatan Muara Wahau.

 ISBN 979 - 95263 - 3 - 7

Tahun 1996 penduduk Kecamatan Sangatta tercatat 37.104 jiwa, tersebar di 12 desa (termasuk empat desa IDT dan empat desa transmigran) dan empat desa persiapan. Desa Sangatta Utara merupakan desa terbesar dengan penduduk 27.105 jiwa atau 73% dari seluruh penduduk Kecamatan Sangatta. Dalam waktu dekat Desa Sangatta Utara akan dimekarkan menjadi lima desa. Jarak dari ibukota kecamatan di Sangatta ke desa terdekat yaitu Rantau Pulung adalah 40 km, sedangkan ke desa terjauh Tepian Langsat berjarak 60 km.

Awal akhir tahun 1970-an Kecamatan Sangatta masih berupa desa kecil yang berpenduduk sekitar 3.000 jiwa. Selain penduduk asli, sebagian mereka umumnya para pendatang yang bekerja pada Pertamina dan perusahaan-perusahaan perkayuan di sekitar Sangatta.

Migrasi penduduk ke Sangatta mulai meningkat pesat pada pertengahan tahun 1980-an, sejalan dengan kegiatan eksplorasi dan persiapan pembangunan sarana tambang yang dilakukan PT. Kaltim Prima Coal. Dalam tempo empat tahun saja dari 1991 sampai 1995, penduduk Kec. Sangatta meningkat sebanyak 71,1% dari 21.453 menjadi 36.703 jiwa, atau naik rata-rata 17,8% per tahun. Angka pertumbuhan ini jauh di atas laju pertumbuhan penduduk Kab. Kutai yang diperkirakan hanya 4,7% per tahun (1990-1998). Kehadiran KPC telah menjadi faktor pendorong terjadinya migrasi penduduk ke Kecamatan Sangatta.

Secara garis besar, penduduk Sangatta dapat diklasifikasikan ke dalam empat katagori: (1) penduduk asli dari etnis Kutai dan Dayak, (2) penduduk pendatang sebelum ada KPC, (3) penduduk pendatang setelah ada KPC, dan (4) transmigran.

Secara geografis, penduduk asli terdapat di Sangatta Selatan dan desa-desa lain di luar Sangatta. Mata pencaharian mereka sebagian besar adalah pertanian. Sangatta Selatan adalah pusat pemerintahan dan perekonomian sebelum ada KPC, namun bela-

kangan pusat kegiatan tersebut bergeser ke Sangatta Utara. Penduduk pendatang pra-KPC juga sebagian besar tinggal di Sangatta Selatan, atau di desa-desa lain di luar Sangatta. Para pendatang pra KPC ini umumnya dari etnis Banjar dan Bugis, juga Jawa, dengan mata pencaharian utama sebagai pedagang, penebang kayu, dan nelayan.

Para transmigran yang berjumlah 4.624 (1995) dan hidup dari pertanian umumnya berasal dari Jawa terdapat di Rantau Pulung, sekitar 40 km dari Sangatta. Sedangkan penduduk pendatang era KPC umumnya tinggal di Sangatta Utara dan Tanjung Bara, dengan mata pencaharian sebagian besar sebagai pegawai swasta, terutama pada kontraktor-kontraktor yang menjadi rekanan KPC.

Secara sosial dan ekonomi terdapat perbedaan yang signifikan di antara keempat katagori penduduk Sangatta tersebut. Para pendatang era KPC umumnya memiliki kehidupan ekonomi yang cukup baik. Tempat tinggal mereka di Sangatta Utara telah tumbuh menjadi kota linier dengan fasilitas sosial yang cukup memadai, termasuk listrik, telepon, jalan-jalan beraspal, taman, sarana olahraga, dan sebagainya.

Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan penduduk asli atau para pendatang terdahulu, yang tinggal di desa-desa di luar Sangatta Utara. Sebagai perbandingan, penduduk desa Keraitan yang terdiri dari etnis Dayak Basab dan Kutai lebih dari 85% masih buta huruf. Di desa ini juga belum ada sekolah dasar. (*Need Assessment Survei* oleh Bethesda, 1996). Kecuali desa transmigran, kondisi masyarakat di desa-desa IDT lainnya di Kec. Sangatta tidak jauh berbeda dengan Keraitan, baik secara sosial maupun ekonomi.

Dari hasil survei *Need Assessment* yang dilakukan Tim Community Development RS Bethesda, Yogyakarta, di Kecamatan Sangatta pada 1996, harapan-harapan masyarakat terhadap KPC terungkap antara lain: (1) bantuan bagi pengembangan usaha kecil, baik aspek manajemen, pemasaran maupun permodalan, (2) bantuan

di bidang pendidikan termasuk pembangunan sekolah lanjutan dan pemberian bea siswa, (3) pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas umum, (4) bantuan untuk tempat-tempat ibadah dan sekolah keagamaan (madrasah), dan (5) penataan ulang tata ruang kota Sangatta.

Survei ini juga merekomendasikan kelompok-kelompok sasaran yang perlu mendapat perhatian khusus dari KPC, antara lain : (1) kelompok marjinal di Sangatta Utara dan Selatan, dan (2) masyarakat miskin penghuni desa-desa IDT.

3. PT KPC dan Visi Pengembangan Masyarakat

PT. Kaltim Prima Coal adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia berstatus PMA yang berdiri pada tahun 1982. Dasar hukum operasi KPC adalah kontrak kerjasama batubara yang ditanda tangani tanggal 8 April 1982 antara KPC dan Pemerintah Indonesia, berlaku selama 30 tahun. Lokasi penambangan KPC terletak di Desa Sanggata, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur.

Eksplorasi KPC di Kalimantan Timur dimulai pada tahun 1982. Tahun 1989 mulai dibangun sarana dan prasarana pertambangan, dan selesai September 1991. Produksi komersial dimulai pada awal 1992, dengan jumlah 7 juta ton per tahun. Tahun ini produksi KPC akan mencapai 13,5 juta ton. Total investasi KPC sampai Agustus 1997 tercatat 941,2 juta dolar AS.

Per Agustus 1997 ini KPC mempekerjakan 2.672 karyawan Indonesia dan 82 karyawan asing. Sebanyak 67,4% dari seluruh karyawan Indonesia direkrut di Sangatta dan 21,9% lainnya direkrut di Bontang, Samarinda, dan Balikpapan. Secara keseluruhan, tenaga kerja KPC yang direkrut di Kalimantan Timur mencapai 89,1%. Di Sangatta juga terdapat sekitar 2.500 karyawan yang bekerja pada kontraktor-kontraktor rekanan KPC.

Program pengembangan masyarakat merupakan salah satu prioritas utama KPC, sebagaimana tertulis dalam visi perusahaan yang menegaskan bahwa "KPC akan hidup berdampingan secara harmonis dengan masyarakat setempat dan akan terus mendukung mereka, sambil mengembangkan sikap-sikap seperti yang ditanamkan di lingkungan perusahaan, yaitu sikap mandiri, menjaga martabat dan bertanggung jawab".

Wujud nyata dari perhatian ini adalah dibentuknya Departemen Pengembangan Masyarakat dan Hubungan Eksternal yang dipimpin seorang manajer. Depertemen ini memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik yakni merencanakan, mendesain, dan menjalankan program-program pengembangan masyarakat serta membina dan mengembangan hubungan dengan pihak-pihak eksternal, seperti pemerintah daerah dan LSM.

Visi KPC mengenai masyarakat masa depan adalah tercapainya (1) sikap kemandirian (*self-reliance*) masyarakat sehingga bisa menolong dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada siapapun, termasuk perusahaan; (2) pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat sehingga memungkinkan mereka memiliki keahlian atau mendapatkan pekerjaan yang layak; dan (3) terjalinya kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, pemerintah, LSM dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

4. Pokok-pokok Program

Program pengembangan masyarakat yang dijalankan KPC secara garis besar difokuskan pada tiga bidang utama, yaitu: (1) pengembangan infrastruktur baik fisik maupun sosial; (2) pembinaan dan pengembangan usaha-usaha kecil; dan (3) program khusus pengembangan desa-desa IDT. Dalam organisasi pelaksanaannya ketiga bidang program ini masing-masing ditangani oleh seorang *superintendent*.

Beberapa program yang sudah direalisasikan dan sedang berjalan (1997) antara lain:

A. Bidang pengembangan infastruktur sosial:

- Pembangunan gedung SMA negeri Sangatta dan training bagi 36 guru;
- Pembangunan ruangan tambahan dan peralatan belajar SD Teluk Lingga dan Sangatta Utara;
- Pembangunan gedung Puskesmas serta perumahan dokter dan paramedis;
- Pembangunan Balai Desa Sepaso;
- Pembangunan jalan pemukiman di beberapa kampung Desa Sangatta;
- Penyediaan air bersih dan tangki penampungannya rata-rata 250.000 per hari;
- Pelayanan dan pemeriksaan kesehatan ke daerah-daerah terpencil;
- Operasi bibir sumbing (interplast);
- Bantuan untuk pembangunan sarana-sarana peribadatan;
- Pembangunan pos-pos pengawasan hutan;
- Pembangunan rumah untuk guru-guru SD;
- Pembangunan perumahan dan kantor Pembantu Koramil.

B. Bidang pengembangan usaha kecil:

- Pelatihan dan pendanaan untuk usaha pertukangan;
- Pelatihan dan pembinaan manajemen usaha-usaha pertanian dan perikanan;

- Bantuan pembukaan akses pasar untuk produk-produk pertanian;
- Loan guarantee untuk pengusaha-pengusaha kecil.

C. *Bidang pengembangan desa IDT*:

- Pembangunan areal persawahan seluas 200 hektar, termasuk bantuan pekerjaan fisik, penyediaan bibit, pemupukan dan peningkatan keterampilan (sedang berjalan).
- Pelatihan kader-kader KSM untuk pengelolaan dana IDT;
- Pemberian insentif bagi guru-guru SD di daerah terpencil;
- Bantuan pengadaan bibit jahe gajah;
- Pelayanan kesehatan dan faksinasi.

Program pengembangan masyarakat idealnya dilakukan bersama-sama antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi. Namun, nampaknya masih perlu waktu untuk mewujudkan sebuah program yang betul-betul bersifat *bottom-up*, yang berasal, dirancang, dijalankan, dan digunakan oleh dan untuk masyarakat sepenuhnya.

Dalam menjalankan programnya selama ini KPC bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat setempat, serta sejumlah LSM, baik dalam perencanaan program, pelaksanaan maupun pendanaannya. KPC juga terus melakukan upaya-upaya untuk menampung dan mengidentifikasikan aspirasi masyarakat, antara lain melalui diskusi intensif dengan tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa penelitian dari sejumlah perguruan tinggi dan lembaga lain terhadap masyarakat Sangatta.

5. Permasalahan

Beberapa permasalahan pokok yang dapat diidentifikasikan berkaitan dengan program pegembangan masyarakat dan pembinaan hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

A. Heterogenitas masyarakat

Keanekaragaman penduduk Sangatta menjadi masalah terutama dalam kaitannya dengan penentuan kelompok sasaran *(target audience)* dalam program pengembangan masyarakat. Tidak mudah untuk melibatkan seluruh segmen masyarakat dalam program perusahaan untuk pengembangan masyarakat, mengingat beberapa keterbatasan termasuk tenaga, waktu, pendanaan, dan sebagainya.

Namun, juga tidak telalu mudah untuk memilih kelompok-kelompok tertentu sebagai sasaran pengembangan masyarakat, mengingat masing-masing kelompok memiliki posisi yang spesifik dalam strata masyarakat Sangatta secara keseluruhan. Kekurangtepatan dalam memilih dan menentukan kelompok sasaran bisa berakibat timbulnya kecemburuan dari kelompok masyarakat yang lain. Pendekatan khusus terhadap penduduk asli *(indigenous people)* menjadi kurang relevan di Sanggata, mengingat populasi penduduk asli di daerah ini kini jutsru merupakan minoritas dengan jumlah tak lebih dari 1.000 jiwa.

Strategi KPC selama ini adalah memilih bidang-bidang garapan yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum, seperti jalan, sekolah, sarana air bersih, sarana peribadatan dan fasilitas kesehatan. Pemilihan strategi seperti ini memiliki resiko kecil untuk terjadinya penolakan dari masyarakat atas program sosial perusahaan. Namun sebaliknya bisa jadi program yang dipilih bukan merupakan kebutuhan paling mendasar yang sedang dihadapi masyarakat.

B. Harapan yang berlebihan

Masyarakat umumnya beranggapan bahwa perusahaan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam setiap aspek pembangunan. Sehingga seberapa besar pun yang sudah dilakukan perusahaan untuk membantu pengembangkan masyarakat, masih saja dinilai kurang. Masyarakat bahkan cenderung melihat perusahaan sebagai sumber pendanaan permanen, yang harus bersedia setiap saat dalam membiayai kegiatan-kegiatan masyarakat.

Anggapan ini boleh jadi muncul akibat minimnya pengetahuan masyarakat akan kaidah-kaidah yang harus dipegang perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya. Karena itu, penting untuk memberikan penjelasan yang terus-menerus dan logis kepada masyarakat, bahwa dalam menyusun dan menjalankan programnya perusahaan bukan semata-mata memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, tetapi juga kepentingan pemerintah, karyawan, pemegang saham dan konsumen.

Fenomena lain yang menandakan besarnya harapan masyarakat terhadap KPC belakangan ini adalah munculnya orang-orang tertentu yang mencoba mendapatkan keuntungan dari ganti rugi tanah. Sejumlah orang yang diketahui persis tidak berlatar belakang petani mecoba mengklaim wilayah-wilayah konsesi KPC dengan harapan mendapatkan ganti rugi. Cara ini cenderung dipercaya masyarakat sebagai upaya mendapatkan keuntungan yang cepat dan nyata dari kehadiran perusahaan.

C. Lemahnya pranata sosial

Masyarakat Sangatta pada dasarnya merupakan komunitas baru yang berusia kurang dari 15 tahun. Arus pendatang ke Sangatta mengalir deras sejak KPC memulai pekerjaan fisik dan produksi komersialnya. Dalam usia semuda itu, komunitas Sangatta belum memiliki lembaga-lembaga sosial maupun adat yang tumbuh dari dan mengakar kuat ke bawah. Yang ada adalah lembaga-

lembaga formal seperti LMD dan LKMD, atau lembaga-lembaga lain yang dibentuk berdasarkan kesamaan etnis atau asal daerah.

Kondisi ini membuat KPC kesulitan dalam menemukan "kendaraan" yang dapat digunakan dalam mejalankan program pengembangan masyakakat, sehingga mampu menjangkau kebutuhan dasar masyarakat yang sesungguhnya dan diterima tanpa prasangka yang negatif.

D. Kualitas sumberdaya manusia

Pengembangan masyarakat membutuhkan sejumlah sumberdaya manusia dengan kualifikasi tertentu. Kualifikasi khusus ini bukan hanya dibutuhkan dari sisi perusahaan, tapi juga dari sisi pemerintah dan masyarakat sendiri sehingga bisa terjalin sebuah hubungan segitiga yang saling melengkapi dan seimbang.

Harus diakui bahwa KPC masih terus belajar untuk meningkatkan kualitas SDM-nya sehingga bisa mengembangkan program-program CD secara benar. Namun kurangnya pengetahuan dan belum siapnya kader-kader di masyarakat untuk menerima dan menjalankan program CD juga menjadi hambatan tersendiri.

Bagi perusahaan, kondisi ini berarti sebuah tantangan untuk menjalankan program pengembangan masyarakat mulai dari tahap yang paling dini, yakni penyiapan sumberdaya manusia, misalnya melalui pelatihan-pelatihan, studi banding, seminar maupun lokakarya. Ini berarti pula bahwa masyarakat masih perlu menanti lebih lama untuk merasakan manfaat nyata dari kehadiran sebuah program CD.

6. Badan Koordinasi

Dari pengalaman melaksanakan program pengembangan masyarakat selama ini, masalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait nampaknya perlu menjadi perhatian utama. Koordinasi yang dimak-

sud bukan hanya dalam bentuk komunikasi program dan pertemuan-pertemuan temporer seperti yang selama ini dilakukan dengan instansi pemerintahan, tapi dibakukan dalam sebuah institusi yang diberi kewenangan jelas dan tegas.

Perkembangan Desa Sangatta dewasa ini yang cenderung semakin kompleks dan tidak terkendali, diyakini sebagai akibat tidak adanya sebuah badan yang khusus menangani perkembangan ini. Tahun 1989 KPC bersama Pemda Tk. II Kutai telah menyusun rencana umum tata ruang Sangatta dan sekitarnya, yang ternyata dalam operasionalnya sangat sulit untuk dilaksanakan.

Berangkat dari kenyataan ini, perlu dipertimbangkan untuk membentuk sebuah Badan Perencana Pembangunan Kecamatan (Semacam Bappeda di tingkat Kecamatan) yang bertugas secara khusus menangani aspek-aspek pembangunan kecamatan, baik di bidang sarana dan prasarana fisik, sosial, ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Di dalam badan ini terdapat perwakilan dari masyarakat, pemerintah, KPC dan perusahaan-perusahaan lain yang ada di Sangatta. Badan ini merencanakan dan meninjau ulang seluruh tata ruang dan aspek-aspeknya, termasuk merumuskan strategi-strategi dan menggali potensi yang mungkin dapat dikembangkan pasca kegiatan pertambangan (*post mining activities*).

Bersama lembaga ini pula KPC berharap dapat mendesain dan menjalankan program-program pengembangan masyarakat yang tepat, sehingga mampu melahirkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

7. Kesimpulan

Pertama, KPC memiliki komitmen yang nyata untuk membantu mengembangkan masyarakat Kecamatan Sangatta, terutama mereka yang secara sosial ekonomi paling terbelakang termasuk masyarakat yang tinggal di desa-desa IDT.

Kedua, dalam menjalankan program pengembangan masyarakat diperlukan bantuan dan dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat, serta perlu adanya saling pengertian mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Ketiga, KPC berkeyakinan bahwa kerjasama yang telah terjalin antara perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah selama ini akan lebih membuahkan hasil yang optimal jika dilembagakan dalam bentuk Badan Perencana Pembangunan Kecamatan Sangatta atau lembaga lain yang memiliki fungsi serupa.

GAMBARAN PROGRAM DAN STRATEGI UMUM YANG DITETAPKAN OLEH COMMUNITY RELATION DEPARTEMEN PT. KELIAN EQUATORIAL MINING

Jenny A Zebedeus
PT Kelian Equatorial Mining

1. Latar Belakang

PT. Kelian Equatorial Mining (PT. KEM) memulai produksi di area Prampus sejak Januari 1992. Dimana lokasi ini merupakan bagian dari Desa Kelian Dalam, Kecamatan Long Iram. Setelah PT. KEM beroperasi secara regular pada tahun tersebut, hubungan dengan masyarakat banyak terjadi baik dalam bentuk konflik, maupun diskusi.

Untuk mencapai Visi yang telah dicanangkan "kami hidup serasi/harmonis dengan masyarakat sekitar" sejak awal PT. KEM telah mempunyai Community Relation Departement (Departemen Hubungan Masyarakat) yang banyak menangani masalah-masalah penyelesaian kegiatan kompensasi tanah bersama-sama dengan Tim Tingkat Kabupaten dan Kecamatan; dan pada awal 1994 PT. KEM melihat bahwa kegiatan yang selama ini dilaksanakan belum menjangkau masyarakat secara luas tetapi hanya secara individu. Barulah pada awal tahun 1995 diputuskan untuk melakukan program-program yang dapat menjangkau masyarakat secara umum dan dapat berdampak secara merata serta berkesinambungan.

Menyadari akan keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat yang cukup banyak jumlah desanya dan jangka waktu operasi yang pendek maka perusahaan harus melakukan sesuatu kegiatan yang dapat dirasakan langsung dan melibatkan masyarakat sendiri, pada saat ini keadaan masyarakat banyak bergantung kepada perusahaan untuk membangun dirinya kurang menyadari potensi yang mereka miliki sendiri, maka program-program yang

hendak dilaksanakan harus program yang banyak melibatkan masyarakat dalam setiap proses pelaksanaan, mulai dari persiapan, perencanaan, pembangunan dan pemeliharaannya dengan harapan setelah PT. KEM tidak berada di lokasi ini lagi masyarakat dapat tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunannya tanpa harus tergantung pada orang lain.

2. Tujuan Umum

Dalam suatu daerah yang sedang berkembang terdapat siklus keadaan yang merupakan suatu lingkungan yang tak berujung dan dapat menghambat perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Secara sederhana lingkaran itu dapat digambarkan seperti ini; dari keadaan sosial ekonomi rendah yang mengakibatkan ketidakmampuan dan ketidaktahuan ini mengakibatkan produktivitas secara umum juga rendah, produktivitas yang rendah membuat keadaan sosial ekonomi semakin rendah dan seterusnya.

Menyadari akan keadaan tersebut di atas maka program-program yang akan dilaksanakan harus dapat memanfaatkan dinamika, potensi dan kondisi yang ada untuk dikembangkan, dimana potensi tersebut memang sudah berada di dalam masyarakat itu sendiri sehingga mereka mampu bertahan hidup, tetapi potensi itu belum dimanfaatkan secara maksimal oleh mereka.

Dilihat dari uraian sebelumnya maka PT. KEM dalam hal ini Departemen Hubungan Masyarakat (Community Relation Departement) mempunyai tujuan inti yang hendak dicapai dalam melaksanakan programnya, yaitu :

- Menciptakan lingkungan yang serasi antara PT. KEM dan Masyarakat, keberadaan perusahaan diterima baik oleh pemerintah setempat, masyarakat dan lain-lain sebagai mitra dalam pembangunan.
- Keberadaan operasi Perusahaan memberikan keuntungan kepada masyarakat yang lebih luas di daerah ini dan tidak terbatas pada karyawan KEM atau Kontraktor saja, dan keuntun-

gan ini berlanjut dalam jangka waktu lama setelah tambang ditutup.

- KEM dipandang oleh pemerintah setempat, masyarakat dan LSM sebagai warga perusahaan yang bertanggung jawab dan diterima sebagai anggota masyarakat setempat.
- Membantu masyarakat untuk mengetahui potensi mereka yang dapat digunakan dalam pengembangan diri mereka sehingga tak perlu tergantung sepenuhnya kepada perusahaan, terutama rasa kegotong-royongan.

3. Program-program

Menyadari akan keterbatasan yang dimiliki oleh baik tenaga, jangkauan ruang lingkup keterlibatan yang dapat dilakukan perusahaan terhadap masyarakat sekitar, maka dipilih beberapa kegiatan yang dirasakan dapat melibatkan peranan masyarakat dalam setiap proses tahapan kegiatannya dan juga kegiatan yang tanpa mengikutsertakan masyarakat dalam proses tahapannya. Program-program yang dipilih adalah :

1. Program Pengadaan Air Bersih dan Sanitasi

Kegiatan yang diadakan adalah : pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dengan sistem tepat guna, sesuai dengan kondisi di desa tersebut. Sampai dengan saat ini telah diterapkan 3 sistem, yaitu : Sistem Gravitasi, Sistem Hydram dan Sumur Gali. Saat ini lokasi program ini baru dapat dilaksanakan di 2 Kecamatan saja.

2. Program Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah, Asrama, Puskesmas/ Pustu/Polindes

Kegiatan yang diadakan adalah penambahan bangunan atau membangun gedung baru untuk asrama, Polindes, sekolah ataupun Puskesmas. Saat ini program baru dapat dilaksanakan di 2 Kecamatan.

3. Program Hubungan Masyarakat (Community Ralation)

Kegiatan yang dilaksanakan sangat bervariasi pada program ini dan lokasi daerah pun mencakup 4 kecamatan, antara lain kegiatan yang dilaksanakannya adalah :

- Kunjungan masyarakat ke PT. KEM dan PT. KEM ke masyarakat.
- Pengadaan Bus anak sekolah di sepanjang jalan Tutung sampai dengan Jelemuq atau Tering Sebrang.
- Bea siswa bagi anak SD sampai dengan SMA.
- Pembagian majalah "ASYIK" tentang Lingkungan dan Kesehatan bagi anak SD.
- Kepedulian terhadap kesehatan, kegiatan ini lebih dikenal dengan nama POSYANDU, tetapi sasaran proyek adalah anak sekolah (proyek sampai dengan Desember 1997).
- Bekerjasama dengan Rumah Sakit Terapung "Dr. Soewondo" untuk operasi gondok, hernia, dan lain-lain.

4. Strategi yang Diterapkan

Dilihat dari tujuan dan program yang dilaksanakan, maka pelaksanaan program dapat dibagi dalam dua bentuk strategi :

1. Masyarakat aktif terlibat dalam program-program yang diadakan.

Di dalam strategi ini masyarakat sasaran tidak hanya diperankan sebagai *obyek* dari kegiatan, tetapi lebih daripada itu, masyarakat diperankan sebagai *subyek* dari kegiatan yang dilakukan. Artinya masyarakat selalu dilibatkan dalam semua tahapan kegiatan serta diberikan kesempatan untuk memutuskan dan melaksanakan semua keputusan yang telah diambil, dengan satu harapan, bahwa sarana atau hasil dari kegiatan yang telah dilakukan tetap

bisa berlangsung/dipertahankan. Untuk melaksanakan strategi ini, program pembangunan fisik (bangunan) adalah sangat baik.

Untuk melakukan strategi tersebut ada empat tahapan :

Tahap Persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Informasi dan koordinasi dengan pemerintah
b. Pemilihan lokasi
c. Pertemuan dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat
d. Pertemuan dengan masyarakat.

Tahap Perencanaan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Studi kelayakan tentang potensi
b. Membuat desain teknis serta perhitungan RAB
c. Pembentukan Panitia Pembangunan
d. Pertemuan untuk mendapatkan kesempatan tentang kontribusi masyarakat

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Pelatihan managemen dan teknis untuk panitia
b. Pembuatan rencana kegiatan masyarakat
c. Pembelian serta penyediaan material yang dibutuhkan
d. Kontruksi bangunan

Tahap Pemeliharaan

Pada tahap ini kegiatan lebih ditekankan agar masyarakat mampu untuk memelihara sarana yang telah dibangun, kegiatannya antara lain :

a. Pembentukan Himpunan Pengelola Sarana (HPS) bagi sarana yang akan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat atau diserahkan kepada instansi yang terkait.
b. Pelatihan bagi HPS tentang cara-cara pengoperasian dan pemeliharaan sarana yang telah diberikan.

c. Pembuatan aturan pemeliharaan bagi semua pemakai sarana.
d. Serah terima dengan masyarakat atau instansi terkait.

2. Masyarakat kurang dilibatkan secara aktif dalam setiap proses tahapan kegiatan, semua perencanaan dan pelaksanaan kegiatan seluruhnya dibuat antara PT. KEM dengan mengkoordinasikannya kepada pemerintah setempat, masyarakat hanya menjadi subjek dari kegiatan program saja. Contoh kegiatan ini adalah :
   - Operasi Katarak, gondok
   - Gerakan Orang Tua Asuh

5. Masalah-masalah

Di dalam melaksanakan program-programnya, PT. KEM tidak langsung mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat, saya ingin mencoba merinci masalah yang pernah dan sering dihadapi pada waktu pelaksanaan program :

- Pada awal projek (tahun 1995) sambutan masyarakat tidak percaya bahwa perusahaan akan benar-benar membangun sarana-sarana di desa mereka.
- Mengapa perusahaan yang mempunyai uang harus meminta kontribusi dari masyarakat untuk mendirikan sarana tersebut.
- Tidak adanya staf lapangan yang mengerti dan mempunyai pengalaman pengembangan masyarakat di masyarakat lokal.
- Staf lapangan yang masih muda, harus bernegosiasi dengan masyarakat kadang membuat mereka sungkan dan tidak dianggap oleh tokoh-tokoh masyarakat.
- Dalam pertemuan awal biasanya mereka kelihatan bersemangat untuk mengadakan gotong-royong, karena dalam perkiraan mereka kegiatan ini hanya akan berlangsung dalam waktu yang pendek saja, tetapi setelah berjalan biasanya mereka menga-

lami masa staknasi, dan hal ini perlu diberikan motivasi kembali.

- Mencoba-coba untuk berhenti agar perusahaan memberikan biaya tenaga kerja.
- Waktu-waktu sibuk (masa tanam, panen, banjir, bekerja di ladang, pesta perayaan di desa) masyarakat kadang menjadi alasan untuk tidak gotong-royong.
- Pengalaman tokoh-tokoh masyarakat yang merasa lebih tau sering membuat pekerjaan lambat dan hasil tidak seperti yang direncanakan.

6. *Lesson Learn*

Bekerja sama dengan Pemerintah setempat.

Keuntungan :

- Mendapatkan dukungan moril untuk melaksanakan program di desa-desa.
- Jika ada masalah dengan tuntutan dari masyarakat maka pemeritah setempat akan membantu menyelesaikannya.
- Program yang dilaksanakan tidak tumpang tindih di desa-desa.
- Pelaksanaan program yang sama bisa saling melengkapi.

Kerugian :

- Program yang dilaksanakan kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.

Gotong Royong

Keuntungan :

- Mempunyai waktu yang cukup panjang untuk berdiskusi dan menerangkan kepada masyarakat tentang perusahaan.

- Secara tidak langsung memberitahukan kepada seluruh masyarakat akan adanya kontribusi perusahaan untuk pengembangan masyarakat sekitar.
- Mengajar masyarakat untuk menyadari dan memanfaatkan kemampuan yang mereka miliki.
- Menambah pengetahuan mereka dalam berorganisasi dan kontruksi.
- Mengurangi ketergantungan mereka terhadap perusahaan.
- Rasa memiliki (mau merawat dan menjaga kebersihan) akan sarana yang dibangun oleh mereka sendiri cukup besar (Sustainability project).
- Mereka mempunyai kebanggaan tersendiri apabila sarana yang dibangun itu telah selesai.

Kerugian :

- Memerlukan waktu yang lebih lama dari biasanya.
- Bentuk bangunan gotong royong tidak seperti yang diharapkan.
- Perlu mengajarkan berulang-ulang.

7. Hasil yang Telah Dicapai

No.	Kegiatan	Hasil
1.	Program Pengadaan Air Bersih	17 Desa
2.	Rehabilitasi /Penambahan Gedung	13 Desa
3.	Kunjungan masyarakat ke PT. KEM	1 kali/bulan
4.	Kunjungan PT. KEM ke masyarakat	1 kali/bulan
5.	Bea Siswa	250 siswa
6.	Majalah "ASYIK"	1 kali/2 bulan
7.	Kepedulian Kepada Kesehatan	10 Desa
8	Operasi gondok	4 kali/tahun
9.	Operasi katarak	tergantung pasien

AREA OF WORK

NAME OF SUB-DISTRIC	NO. OF VILLAGES	NO. OF PEOPLE
Long Iram	**35***	**28,292**
Barong tongkok	**24**	**18,198**
Melak	**22**	**18,126**
Damai	**19**	**11,198**

* Has been devided in 2 Sub-District since 1996.

PENGALAMAN PT INCO DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH BERSAMA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT SEKITARNYA

Andre Daenuwy
Vice President, Government Aff,
Public and Shareholder Relations

Eddie Arsyad
Manager Government and Public Relations

1. Profil Perusahaan

PT. INCO adalah perusahaan Penanaman Modal Asing yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan bijih Nikel di Kawasan Timur Indonesia, yaitu di Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan.

Kontrak karya antara PT. INCO dengan Pemerintah Republik Indonesia ditanda-tangani pada tanggal 27 Juli 1968. Produksi secara komersial baru dimulai pada tahun 1978 sebagai awal dari perhitungan masa berlakunya 30 tahun kontrak karya. Perpanjangan dan modifikasi kontrak karya yang berlaku sampai tahun 2025 telah ditandatangani antara PT. INCO dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 1996.

Daerah kontrak karya PT. INCO terletak di tiga propinsi yaitu propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi luas total wilayah 218.000 Ha. Kegiatan operasional saat ini sejak dimulainya produksi komersial berada di Kecamatan Nuha Daerah Tingkat II Luwu sekitar 600 Km sebelah timur laut Ujung Pandang dengan wilayah penambangan di daerah Soroako berkisar 10,000 Ha. Kapasitas produksi pada saat ini PT. INCO dalam tahap perluasan peningkatan kapasitas produksi menjadi 150 juta pon per tahun yang mencakup

penambahan jalur ke empat produksi dan pembangunan PLTA di sungai Larona.

Produksi PT. INCO berupa nikel matte dengan kandungan 78% Nikel, 1% Kobalt dan 20% Sulfur dalam bentuk butiran yang seluruhnya di ekspor ke Jepang. Setelah "Go Public" pada bulan Mei 1990, kepemilikan saham PT. INCO adalah 58,7% INCO Limited Canada, 20,1% Sumitomo Metal Mining, 20% pemegang saham dalam negeri dan selebihnya dimiliki oleh beberapa perusahaan Jepang lainnya.

Makalah ini akan menguraikan PENGALAMAN PT. INCO DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH BERSAMA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT SEKITARNYA yang diharapkan dapat menjadi bahan tambahan dalam Workshop "Mencari model pemecahan masalah hubungan antara industri pertambangan dengan masyarakat sekitar" yang diadakan di Yogyakarta oleh Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gadjah Mada.

2. Pendahuluan

Dari awal keberadaan di Indonesia, PT. INCO sudah melihat betapa pentingnya membangun hubungan yang erat dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Usaha untuk membentuk hubungan yang erat ini sangatlah penting dijalin seawal mungkin dimana perusahaan mulai mengembangkan usahanya.

PT. INCO sudah menanam usahanya dengan inisiatif yang tinggi dalam pengembangan masyarakatnya. Perusahaan membiayai 60 km jalan aspal yang menghubungkan pelabuhan Malili ke pusat industrinya di pabrik. Bersamaan dengan itu menggerakkan pengembangan ekonomi di daerah-daerah yang terpencil dengan mengijinkan jalan proyek untuk dimanfaatkan bersama dengan masyarakat secara umum.

Pembangunan PLTA Larona oleh perusahaan yang memerlukan energi untuk menunjang pabrik pengolahan, yang juga sangat

bermanfaat untuk masyarakat di daerah sekitar. Perusahaan memberikan bantuan untuk masyarakat sekitar melalui rumah sakit dan pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga lanjutan atas, dilanjutkan dengan pendidikan politeknik D2.

PT. INCO telah membangun rumah sakit dengan 42 tempat tidur pada tahun 1977 yang dilengkapi dengan dokter bedah, dokter kandungan, dokter anak, radiolog, dokter gigi dan dokter umum. Bantuan kesehatan untuk masyarakat sekitar yang kurang mampu diberikan melalui rumah sakit ini.

Pertanian merupakan salah satu bagian dari kehidupan masyarakat sekitar di daerah ini. PT. INCO membiayai program pendayagunaan lahan dengan membawa ahli pertanian dari Balitan Maros untuk membantu petani lokal untuk meningkatkan pengolahan tanah dan panen yang baik. Program ini telah menghasilkan peningkatan padi rata-rata 3 ton per Ha. Menjadi 6 sampi 9 ton per Ha.

Perusahaan menyadari betapa pentingnya pengembangan dalam bidang kesenian dan kebudayaan terutama dalam pelestarian kesenian lokal. Bantuan olah raga termasuk menjadi sponsor dalam beberapa bidang olah raga termasuk menjadi sponsor dalam beberapa bidang olah raga sudah merupakan tradisi dari perusahaan.

Dengan ditandatanganinya perpanjangan dan perubahan kontrak karya antara PT. INCO dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 1996, maka akan semakin banyak tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Dengan berhasilnya Soroako sebagai daerah yang berpenduduk sejahtera dan makmur, pemerintah menghimbau perusahaan untuk mengembangkan usahanya ke daerah-daerah lain di pulau ini.

Setiap tahun PT. INCO menerima permintaan untuk peningkatan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat seperti membangun jembatan, jalan, sumbangan berupa uang maupun peralatan. Walaupun kebijaksanaan perusahaan telah membantu daerah-daerah dimana perusahaan beroperasi, perusahaan juga menyumbang untuk membangun se-

kolah-sekolah, jalan-jalan pertanian, bantuan kegiatan olah raga, juga sarana dan prasarana di tiga propinsi yaitu Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara.

Di antara sejumlah harapan yang harus diatur dengan seksama adalah keinginan bahwa PT. INCO dapat memberikan peluang kerja untuk setiap anggota masyarakat di Soroako dan sekitarnya. Harapan ini akan meningkat dengan pengembangan produksi dari 100 juta pon Nikel menjadi 150 juta pon Nikel dalam matte pada akhir tahun 1998. Pertambahan penduduk yang datang dari daerah-daerah lain di pulau ini sudah terlihat, dan perusahaan sangat prihatin bahwa banyak diantaranya yang tidak akan mendapat pekerjaan sehingga dapat Soroako menjadi daerah yang rawan dengan bertambahnya tingkat kejahatan. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan perusahaan melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemuka masyarakat setempat untuk menjelaskan tujuan daripada pengembangan produksi serta kaitannya dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Pemanfaatan pekerja-pekerja lokal di daerah proyek akan meyakinkan penduduk bahwa operasi perusahaan merupakan bagian dari masyarakat.

PT. INCO dalam pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar tidak harus didasari oleh jumlah biaya yang dikeluarkan, tetapi dari apa yang dapat dihasilkan untuk kepentingan yang mendasar yang dapat dinikmati masyarakat luas. Konsep yang digunakan adalah "memberikan alat pancing dan bukan ikannya" menjadikan masyarakat sekitar yang mandiri dan merasa memiliki bersama.

Rapat koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah setempat yang dilakukan setiap dua bulan sekali mempunyai peranan penting dalam penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan masalah wilayah dan masyarakat sekitar dengan lebih cepat dan efektif tanpa harus menunggu sampai terjadi suatu masalah ("lebih mudah membengkokkan besi yang masih membara daripada yang sudah dingin").

3. Pengembangan Wilayah

3.1. *Latar Belakang*

Setelah ditandatangani kontrak karya pada tahun 1968, base camp pertama didirikan di Malili sebuah kota nelayan diteluk Bone dengan penduduk pada saat itu sekitar 12,000 jiwa dan penduduk kecamatan Nuha sekitar 10.000 jiwa.

PT. INCO telah melewati beberapa tahapan sebelum sampai pada tingkat produksi saat ini. Dari periodenya, secara umum tahapan tersebut terdiri dari :

- 1968-1973 : masa eksplorasi
- 1973-1976 : masa kontruksi tahap I
- 1976-1978 : masa konstruksi tahap II (pengembangan tahap I)
- 1978-sekarang : masa produksi
- 1988-1991 : masa pengembangan tahap II
- 1996-sekarang : masa pengembangan tahap III.

Sejak tahap awal kehadiran PT. INCO sampai sekarang, semua kegiatan perusahaan yang dilakukan untuk pengembangan wilayahnya dilakukan secara berkesinambungan baik secara tidak langsung (yaitu yang awalnya untuk kebutuhan industri itu sendiri) yang mana dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar (seperti keberadaan jalan raya, listrik dan air minum, rumah sakit dan klinik kesehatan, dan lain-lain), maupun secara langsung (yaitu kegiatan yang ditujukan langsung untuk kebutuhan dasar masyarakat sekitar) yang mana kegiatannya dilakukan dengan pemerintah daerah setempat dan masyarakat sekitar untuk kebutuhan masyarakat setempat (seperti pengembangan kegiatan umum, kegiatan pertanian dan peternakan, bantuan pendidikanm perbaikan kesehatan, kegiatan sosial masyarakat, dan lain-lain). PT. INCO sejak kehadirannya yang hampir tiga puluh telah memberikan warna tersendiri dalam laju perkembangan pembangunan wilayah di belahan utara Propinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Luwu.

Kenyataan menunjukkan bahwa andalan pendapatan asli daerah bersumber dari sektor pertambangan. Disamping itu keberadaan PT. INCO memberikan keuntungan perbandingan yang khas karena keberadaannya mempunyai dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang khusus untuk daerah ini.

3.2. *Pengembangan Wilayah Sebelum Kehadiran PT. INCO*

Sekitar tahun 1960-an, Kecamatan Malili dan Nuha masih belum bebas dari gangguan gerombolan yang akibatnya menjadikan daerah ini sangat tertutup dan terpencil. Jalan raya dari Palopo, ibukota Kabupaten Luwu ke Malili sangat memprihatinkan. Jalan dari Malili ke Wasuponda melalui Tole-tole dalam keadaaan sangat buruk sekali sampai tahun 1973 dan akhirnya ditinggalkan sama sekali setelah proyek jalan raya PT. INCO sepanjang 60 Km yang menghubungkan Malili-Soroako melalui Wasuponda dirampungkan (Jalan raya yang baru ini tidak melalui Tole-tole). Kemudian tahun 1982 jalan raya dari Palopo ke Malili dibuka oleh Pemerintah sebagai bagian dari Trans-Sulawesi.

Sebagai gambaran kondisi masyarakat sekitar pada waktu itu adalah :

- sarana dan prasarana desa-desa sangat minim, listrik, saluran air bersih belum ada,
- kondisi kesehatan masyarakat sangat buruk ditandai dengan banyaknya penderita Malaria dan TBC akibat udara lembab dan buruk serta kurang gizi, sanitasi kurang baik dan tingkat kesehatan penduduk pada umumnya rendah,
- pendapatan perkapita relatif sangat rendah, hanya mengandalkan usaha cocok tanam dan ladang berpindah, hasil hutan seperti damar, rotan dan kayu sangat sulit dipasarkan,
- taraf pendindikan sangat rendah, fasilitas pendidikan sangat minim, hanya ada satu SD di Nuha, sementara SMP hanya ada di Malili,

- tingkat pengetahuan umum sangat rendah sekali karena tidak adanya sarana telekomunikasi dan sumber informasi lainnya.

3.3. *Kegiatan Pengembangan Wilayah di Sekitar PT. INCO*

Dengan ditanda-tanganinya kontrak karya antara PT. INCO dan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1968, maka kehadiran PT. INCO di daerah Kecamatan Nuha ini mulai menampakkan dampak yang positif. Pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasi telah dimulai saat itu sampai sekarang.

Bijih nikel laterit diambil dengan sistem penambangan terbuka dan terletak di daerah sekitar Soroako. Pabrik pengolahan terdiri dari 3 jalur produksi mempunyai 2 tanur pengering, 4 tanur reduksi, 3 tungku listrik, 2 tungku pemurni. Perluasan untuk meningkatkan produksi dari 100 juta pon ke 150 juta pon Nikel dalam matte yang diharapkan selesai akhir tahun 1998 akan menambah jalur produksi keempat yang terdiri dari 1 tanur pengering, 1 tanur reduksi, 1 tungku listrik, 1 tungku permurni, peningkatan fasilitas lainnya.

PLTA berkapasitas terpasang 165 MW terletak di sungai Larona diperlukan untuk peleburan bijih Nikel, 5 MW disalurkan ke PLN untuk kebutuhan masyarakat. Dalam Perluasan produksi, PLTA baru di sungai Larona bawah dengan kapasitas 93 MW sedang dalam tahap pembangunan.

Fasilitas pelabuhan laut eksport dan import terletak di sungai Malili dapat disandari dengan draft 3 m dan bobot mati 2500 ton (DWT). Terminal BBM terletak ditanjung Mangkasa yang diisi oleh tangker minyak, yang kemudian dipompakan dari terminal ke pabrik di Soroako melalui pipa sepanjang 50 Km.

Jalan proyek dari Malili - Wasuponda - Wawondula - Soroako sepanjang 60 Km dengan permukaan aspal, darpat dimanfaatkan sebagai angkutan umum.

Fasilitas perkotaan di Soroako lengkap dengan perumahan, rumah sakit, lapangan terbang perintis, terminal, pasar, perkantoran, sarana olah raga dan rekreasi. Dan di dua kota satelit lainnya yaitu Wasuponda dan Wawondula pembangunan rumah (400 di Wawondula dan 100 di Wasuponda) dengan sarana dan prasarananya di tahun 1984 merubah dari lembah yang kosong (hanya 3 gubuk di Wawondula dan 16 rumah di Wasuponda) menjadi kota satelit.

Fasilitas telekomunikasi (telepon, fax, dan lain-lain) yang juga didukung oleh stasiun bumi PT. TELKOM, dan dua buah relay televisi yang dibangun oleh PT. INCO yang keduanya diserahkan dan dioperasikan TVRI.

Fasilitas pendidikan selain yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Soroako, mulai dari SD sampai SMU, juga dibangun fasilitas pendidikan di kota Wasuponda, Wawondula dan Malili. Pada tahun 1992 sekolah khusus kejuruan program diploma D2 politeknik dibentuk di Soroako untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Bantuan pendidikan dan biaya untuk sekolah-sekolah di sekitar terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru dan pendidikan.

Fasilitas kerohanian didirikan untuk memenuhi kebutuhan peribadatan karyawan dan masyarakat sekitarnya berupa mesjid, gereja dan pura.

Pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar tidak saja terpusat pada daerah dimana PT. INCO sedang berproduksi, tetapi menjangkau keluar daerah dimana PT. INCO melihat sangat mendasar dan membutuhkan, baik di bidang sarana dan prasarana (seperti: Sekolah SMP di Kecamatan Bahomatepe, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Jalan usaha tani sepanjang 8 km dengan lebar 5 m di desa Huko-huko dan Tosiba di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk daerah pertanian 1200 Ha, dan lain-lain seperti fasilitas penerangan jalan, air bersih, sanitasi, gedung pertemuan).

4. Konsep Pengembangan Masyarakat

4.1. Program Pengembangan Masyarakat di Sekitar PT. INCO

Wawasan pembangunan wilayah dan masyarakat di sekitar PT. INCO merupakan program kerjasama antara Perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat dan dilakukan secara terpadu dengan program pemerintah setempat. Program yang sudah maupun yang akan dilakukan adalah yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat banyak, dan ini diharapkan mempercepat kemandirian masyarakat sehingga bantuan selanjutnya akan lebih berupa pemikiran dan rangsangan. Program yang telah dilakukan antara lain di bidang :

A. Pendidikan ***(Education)***

- Tahun 1993 bangunan SMA didirikan di Wasuponda di atas tanah yang disediakan masyarakat di seberang sebuah sungai kecil, berikut jembatan gantung sepanjang 30 meter untuk siswa menyeberang.
- Hal yang sama juga dilakukan di daerah Wawondula.
- Politeknik program D2 (yang sekarang disebut ATS = Akademi Teknik Soroako) didirikan pada tahun 1991 dengan bantan dana dari INCO Limited dan Sumitomo Metal Mining Co. Sekolah ini memprioritaskan penduduk lokal dan karyawan sekitar Soroako, Wasuponda, Wawondula dan Malili. Ini bertujuan untuk mendidik menjadi tenaga terampil yang siap pakai agar berpeluang yang lebih besar mendapat lapangan kerja.
- Program anak asuh untuk putra-putri berprestasi penduduk lokal Soroako dan sekitarnya dengan memberikan bantuan perlengkapan seluruh kebutuhan belajar dimulai dari SD sampai SMU.

B. Kesehatan & Kesejahteraan (*Health & Welfare*)

- Pembangunan klinik dan posyandu di desa-desa dibantu untuk memberikan pelayanan masyarakat yang dibantu oleh rumah

sakit PT. INCO. Penyuluhan mengenai kesehatan diberikan melalui sekolah-sekolah, bakti sosial desa. Bagi warga yang tidak mampu, fasilitas pengobatan secara cuma-cuma diberikan.

- Kampanye mengenai hidup sehat serta upaya penanggulangan penyakit dilakukan bekerja sama dengan pemerintah (dan Puskesmas), organisasi kemasyarakatan lainnya.
- Perbaikan saluran air buangan oleh warga desa dibantu dengan penyediaan bahan-bahan (batu, pasir dan semen).

C. Kesenian & Kebudayaan (*Arts & Culture*) dan Olah Raga (*Athletics*)

- Panggung terbuka disediakan dua atau tiga kali setahun untuk pagelaran seni budaya. Bulan Agustus 1994 misalnya, telah diselenggarakan festival kesenian dari tiga propinsi (Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara). Team kesenian kecamatan telah mampu menarik perhatian di tingkat kabupaten dan propinsi).
- Pembinaan dihampir semua cabang olah raga yang diminati masyarakat dan karyawan dilakukan dengan dana khusus. Atlit-atlit karate dan selam dari Soroako ada yang berhasil merebut medali di tingkat internasional maupun nasional.
- Bantuan untuk cabang olah raga lain melalui Koni Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu maupun di Tingkat I Sulawesi Selatan, Tengah maupun Tenggara, telah menghasilkan prestasi yang gemilang di pekan olah raga nasional maupun Asia.

D. Sarana dan Prasarana (*Civic & Community*)

- Bantuan fasilitas jaringan air bersih di Soroako yang diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada bulan Desember 1996 merupakan kerja sama antara perusahaan, pemerintah daerah Kecamatan Nuha, dan masyarakat sekitar.

- Di Wawondula fasilitas jaringan air bersih diselesaikan atas dasar kerja sama seperti di atas, dan diserahkan kepada pemerintah dalam pertengahan tahun 1993. Demikian juga halnya di Wasuponda.
- Kebutuhan dasar seperti sarana mandi dan cuci dibangun di banyak pedesaan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat.
- Bantuan televisi dan parabola lengkap dengan genset di daerah-daerah terpencil, dimana masyarakat secara gotong royong mendirikan bangunan (atau yang dikenal dengan Baruga) dengan tujuan untuk dapat berkumpul melihat acara televisi sambil berdiskusi.

E. Dan Lain-lain (*Others*)

- Penyuluhan pertanian dan palawija di tahun 1989 didatangkan dari Pusat Studi Lingkungan Universitas Hasanuddin. Hasil dari penyuluhan ini meningkatkan produksi petani di Loeha dan Timampu dari 2 ton gabah per hektar menjadi 4 sampai 6 ton per hektar.
- Penyuluhan pada bulan Juni 1994, bekerja sama dengan Badan Penelitian Pertanian (BALITAN) Maros dan pemerintah Kecamatan Towuti dilaksanakan suatu proyek penyuluhan tiga tahun penuh. Proyek ini diharapkan menjadi proyek percontohan intensifikasi pertanian dan pembiakan ikan (mina padi) serta palawija yang diikuti lebih dari 100 petani di atas areal tanah 10 Ha yang terdiri dari sawah dan kebun. Panen pertama awal Nopember 1994 menunjukkan hasil sawah percontohan yang dikelola petani menghasilkan 6 sampai 9 ton gabah per hektar.
- Bantuan pengairan dan irigasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan bantuan material di daerah Labose di Kecamatan Malili.
- Pengembangan industri kecil dengan mengalihkan pekerjaan berskala ringan misalnya sebagai kontraktor di bidang *cleaning*

service, penginapan, catering service, perbaikan AC dan lain-lain. Pengembangan ini juga dilakukan dengan pelatihan baik keahlian dasar maupun dari segi managementnya.

- Bantuan-bantuan lainnya seperti penelitian, pendidikan sekolah unggul, yayasan Ventura, secara aktif dilakukan.

4.2. Filosofi PT. INCO Dalam Pengembangan Masyarakat

Pemikiran yang sangat mendasar yang dilakukan oleh PT. INCO untuk pengembangan wilayah dan masyarakat adalah untuk mengembangkan wawasan masyarakat yang mandiri dengan mengimbangi kemajuan perusahaan. Maka filosofi yang dipakai adalah :

- Menjadikan Perusahaan sebagai "fasilitator" dalam pengembangan wilayah dan masyarakat, dengan
- Fisolofi "Memberikan alat pancing dan bukan ikannya".

Dengan pengertian tersebut di atas, perusahaan mengharapkan adanya keaktifan di pihak masyarakat dan pemerintah setempat yang dianggap lebih mengetahui kebutuhan dasar yang perlu ditunjang oleh perusahaan. Perusahaan dalam hal ini juga akan ikut serta dalam memikirkan dan merangsang serta memberikan bantuan fisik atas kegiatan pengembangan wilayah dan masyarakat. Kegiatan ini dikaitkan dengan konsep "Memberikan alat pancing dan bukan ikannya" diharapkan adanya swadaya atau keikutsertaan masyarakat, dimana akhirnya bantuan ini akan dapat dikurangi secara berangsur bila masyarakat sudah mandiri sehingga bantuan selanjutnya akan berupa pemikiran dan rangsangan. Dengan demikian masyarakat pada akhirnya akan secara berangsur-angsur merubah pola pikir ketergantungan kepada perusahaan menjadi pola pikir mandiri dan partisipasi.

Bila konsep ini dipahami dengan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, maka hal ini akan dapat mendukung keberhasilan. Keberhasilan ini didukung oleh tatanan masyarakat yang kian berkembang khususnya pada tingkat penghidupan, pendidi-

kan, dan yang lebih penting lagi adalah dukungan pemerintah daerah. Sebagai pemikiran, di bawah ini adalah konsep yang dilakukan PT. INCO dalam pengembangan wilayah dan masyarakat:

- *Pada awalnya*, program pengembangan masyarakat dikonsentrasikan pada kebutuhan dasar (infrastruktur).
- *Tahap kedua*, usaha perubahan pola pikir masyarakat dari alami menjadi mandiri dengan jiwa kewiraswastaan (misalnya dengan mengalihkan fasilitas yang ada, dibawah pengelolaan pemerintah maupun masyarakat).
- *Tahap ketiga*, melanjutkan program pembangunan infrastruktur yang masih diperlukan dan pemeliharaan fasilitas yang ada.
- *Tahap keempat*, pembinaan melalui penyuluhan peningkatan produksi dan hasil usaha (melalui kemampuan manajemen pengelolaan).

4.3. Kendala PT. INCO dalam Pengembangan Masyarakat

Filosofi yang digunakan terasa sangat sederhana, tetapi dalam pelaksanaannya tidak begitu mudah! Kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

- Ada anggapan bahwa PT. INCO berkewajiban membangun seluruh kawasan operasi. (*Akibatnya, kurang berkembangnya swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan wilayah*).
- Konsep PT. INCO sebagai fasilitator, sering disalahartikan oleh masyarakat sebagai "tidak memberi penuh". (*Akibatnya, proyek-proyek yang diberikan kurang ditanggapi, sehingga tanggung jawab sangat rendah*).
- Kondisi wilayah yang menjadi sasaran program, tidak cukup kesiapannya baik dari segi sumber daya manusia, maupun fasilitas pendukungnya. (*Akibatnya, berkembangnya daerah sangat terbatas dan lambat*).

- Lokasi yang jauh dari pusat-pusat pengembangan wilayah. (Akibatnya, *multiplier efectnya* hanya menyentuh sebagian wilayah).

5. Kesimpulan

Pengembangan wilayah dan masyarakat oleh PT. INCO dianggap telah berhasil dikembangkan di daerah ini, dimana PT. INCO selalu mengacu kepada pemikiran bahwa perusahaan berfungsi sebagai "Fasilitator" dengan pengertian bahwa perusahaan masih ikut dalam pemikiran dan perangsangan swadaya dan partisipasi masyarakat.

PT. INCO optimis bahwa apa yang sudah dilakukan dalam pengembangan wilayah dan masyarakat pada dasarnya sudah benar, dan perbaikan dan peningkatan dalam program ini masih akan terus dilanjutkan dengan cara :

- Meneruskan dan menyatukan pola pikir pimpinan masyarakat (dan pemerintah daerah) dan PT. INCO, menuju satu wawasan positif untuk melakukan usaha dan pengembangan masyarakat sekitar.
- Meneruskan dukungan kepada program pemerintah daerah dimana PT. INCO lihat mengena.
- Meneruskan dukungan kepada program pemerintah dalam menjalankan filosofinya yang lebih pro-active.

Apa yang telah dilakukan oleh PT. INCO selama ini disesuaikan dengan kondisi dan budaya masyarakat setempat, yang belum tentu dapat diterapkan di daerah lain di Indonesia yang berbeda kondisi dan budaya masyarakatnya di daerah tersebut. Oleh karena itu sangatlah penting bagi perusahaan-perusahaan tambang yang akan terlibat dalam pengembangan wilayah dimana perusahaan tambang tersebut beroperasi untuk memperhatikan kondisi dan budaya masyarakat setempat dalam mencari model yang sesuai untuk pengembangan wilayah dimana perusahaan tersebut beroperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ir. Andre Daenuwy. Peranan PT. INCO dalam Pengembangan Wilayah dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Soroako. Simposium Pertambangan 1996, Yogyakarta 28-29 Mei 1996.

Ir. Ruslan Muhadi. Peran Program Pengembangan Masyarakat PT. INCO dalam daerah di Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan. Temu profesi tahunan V, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Jakarta 29 . Agustus 1996.

O. Samosir /B. Susanto. Community Development, PT. INCO Experience. IMA presentation 1992.

PT. INCO Public Relations Departemen. Pengembangan Masyarakat di sekitar Soroako, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Agustus 1995.

PERANSERTA PT TIMAH Tbk DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI SEKTOR PERTAMBANGAN

Thobrani Alwi
PT Timah Tbk

1. Pendahuluan

PT Timah Tbk adalah perusahaan penambangan terpadu mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan (lepas pantai dengan menggunakan Kapal Keruk, di darat dengan menggunakan tambang semprot), pencucian, peleburan dan pemurnian hingga pemasaran. Diinformasikan bahwa pemasaran timah ± 95% untuk tujuan ekspor dan ± 5% domestik.

Berdasarkan pengalaman puluhan tahun PT Timah Tbk di sektor pertambangan di pulau-pulau timah, ternyata suksesnya suatu kegiatan pertambangan tidaklah semata-mata didukung oleh kemampuannya ditinjau dari aspek teknis dan ekonomi/finansial saja, akan tetapi juga sejauh mana kepedulian perusahaan terhadap aspek lingkungan (dalam arti luas) seperti kepedulian terhadap dampak lingkungan, sosial kemasyarakatan dan bahkan politik.

Oleh karena itulah peran sektor pertambangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditinjau dari misi sektoralnya secara nasional, tetapi ditekankan pula pada misi kewilayahan dan kemasyarakatannya. Ini berarti bahwa sumbangan bagi daerah dari sektor pertambangan yang diharapkan bukanlah semata-mata besarnya bagian dari pajak, royalti dan pungutan pertambangan lainnya, akan tetapi juga manfaat apa yang dinikmati oleh masyarakat setempat dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di dalam upaya pengembangan wilayah dan masyarakat dengan kehadiran PT Timah Tbk di pulau-pulau timah adalah:

- Bahwa sektor pertambangan dapat berfungsi sebagai pioner dan aktivator dalam kegiatan perekonomian wilayah;
- Bahwa sektor pertambangan mengusahakan komoditi "*non renewable resources*", sehingga pengusahaannya hanya dapat dilakukan satu kali;
- Bahwa kegiatan sektor pertambangan menimbulkan dampak yang memerlukan pengelolaan;
- Bahwa kegiatan sektor pertambangan berdampak terhadap kelangsungan kegiatan perekonomian pascapenambangan

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka upaya pemanfaatan kegiatan pertambangan sebagai pionir harus dioptimalkan, pengelolaan dampak ekologis harus dilakukan, kegiatan ekonomi rakyat berbasiskan nontambang harus dipelihara dan ditingkatkan dan perlu pula dipikirkan kegiatan ekonomi baru yang setara dan bersifat substitusif terhadap kegiatan ekonomi pertambangan dalam rangka rangka pengembangan wilayah dan masyarakat.

Dengan didasari pemikiran-pemikiran di atas, makalah ini akan menguraikan berbagai kegiatan dan pengalaman PT Timah Tbk dalam konteks pengembangan masyarakat khususnya, mulai dari kegiatan pra penambangan, pada saat penambangan (penggalian, pencucian hingga peleburan) dan pasca penambangan, serta berbagai kegiatan pendukungnya berkenaan dengan kesempatan bekerja/berusaha, pemanfaatan sarana/prasarana fisik, pengembangan SDM serta berbagai masalah dan kendala yang dihadapi untuk menjawab 2 isu pokok yang berkembang dalam mengembangkan dan mengimplementasikan konsep kerakyatan di bidang pertambangan, yakni:

- Peningkatan peranserta rakyat dalam kegiatan penambangan, dan

- Bagaimana peran industri pertambangan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat dapat dioptimalkan.

2. Misi PT Timah Tbk

Komitmen PT Timah Tbk untuk mewujudkan apa yang dikemukakan di atas tercermin dalam misinya sebagai berikut:

> "Menjadi perusahaan tambang kelas dunia dengan cara selalu unggul dalam semua aspek operasi dan kegiatan perusahaan, sehingga mampu mewujudkan nilai manfaat maksimum bagi pemegang saham, mitra usaha, karyawan serta masyarakat di mana perusahaan beroperasi".

Dengan berpegang pada komitmen di atas oleh perusahaan telah disusun berbagai program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah baik pada masa prapenambangan maupun menghadapi era pascatimah.

Di dalam pelaksanaannya agar lebih mantap telah dibentuk pula Tim Pengelola Program Pengembangan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Timah Tbk No. 187/SK-0000/97-S8 tanggal 18 Agustus 1997.

3. Tujuan Program Pengembangan Wilayah dan Masyarakat

Tujuan program pengembangan wilayah dan masyarakat PT Timah Tbk dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Untuk memacu pertumbuhan industri (di luar timah) di pulau timah melalui konsep pulau manufaktur;
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat di mana kegiatan penambangan beriperasi.

Program ini bertujuan untuk:

a) Memberikan kesempatan bekerja dan berusaha di mana kegiatan pertambangan beroperasi baik yang berkaitan langsung maupun tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pertambangan dengan membina dan mengembangkan usaha yang sudah ada maupun yang baru.

   Untuk mewujudkan ini berbagai alternatif bantuan dapat diberikan dalam bentuk:

   - kemudahan dalam akses permodalan
   - kemudahan akses pemasaran
   - sarana/prasarana dalam rangka pengembangan usaha

b) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat di sekitar tambang.

Kedua tujuan di atas dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah agar berkelanjutan menghadapi era pasca timah. Namun demikian pada kesempatan ini tidak akan menguraikan lebih jauh mengenai pengembangan konsep pulau manufaktur, karena pertemuan ini sesuai dengan temanya lebih menekankan pada konsep ekonomi kerakyatan dengan tema: *Mencari Model Pemecahan Masalah Hubungan antara Industri Pertambangan dan Masyarakat Sekitar.*

4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang

Program pengembangan masyarakat merupakan upaya/strategi pendekatan untuk mendinamisir ataupun menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan kelembagaan masyarakat setempat, sehingga masyarakat sendiri dapat berpartisipasi secara optimal dan tidak tersisihkan dalam mewujudkan gambaran perekonomian pascatimah.

Dengan pendekatan di atas, maka pada dasarnya ada 4 program pokok dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, yakni:

- Program Kesempatan Bekerja dan Berusaha yang Berkaitan dengan Aktivitas Penambangan baik Langsung maupun Tidak Langsung.
  - Pada saat prapenambangan (termasuk pemanfaatan lahan penambangan);
  - Pada saat penambangan sedang beroperasi;
  - Pasca Penambangan, berkaitan dengan pemanfaatan lahan bekas tambang.

  Di dalam kebijakannya, selama tidak mengganggu pencapaian sasaran dan kepentingan perusahaan, diarahkan agar pihak ketiga dalam penyerapan tenaga kerja menggunakan tenaga/ masyarakat setempat.
- Program pengembangan usaha kecil dan koperasi baik yang sudah ada maupun yang baru di sentra-sentra produksi.
- Program pengembangan SDM melalui berbagai pelatihan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka pengembangan usaha. Program ini hendaknya jangan disalahartikan sebagai jaminan penyediaan lapangan kerja bagi mereka yang dilatih oleh perusahaan.
- Program pengembangan kelembagaan masyarakat yang bersifat sosial kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan program tersebut berbagai proyek dan kegiatan telah, sedang dan akan dilaksanakan:

Pra Penambangan

- Penyerapan tenaga kerja

  Pada saat prapenambangan terutama kegiatan berkenaan dengan pemboran/ eksplorasi telah dapat menyerap tenaga kerja

setempat kurang lebih 2.000 orang dan ini berlangsung secara kontinyu.

- Pemanfaatan lahan prapenambangan

  Sebelum dilaksanakan penambangan pihak perusahaan melaksanakan pembebasan lahan/ganti rugi tanam tumbuh serta benda-benda di atasnya. Di dalam pelaksanaannya pihak perusahaan mengacu pada peraturan yang berlaku di daerah serta berkoordinasi dengan pemda setempat (mulai kepala desa, camat hingga Tk. II Kabupaten). Meskipun perusahaan secara yuridis mempunyai hak yang dinamakan Kuasa Pertambangan, tetapi de fakto masyarakat sering memegang tradisi dan pengertian hak atas tanah yang unik, yang pada dasarnya tidak selalu mengacu pada hukum-hukum modern yang berlaku. Hal ini disebabkan hak atas tanah tidak selalu berkait dengan kepemilikan, melainkan lebih berkait dengan ruang untuk hidup, yang berhubungan dengan aspek spiritual maupun sebagai tempat mencari nafkah untuk memenuhi fisik kehidupannya seperti yang berlangsung turun-menurun. Mengingat hal di atas memang diperlukan pendekatan khusus terhadap masyarakat agar permasalahan lahan dapat diselesaikan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat tanpa pembebanan yang tidak wajar oleh perusahaan. Salah satu bentuknya adalah mempekerjakan masyarakat sekitar tambang di dalam kegiatan penambangan serta menerapkan apa yang disebut dengan *penggunaan lahan berurutan (sequential land use).*

  Oleh karena itulah perusahaan di dalam kegiatan penambangan (khususnya tambang dengan skala besar) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan prapenambangan dengan tanaman jangka pendek sebelum dilaksanakan penambangan. Hal ini di samping untuk meningkatkan penghasilan masyarakat, juga meningkatkan keharmonisan hubungan perusahaan dengan masyarakat agar tidak menimbulkan konflik yang dapat menyebabkan "perang" harga saat

ganti rugi, gangguan keamanan, advokasi kr konsumen, pemegang saham, dan sebagainya.

Di dalam pelaksanaannya tentunya mempertimbangkan kondisi tanah serta distribusinya terhadap lokasi permukiman penduduk.

Untuk tahun 1997 akan dimanfaatkan lahan tambang seluas 28 ha di 3 lokasi dengan tanaman jagung.

Pada Tahap Penambangan

Dalam hal penyerapan tenaga kerja pada tahun 1997 di bidang pertambangan/ tambang-tambang semprot terserap tenaga kerja sebesar kurang lebih 8.700 orang, di mana tidak kurang dari 90% adalah tenaga/masyarakat setempat.

Mengapa dapat terjadi demikian? Penjelasannya dapat dilihat dari aspek teknologi pertambangan, di mana acuan dasarnya bahwa semakin canggih teknologinya maka semakin sulit kegiatan tersebut atau perangkat pendukungnya untuk dapat dialihkan kepada masyarakat. Masalahnya, bagaimana memanfaatkan waktu yang cukup lama sebelum kegiatan penambangan ditutup untuk dapat mengalihkan teknologinya kepada masyarakat, walaupun pada awalnya teknologinya cukup tinggi. Sebagai fungsi dari waktu, maka teknologi yang awalnya canggih akan berkurang kecanggihannya. Oleh karena itulah perusahaan telah melaksanakan untuk menarik dan memicu perkembangan perusahaan-perusahaan lokal dan masyarakat sekelilingnya sehingga berdampak positif terhadap peningkatan penyediaan lapangan kerja. Hal tersebut terbukti bahwa kegiatan tambang semprot di darat saat ini sudah dapat dioperasikan oleh masyarakat. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat di kemudian hari apabila beralih kegiatan penambangan lain yang teknologinya tidak banyak berbeda dengan penambangan timah.

Pasca Penambangan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tercantum dalam Rencana Pengelolaan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), pihak timah telah melaksanakan reklamasi bekas-bekas tambang sampai dengan tahun 1996 seluas 2.066 ha, dan pada tahun 1997 seluas 817 ha. Di dalam pelaksanaannya pihak perusahaan menggunakan tenaga kerja setempat yang rata-ratanya berkisar 600 orang per tahun.

Di samping itu untuk lebih mendayagunakan secara optimal penggunaan lahan bekas tambang sesuai dengan konsep penggunaan lahan berurutan (*sequential land use*), telah pula dilaksanakan pemanfaatan lahan tambang yang berisi air (kolong) di 4 lokasi dengan bermacam-macam jenis ikan seperti nila merah, lele dumbo, ikan mas, dan sebagainya. Di dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan PPLH UNSRI dan mengikutsertakan masyarakat setempat. Perkembangannya menunjukkan bahwa budidaya ikan dapat dikembangkan pada areal kolong tersebut. Untuk tahapan berikutnya pada tahun ini juga akan dikembangkan di 10 kolong dan melibatkan masyarakat sebanyak 77 orang.

Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

Kegiatan ini dimulai sebelum PT Timah Tbk go publik. Di dalam pelaksanaannya mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 menganai pembinaan usaha kecil dan koperasi.

Selama periode 1993-1995 telah dilaksanakan pengembangan usaha kecil dan koperasi sebagai berikut:

- Pulau Bangka sebanyak 147 usaha kecil dan koperasi
- Pulau Belitung sebanyak 61 usaha kecil dan koperasi
- Palembang sebanyak 10 usaha kecil dan koperasi
- Propinsi Riau yang meliputi Tanjung Pinang, Singkep dan Pekanbaru sebanyak 147 usaha kecil dan koperasi.

Di samping itu telah pula dibina dan dipekerjakan pengusaha kecil hingga menengah kurang lebih berkisar 200-250 orang untuk setiap pekerjaan docking kapal, tugboat, perbaikan steiger dan sebagainya. Pekerjaan seperti ini berlangsung secara rutin.

Pelatihan

Aspek pengembangan manusia merupakan isu karena untuk pekerjaan tertentu ada ketidaksepadanan antara tingkat pendidikan masyarakat setempat dengan tuntutan kualitas yang dapat memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh keberadaan suatu usaha pertambangan sehingga dapat merupakan hambatan untuk tercapainya keharmonisan antara pertambangan dan lingkungan. Oleh karena itu di dalam implementasinya perusahaan selalu hati-hati agar tidak disalahartikan sebagai jaminan penyediaan lapangan kerja bagi mereka yang dididik. Di dalam pelatihan itu ada yang masih mempunyai keterkaitan dengan kegiatan penambangan itu sendiri dan ada yang tidak terkait sama sekali.

Berbagai pelatihan yang telah dilaksanan selama tahun 1995-1996 sebagai berikut:

- Pelatihan Kewirausawan, bekerjasama dengan Deperndag berjumlah 74 orang.
- Pelatihan di bidang keteknikan seperti las, kelistrikan dsb, bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja di Palembang, Tanjung Pinang dan Pangkalpinang sebanyak 287 orang.
- Pelatihan Nelayan bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kotamadya, Pangkalpinang sebanyak 54 orang.
- Magang

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi remaja putus sekolah agar mempunyai ketrampilan tertentu untuk memenuhi pasar tenaga kerja. Adapun jenis pelatihan yang diberikan adalah pengecatan di KK, membubut, las/cor dsb, di Balai Karya milik perusahaan.

Pengembangan Industri Pakaian Jadi/Garmen

Pengembangan industri pakaian jadi/garmen dilaksanakan di Pulau Bangka dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan memanfaatkan aset perusahaan seperti gedung, listrik dsb. Industri pakaian jadi tersebut berorientasi ekspor dan saat ini sudah dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 100 orang. Pengelolaannya oleh Koperasi Mitra Mandiri (koperasi karyawan timah). Di masa mendatang akan dikembangkan di tempat-tempat lain dalam bentuk plasma dimana industri garmen yang ada di Pangkalpinang sebagai intinya.

Lain-lain

a. Dana Pra Sejahtera

   Setiap tahun PT Timah Tbk menyerahkan Dana Pra Sejahtera kepada Departemen Keuangan dari keuntungan perusahaan. Untuk tahun 1995 sebesar Rp 2,69 milyar dan tahun 1996 sebesar Rp 3,13 milyar.

b. Di samping itu berbagai bantuan sosial telah diberikan oleh perusahaan kepada berbagai lembaga kemasyarakatan seperti panti asuhan, mesjid-mesjid, sekolah-sekolah dan sebagainya, dalam jumlah hingga mencapai ratusan juta rupiah.

Ke depannya perusahaan mempunyai komitmen untuk terus menjalankan program-program pengembangan masyarakat ini agar kehadirannya di tengah-tengah masyarakat bisa ikut dinikmati arti ekonominya bagi masyarakat.

5. Kemitraan

Dari pengalaman di berbagai tempat yang pernah diketahui upaya pengembangan masyarakat yang secara langsung dilakukan oleh pelaku penambangan tanpa peranserta unsur pemerintah seringkali tidak efektif. Hal ini antara lain dikarenakan sering tidak adanya kesesuaian antara program-program yang dilaksanakan

oleh perusahaan dengan hal-hal yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat daerah setempat. Oleh karena itu agar keberadaan industri pertambangan dapat dimanfaatkan secara optimal perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat setempat dan pihak perusahaan.

Mengingat hal tersebut pihak perusahaan di dalam pelaksanaan program pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat sebelum dilaksanakan selalu mengundang pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, instansi terkait lembaga perguruan tinggi dan sebagainya, melalui forum-forum workshop, seminar dan sebagainya untuk menjelaskan program perusahaan.

Di samping itu penjelasan mengenai hal itu disampaikan pula oleh pimpinan puncak perusahaan baik kepada Pemda Tk I, Tk II serta DPRD untuk adanya kesepakatan serta persepsi yang sama dalam mencapai tujuan pengembangan wilayah dan masyarakat.

Pada level operasional pendekatan disampaikan pula kepada pihak daerah seperti kepala desa, camat, dan dalam pelaksanaannya diikutsertakan lembaga-lembaga penelitian seperti Lembaga Pertanian Tanaman Industri, Dinas Perikanan dan lain sebagainya. Juga di dalam pelaksanaannya pihak perusahaan memanfaatkan koperasi-koperasi (Koperasi Mitra Mandiri/Koperasi Karyawan dan Koperasi Jasa Usaha Bersama Pertim/Koperasi Binaan PT Timah Tbk) serta perusahaan-perusahaan lainnya dalam rangka adanya jaringan/jalinan usaha (*networking*).

Namun demikian nampaknya usaha-usaha di atas belum cukup karena di dalam pelaksanaanya masih memerlukan prakondisi adanya kesediaan birokrasi dan perusahaan untuk memahami kebutuhan/aspirasi yang ada di masyarakat (*need assessment*).

Untuk itu perusahaan telah membentuk Tim Pengelola Program Pengembangan Masyarakat seperti dikemukakan sebelumnya di mana nantinya ada unsur-unsur di dalamnya orang-orang yang direkrut yang paham betul melaksanakan pendekatan kepada masyarakat untuk memahami kebutuhan/aspirasi masyarakat tersebut atau yang dikenal dengan *Participation Rural Appraisal* (PRA).

6. Program Perusahaan Menghadapi Era Pasca Timah

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam rangka pengembangan wilayah dalam menghadapi era pasca timah, pihak perusahaan telah mempersiapkan konsep pulau manufaktur untuk memacu pertumbuhan industri (di luar timah) di Pulau Bangka. Konsep tersebut merupakan bagian dari strategi pertumbuhan perusahaan dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan, seperti diserasikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Konsep pulau manufaktur ini pada dasarnya dilandasi pada pemikiran bahwa pulau ini mempunyai keunggulan komparatif:

- Letak geografis yang strategis terhadap lokasi SDA dan pusat pemasokan
- Prasarana transportasi (udara, laut dan darat) yang cukup baik
- Pusat Perdagangan regional sejak abad 19
- Kesediaan SDM dengan etos kerja yang tinggi
- Berbagai fasilitas yang dimiliki oleh PT Timah seperti energi listrik, telekomunikasi LDD/IDD, Fasilitas Balai Karya, Politeknik Manufaktur dan sebagainya.

Namun demikian disadari bahwa untuk keunggulan kompetitifnya berbagai persyaratan harus diupayakan seperti kemudahan perijinan, insentif bagi calon investor dan sebagainya, tantangan persaingan yang tidak kecil dari pesaing dalam hal pengembangan kawasan industri; dan proyek pengembangan industri merupakan proyek jangka panjang dan padat modal.

Dalam rangka pengembangan pulau manufaktur ini ada 2 program pokok yang satu sama lainnya saling berkaitan dan menunjang:

a) Mengoptimalkan pemanfaatan Perusahaan sehingga menjadi pusat laba (*profit center*) sehingga mampu berdiri sendiri seperti Balai Karya, Dok Kapal.
   Untuk pengembangannya berbagai program dan kegiatan telah disiapkan:

- Mempersiapkan SDM yang berorientasi industri. Untuk itu telah dibuat Politeknik Manufaktur (Polman) dan Bangka Island Outdoor (BIO)
- Memperluas/meningkatkan kemampuan keteknikan di mana Balai Karya yang semula berfungsi sebagai unit pemeliharaan menjadi pabrikasi
- Menggiatkan Riset dan Rekayasa seperti Timah Teknik Rekayasa (TTR) dan Ocean Enggineering Research Centre (OERC)
- Kerjasama Teknik dan bisnis dengan Basque-Spanyol
- Mengembangkan unit usaha berpeluang pasar potensial seperti Dok Air Kantung (DAK) serta Galangan Kapal Timah Manggar (GKTM) di Belitung.

b) Pengembangan Kawasan Industri Bangka

Kawasan Industri Bangka (KIB) ini akan didirikan di Belinyu, pulau Bangka. Berbagai kajian telah dilaksanakan untuk menentukan berbagai industri yang prospektif dapat dikembangkan di pulau ini seperti steel industrie, marine enggineering industries, tool and machine, sea based industies, agro based industries dan lain sebagainya.

Pada saat ini telah disetujui ijin prinsip dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan di dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Pemda (Tk I dan Tk II) dengan membentuk Tim yang dibuat berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Kepala Daerah Tk II Bangka, dan juga telah selesai penyusunan rencana tata ruang kawasan.

7. Penutup

Demikian disampaikan berbagai kegiatan pengabdian perusahaan kepada masyarakat dalam mewujudkan cita-cita perusahaan menjadi *a good corporate citizen*.